



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. RAYA BANDUNG NO.65, BOJONG, KARANGTENGAH, CIANJUR

LAPORAN AKHIR

KAJIAN LOKASI IBUKOTA CALON KABUPATEN PERSIAPAN CIANJUR SELATAN



TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR



Pemekaran daerah dimaksudkan untuk menguatkan etika profesionalisme dalam pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang akan menciptakan hubungan yang bersifat kesetaraan antara birokrasi dan publik yang dilayani. Pemekaran daerah ditujukan pada penerapan manajemen dan penguasaan teknologi untuk peningkatan publik, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung bersifat cepat, tepat, mudah, padat teknologi, dan padat informasi. Pemekaran daerah dilandasi atas profesionalisme, karena rentang kendali yang lebih sempit sehingga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat terjamin kualitasnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu disusun **"Kajian Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan"**. Kajian tersebut nantinya dipergunakan sebagai bahan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Cianjur Selatan yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



Berikut ini adalah **LAPORAN AKHIR** Pekerjaan **Kajian Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan** yang merupakan bagian dari produk kegiatan ini. Laporan ini terdiri dari **Pendahuluan, Pendekatan dan Metodologi, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, Profil Wilayah, Analisa Kewilayahan dan Kesimpulan**. Kami berharap dokumen ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi tercapainya tujuan dan sasaran dari pekerjaan ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Cianjur,

November 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan	I-1
1.1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.2 Dasar Hukum	I-5
1.1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.1.4 Sasaran	I-7
1.1.5 Output Kegiatan	I-7
1.1.6 Ruang Lingkup Subsistensi Kegiatan	I-7
1.1.7 Teknis Pelaksanaan Kerja	I-8
1.1.8 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	I-9
1.1.9 Produk yang Dihasilkan	I-9
1.2 Kesimpulan	I-10



BAB II	PENDEKATAN DAN METODE PEKERJAAN	II-1
2.1	Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan	II-1
2.1.1	Penataan Daerah	II-1
2.1.2	Strategi Penataan Daerah	II-3
2.1.3	Konsep Perencanaan Penataan Kawasan	II-11
2.1.4	Integrated Ecological Linkage	II-15
2.1.5	Kerangka Pikir dan Parameter Penataan Daerah	II-11
2.1.6	Perencanaan Wilayah	II-23
2.1.7	Pendekatan Pemberdayaan Sosio-Ekonomi-Budaya	II-26
2.1.8	Pengembangan Berbasis Masyarakat	II-28
2.1.9	Pendekatan Participatory	II-31
2.1.10	Pembangunan Berkelanjutan	II-34
2.2	Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan	II-38
2.2.1	Metode Pengumpulan Data	II-38
2.2.2	Metode Analisis	II-48
2.2.3	Metode Perumusan Rekomendasi/Kesimpulan/Rencana	II-70
2.3	Program Kerja	II-71
BAB III	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	III-1
3.1	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	III-2
3.2	Kurva Pembobotan Pelaksanaan Pekerjaan	III-3
BAB IV	PROFIL WILAYAH	IV-1
4.1	Kondisi Geografis dan Administratif	IV-1
4.2	Kondisi Fisik	IV-6
4.3	Kependudukan	IV-22
4.4	Kondisi Sarana dan Prasarana	IV-26
4.5	Kondisi Perekonomian	IV-33
4.6	Potensi Daerah	IV-35



BAB V	ANALISIS KEWILAYAHAN	V-1
5.1	Analisis Penentuan Calon Lokasi Kecamatan Ibukota Kabupaten	V-1
5.2	Analisis Karakteristik Fisik Wilayah	V-4
5.3	Analisis Ketata Ruangan	V-8
5.4	Analisis Aksesibilitas	V-10
5.5	Analisis Perekonomian	V-12
5.6	Strategi Pengembangan Wilayah	V-13
BAB VI	KESIMPULAN	VI-1
6.1	Penentuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Persiapan	VI-1
6.2	Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Persiapan	VI-2

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. DOKUMEN PENDAHULUAN

1.1.1. LATAR BELAKANG

Pembentukan daerah otonom merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam suatu pemerintahan Negara. Desentralisasi menjanjikan banyak hal bagi kemanfaatan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Melalui prinsip ini, diharapkan akan berkembang suatu cara pengelolaan kewenangan dan sumber daya. Dalam telaah konseptual, desentralisasi dipahami secara berganda, yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan nasional dan mengaktualisasi representasi lokal. Satu hal yang nyata dari kedua aspek desentralisasi itu adalah keinginan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan kedekatan jarak, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berarti bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan dapat lebih berarti bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan semakin mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi di samping tingkat daya tanggap yang tinggi dalam menyikapi perkembangan di masyarakat. Desentralisasi akan memungkinkan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Penataan daerah merupakan kegiatan pembinaan,



pembentukan, da penghapusan daerah yang menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi. Lingkup penataan daerah dengan demikian meliputi pemekaran atau pembentukan wilayah, penghapusan dan penggabungan daerah, penyesuaian perbatasan daerah, pengalih status daerah secara administratif maupun politik, serta pemindahan ibu kota.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemekaran daerah kini sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis. Hal ini dikarenakan akan ada jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Persyaratan pemekaran daerah menjadi semakin ketat disebabkan karena banyaknya fakta tentang Daerah Otonomi Baru yang kinerja pemerintahannya tidak layak dan bahkan semakin buruk.

Mekanisme ketatnya Pembentukan Daerah Otonomi Baru yang dimaksud adalah Pembentukan Daerah Otonomi Baru diawali dengan Daerah Persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, kemudian daerah persiapan tersebut diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun untuk melakukan kegiatan administrasi yang dipimpin oleh kepala daerah persiapan. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan bisa memenuhi syarat, maka barulah daerah persiapan dapat ditetapkan menjadi Daerah Otonomi Baru. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan tidak bisa memenuhi persyaratan maka daerah persiapan tersebut tidak dapat menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dan digabungkan lagi ke Kabupaten Induk. Secara umum, penentuan pemekaran daerah sepantasnya didasarkan pada persyaratan yang terukur dengan tiga langkah preventif.

Pemekaran daerah dimaksudkan untuk menguatkan etika profesionalisme dalam pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang akan menciptakan hubungan yang bersifat kesetaraan antara birokrasi dan publik yang dilayani.

Pemekaran daerah ditujukan pada penerapan manajemen dan penguasaan teknologi untuk peningkatan publik, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung bersifat cepat, tepat, mudah, padat teknologi, dan padat informasi.



Pemekaran daerah dilandasi atas profesionalisme, karena rentang kendali yang lebih sempit sehingga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat terjamin kualitasnya.

Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan Kabupaten yang harus memenuhi persyaratan administratif. Persyaratan dasar pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah, seperti tabel berikut.

Tabel I.1 Persyaratan Dasar Pembentukan Daerah Persiapan

PERSYARATAN DASAR		
A	PERSYARATAN DASAR KEWILAYAHAN	
	1	Luas wilayah minimal
	2	Jumlah penduduk minimal
	3	Batas wilayah
	4	Cakupan wilayah
	5	Batas usia minimal daerah kabupaten
B	PERSYARATAN DASAR KAPASITAS DAERAH	
	1	Geografi
		a. Lokasi ibukota
		b. Hidrografi
		c. Kerawanan Bencana
	2	Demografi
		a. Kualitas sumberdaya penduduk
		b. Distribusi penduduk
	3	Keamanan
		a. Tindakan kriminal umum
		b. Konflik sosial
	4	Sosial politik, adat dan tradisi
		a. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
		b. Konektivitas sosial
		c. Organisasi kemasyarakatan
	5	Potensi Ekonomi
		a. Pertumbuhan ekonomi
		b. Potensi unggulan daerah

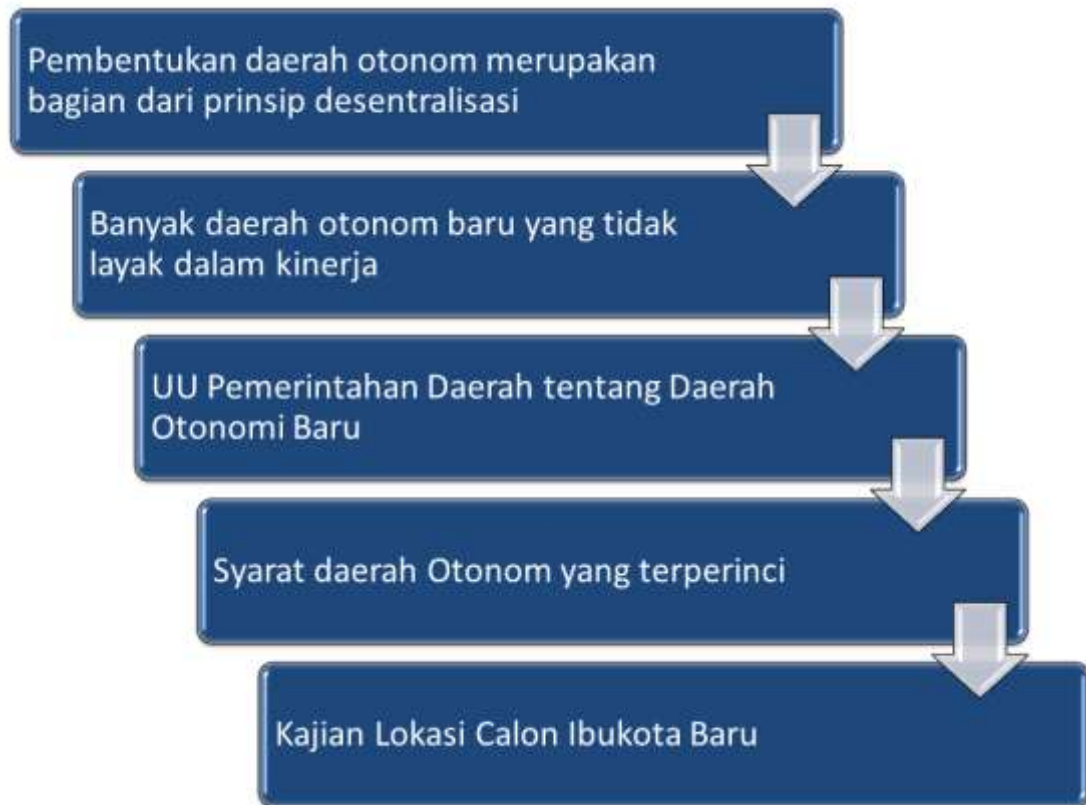


PERSYARATAN DASAR		
	6	Keuangan daerah
		a. Kapasitas pendapatan asli daerah induk
		b. Potensi pendapatan asli calon daerah persiapan
		c. Pengelolaan keuangan dan aset daerah
	7	Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan
		a. Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan
		b. Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan
		c. Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur
		d. Jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk
		e. Rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Daerah Otonom Baru (Pemekaran Daerah) yang diawali dengan penetapan calon lokasi ibukota daerah persiapan. Adapun parameter lokasi ibu kota daerah persiapan meliputi :

- a. Kondisi geografis;
- b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- c. Ketersediaan lahan;
- d. Sosial, budaya, dan sejarah;
- e. Politik dan keamanan;
- f. Aksesibilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat
- g. Kerentanan terhadap bencana

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu disusun **“Kajian Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan”**. Kajian tersebut nantinya dipergunakan sebagai bahan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Cianjur Selatan yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1.1. Latar Belakang Kajian Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

1.1.2. DASAR HUKUM

Kajian ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
7. Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2017 tentang Penataan Daerah

1.1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan kajian ini adalah untuk dihasilkannya 3 (tiga) alternatif lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan sebagai bahan rekomendasi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan bagi DPRD Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk menentukan pilihan Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi geografis Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan.
3. Untuk mengetahui ketersediaan lahan Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan
4. Untuk mengetahui kondisi sosial, budaya, dan sejarah Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan;
5. Untuk mengetahui kondisi politik dan keamanan Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan;
6. Untuk mengetahui aksesibilitas Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat
7. Untuk mengetahui tingkat kerentanan terhadap bencana di lokasi Ibu kota calon Kabupaten persiapan



1.1.4. SASARAN

Adapun sasaran Kajian Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan adalah 14 Kecamatan di Kabupaten Cianjur yang meliputi Kecamatan Agrabinta, Cibirong, Cidaun, Cijati, Cikadu, Kadupandak, Leles, Naringgul, Pagelaran, Pasirkuda, Sindangbarang, Sukanagara, Takokak, dan Tanggeung

1.1.5. OUTPUT KEGIATAN

Keluaran atau output yang diharapkan dari kajian ini adalah:

1. Data standarisasi kriteria dan kelayakan Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan berdasarkan parameter ;
 - a. Kondisi geografis;
 - b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang;
 - c. Ketersediaan lahan;
 - d. Sosial, budaya, dan sejarah;
 - e. Politik dan keamanan;
 - f. Aksesibilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat
 - g. Kerentanan terhadap bencana
2. Tersedianya pernyataan kesediaan lahan Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan;
3. Dokumen kajian sekaligus peta Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan yang komprehensif

1.1.6. RUANG LINGKUP SUBSTANSI KEGIATAN

Secara garis besar kajian Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan mencakup :

1. Survey Data Sekunder dan Primer

- a. Dengan melakukan pengambilan data ke perangkat daerah dan kecamatan untuk kebutuhan kajian Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan;



- b. Dengan melakukan pengambilan data atau informasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, dan tokoh perempuan di wilayah cakupan rencana pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan;
2. **Melakukan survey lokasi** terhadap kecamatan dan desa yang direncanakan menjadi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan;
3. **Menyusun peta calon lokasi ibukota** dan analisis kriteria dan kelayakan yang dibutuhkan dalam kajian Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kondisi geografis dan hidrologis
 - b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang
 - c. ketersediaan lahan Lokasi
 - d. kondisi sosial, budaya, dan sejarah Lokasi
 - e. kondisi politik dan keamanan Lokasi Ibu Kota
 - f. aksesibilitas Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat
 - g. tingkat kerentanan terhadap bencana di lokasi Ibu kota daerah persiapan
 - h. potensi perekonomian calon lokasi ibukota daerah persiapan
4. **Menyusun laporan** pendahuluan, laporan antara, draft laporan akhir dan laporan akhir dan melakukan ekspose semua laporan tersebut di Bappeda Kabupaten Cianjur;

1.1.7. TEKNIS PELAKSANAAN KERJA

1. Pihak Pelaksana (Konsultan) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyusunan **Kajian Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat** berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan;
2. Pihak Pelaksana (Konsultan) menyusun dokumen **Kajian Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat** sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja ini;



3. Pihak Pelaksana (Konsultan) dalam melaksanakan pekerjaan dinyatakan berakhir sampai dengan Dokumen **Kajian Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat** selesai secara keseluruhan, yaitu dengan melakukan serah terima akhir pekerjaan, baik berupa hardcopy maupun softcopy seluruh hasil pekerjaan (buku laporan dan pemetaan) yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja beserta perubahannya.

1.1.8. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah 2 (dua) bulan atau sekitar 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan atau tanggal ditandatangani Kontrak.

1.1.9. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk dari kegiatan **Kajian Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat** ini terdiri dari dokumen dan peta calon lokasi calon ibukota daerah persiapan Kabupaten Cianjur Selatan. Sedangkan dokumen yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan berisikan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), metodologi pelaksanaan, rencana dan jadwal kerja serta rancangan penyajian data primer dan sekunder. Laporan Pendahuluan ini digandakan dalam 10 (sepuluh) eksemplar. Laporan Pendahuluan ini harus diserahkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah SPMK dan atau Kontrak ditandatangani.

2. Laporan Antara

Laporan ini berisikan hasil pengamatan lapangan. Laporan ini digandakan dalam 10 (sepuluh) eksemplar dan harus diserahkan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari terhitung sejak SPMK dan atau Kontrak ditandatangani.



3. Draft Laporan Akhir

Draft Laporan Akhir berisikan perbaikan terhadap data dan informasi serta peta analisis yang telah dirumuskan pada tahap laporan sebelumnya, sesuai hasil sasaran dan masukan serta koreksi yang didapatkan pada saat Pembahasan Laporan Antara. Laporan Akhir ini digandakan dalam 10 (sepuluh) eksemplar dan harus diserahkan paling lambat 50 (lima puluh) hari terhitung sejak SPMK dan atau Kontrak ditandatangani.

4. Laporan Akhir

Laporan akhir ini merupakan penyempurnaan dari Draft Laporan Akhir. Laporan Akhir ini digandakan dalam 20 (dua puluh) eksemplar, soft copy file seluruh tahapan laporan ke dalam 20 (dua puluh) buah CD dan 1 (satu) buah hardisk external, semuanya harus diserahkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak SPMK dan atau Kontrak ditandatangani.

5. Peta Calon Ibu Kota Persiapan

Peta yang dihasilkan merupakan peta wilayah calon ibukota daerah persiapan yang meliputi administrasi wilayah, akses jalan, dan transportasi lainnya, aliran sungai, dan batas wilayah dengan skala 1:25.000.

1.2. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada dokumen kerangka kegiatan yang telah dijabarkan pada penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pekerjaan Kajian Lokasi Ibukota Calon Persiapan Cianjur Selatan ini secara garis besar menampung keinginan dari Pemerintah Daerah dalam rangka menentukan pilihan alternatif lokasi ibukota calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan sebagai bahan rekomendasi dan acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

PENDEKATAN, METODOLOGI, DAN PROGRAM KERJA



2.1. PENDEKATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.1.1. PENATAAN DAERAH

Penataan daerah merupakan kegiatan pembinaan, pembentukan, dan penghapusan daerah yang menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi. Lingkup penataan daerah dengan demikian meliputi:

1. Pembentukan Daerah

a. Pemekaran Daerah

- Pemecahan Daerah
- Penggabungan Bagian Daerah

b. Penggabungan Daerah

2. Penyesuaian Daerah

a. Perubahan Batas Wilayah Daerah

b. Perubahan Nama Daerah

c. Pemberian Nama dan Perubahan Nama Bagian Rupa Bumi



d. Pemindahan Ibu Kota

e. Perubahan Nama Ibu Kota



Gambar II.1. Bagan Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

3. Kewilayahan

- a. Luas wilayah minimal
- b. Jumlah penduduk minimal
- c. Batas wilayah
- d. Cakupan wilayah (Provinsi = 5 kabupaten/Kota, Kabupaten = 5 kecamatan, Kota = 4 kecamatan)
- e. Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan (Provinsi = 10 tahun, Kabupaten/Kota = 7 tahun, Kecamatan = 5 tahun)

4. Kapasitas Daerah

- a. Geografi (lokasi ibu kota, hidrografi, kerawanan bencana);
- b. Demografi (kualitas SDM, distribusi penduduk);
- c. Keamanan (tingkat kriminalitas, konflik sosial);



- d. Sosial politik, adat, dan tradisi (partisipasi politik, kohesivitas sosial, keormasan);
- e. Potensi ekonomi (pertumbuhan ekonomi, keunggulan);
- f. Keuangan Daerah (kapasitas PAD induk, potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan, dan pengelolaan keuangan dan aset Daerah);
- g. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan (aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, pelayanan dasar kesehatan, pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai ASN di Daerah induk, dan rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah Persiapan).

5. Administratif

a. Provinsi

- Persetujuan DPRD kab/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi;
- Persetujuan DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk.

b. Kabupaten/Kota

- Keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kab/kota;
- Persetujuan bersama DPRD kab/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk;
- Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kab/ kota yang akan dibentuk.



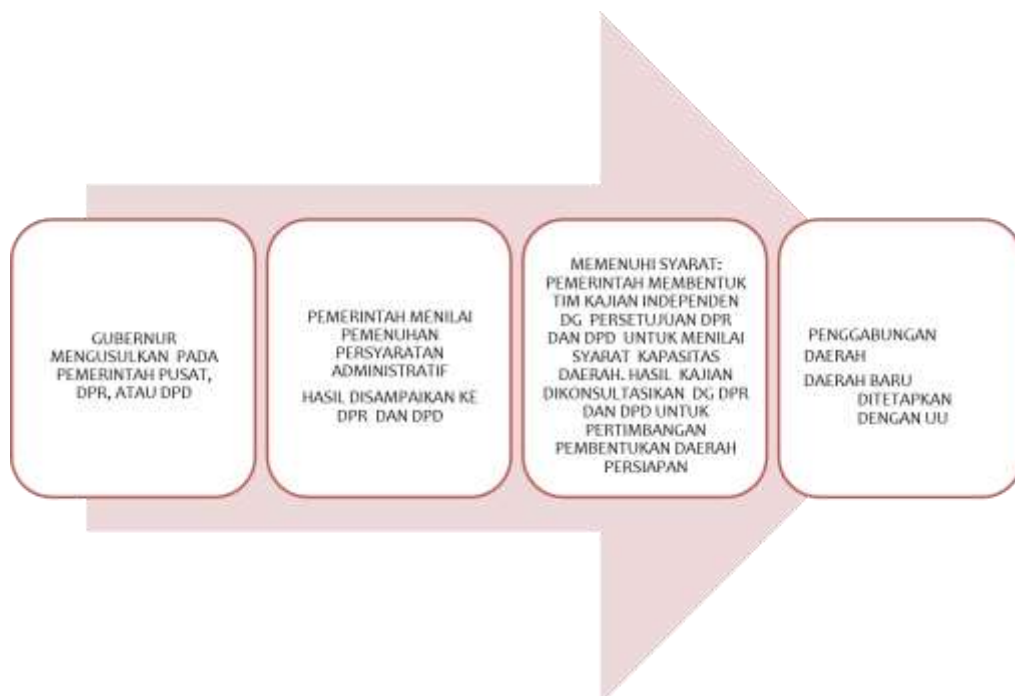
2.1.1.1. PEMEKARAN DAERAH



Gambar II.2. Skema Perubahan Status Daerah Pemekaran

2.1.1.2. PENGABUNGAN DAERAH

Dasar dilakukannya penggabungan daerah adalah adanya kesepakatan daerah yang bersangkutan atau hasil evaluasi pemerintah pusat (dalam hal daerah tidak mampu menjalankan otonomi daerah). Persyaratan dari penggabungan daerah adalah dasar kapasitas daerah dan administratif.



Gambar II.3. Proses Penggabungan Daerah



2.1.2. STRATEGI PENATAAN DAERAH

A. Langkah Strategis Pembentukan Daerah

1. Pengembangan Parameter Pembentukan Daerah

Penataan Daerah mencakup aspek Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, daya saing Daerah, dan menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk Pembentukan Daerah diperlukan adanya parameter yang terukur.

Parameter yang terukur tersebut meliputi parameter yang menjadi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas Daerah. Persyaratan dasar kewilayahan tersebut terdiri atas parameter luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal Daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Persyaratan dasar kapasitas Daerah, terdiri atas parameter geografi, demografi, keamanan, sosial, politik, adat, dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan Daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Kriteria masing-masing parameter tersebut adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Penataan Daerah.

Parameter tersebut merupakan faktor yang diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam Penataan Daerah dan dalam penyusunan Desartada, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Namun demikian, terdapat pemikiran yang mengemuka selama proses penyusunan Desartada, antara lain:

- a. Desartada harus memastikan agar Pembentukan Daerah mengatasi kesenjangan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan antar daerah;
- b. Pembagian daya dukung untuk Pembentukan Daerah baru harus dipastikan memadai untuk menjamin kelayakannya dalam jangka panjang dan tidak mematikan Daerah induk;
- c. Paradigma desentralisasi yang berkeseimbangan menghendaki agar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat memastikan adanya optimalisasi efisiensi struktural tanpa mengorbankan demokrasi lokal.

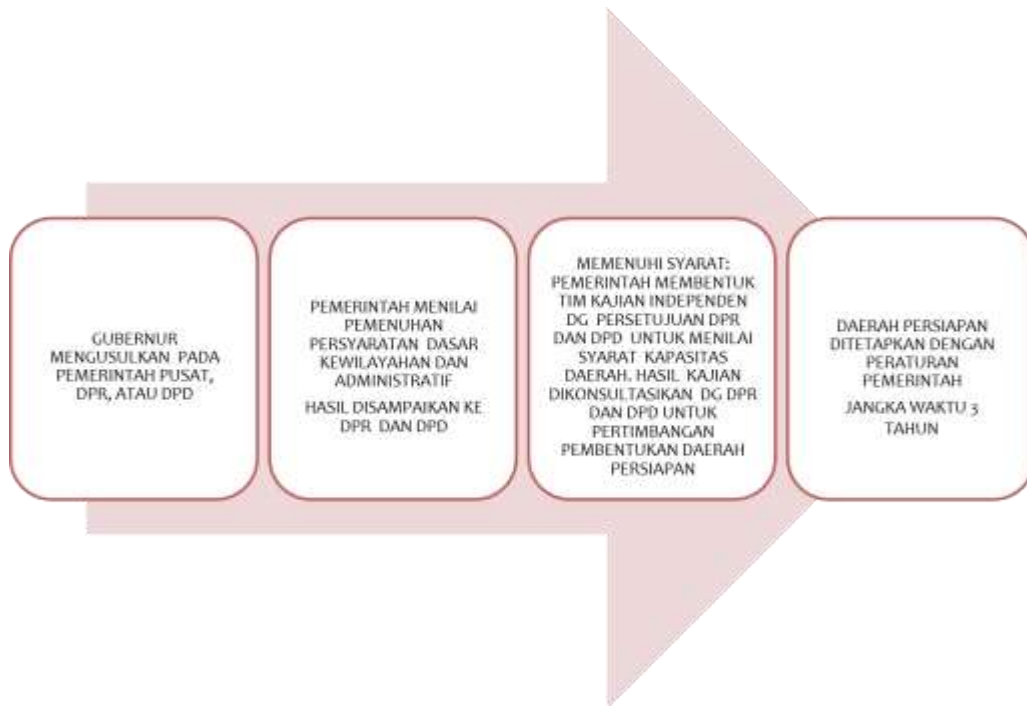


Berdasarkan parameter dan pemikiran tersebut maka Penataan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan pada Desartada harus makin mampu mengatasi kesenjangan antar Daerah. Dan selanjutnya dengan berdasarkan pada Desartada yang ditetapkan pada tingkat nasional, Pemerintahan Daerah provinsi menyusun rencana Penataan Daerah tingkat provinsi (Renpeda) yang merupakan penjabaran secara teknis dari Desartada. Dalam Renpeda, Pemerintahan Daerah provinsi dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah mana saja yang dapat dimekarkan beserta tahapan waktu pemekarannya dengan berdasarkan pada perkiraan jumlah Daerah yang telah ditetapkan dalam Desartada.

2. Penetapan Daerah Persiapan dengan Peraturan Pemerintah

Melalui strategi dasar penerapan pola pentahapan ini, Daerah baru dibentuk secara bertahap melalui pembentukan Daerah Persiapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Persiapan yang dibentuk memiliki jangka waktu 3 tahun. Khusus untuk Daerah Persiapan yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional memiliki jangka waktu paling lama 5 tahun. Tata cara pembentukan dan pengelolaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kurun waktu tersebut, sebuah calon Daerah diharapkan sudah siap untuk ditetapkan menjadi Daerah yang maju dan mandiri.

Evaluasi kapasitas sebagai Daerah akan dilakukan pada tahun ke-3. Jika dalam waktu 3 (tiga) tahun sebuah Daerah Persiapan belum siap untuk menjadi Daerah baru maka Daerah Persiapan tersebut akan dikembalikan untuk bergabung dengan Daerah induknya.



Gambar II.4. Proses Perubahan Status Daerah Awal menjadi Daerah Persiapan

3. Penyediaan Fasilitas dan Pendampingan Profesional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan selama Masa Daerah Persiapan

Fasilitas dan pendampingan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah induk, Upaya fasilitas dan pendampingan profesional ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan masing-masing Daerah Persiapan. Proses fasilitas dan pendampingan juga dimaksudkan agar Daerah Persiapan dapat benar-benar memenuhi seluruh persyaratan Pembentukan Daerah serta mampu melakukan proses transisi dengan baik.

Pemaknaan terhadap Pembentukan Daerah melalui tahapan Daerah Persiapan adalah upaya untuk menata Daerah secara lebih sistematis melalui penerapan model Pembentukan Daerah secara bertahap. Proses pengasuhan (nurturing) terhadap Daerah Persiapan yang baru dibentuk sebelum menjadi Daerah mengandung makna bahwa suatu Daerah Persiapan harus dibina oleh Daerah induknya untuk pada akhirnya menjadi suatu Daerah.

Pemberlakuan Daerah Persiapan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi sebuah Daerah Persiapan untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Persiapan tersebut meliputi pemenuhan semua aspek



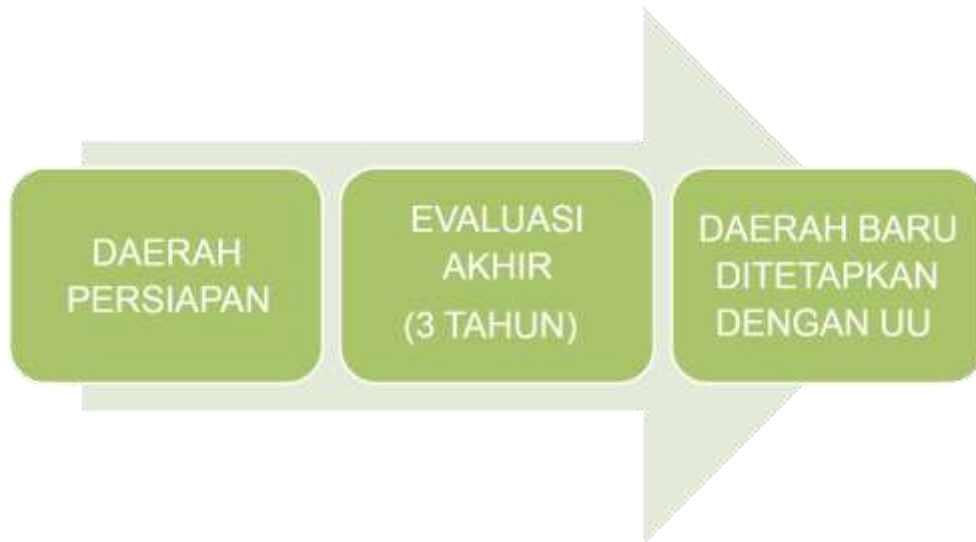
yang telah ditentukan dalam perundang-undangan untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, antara lain pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan, pengalihan personel, perlengkapan, pembiayaan, dan dokumen (P3D), pembentukan kelembagaan dan pengisian jabatan yang dapat dilakukan secara bertahap.

4. Pengembangan Sistem Evaluasi Daerah Persiapan sebagai Dasar Penetapan Perubahan Status menjadi Daerah

Evaluasi dilaksanakan setiap tahun hingga masa terakhir tahun Daerah Persiapan melalui evaluasi akhir. Hasil dari evaluasi ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan status Daerah Persiapan, apakah menjadi Daerah atau bergabung kembali sebagai bagian dari wilayah Daerah induk.

Evaluasi perkembangan Daerah Persiapan dilakukan secara berkala tahunan dan pada saat mencapai usia 3 (tiga) tahun, dievaluasi secara menyeluruh berdasarkan kriteria tertentu. Apabila dinyatakan layak maka Daerah Persiapan ditetapkan secara definitif menjadi Daerah melalui penyiapan rancangan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pembentukan Daerah dan untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Bila dinilai tidak layak maka akan dikembalikan ke Daerah induk.

Apabila persyaratan teknis dan administratif dapat dipenuhi dan secara intensif dilakukan pendampingan secara berkelanjutan, kemungkinan besar Daerah Persiapan akan mampu memenuhi syarat kelayakan untuk menjadi Daerah. Dengan demikian diharapkan langkah ini akan dapat mencegah terjadinya pemborosan, dalam arti proses yang sedang dijalankan tidak sampai tereliminasi atau dikembalikan ke Daerah induk hanya karena tidak memenuhi persyaratan.



Gambar II.5. Proses Perubahan Status Daerah Persiapan menjadi Daerah Baru

B. Rencana Strategis Penataan Daerah

Faktor atau kriteria mendasar yang harus diutamakan dalam penyusunan rencana strategis Penataan Daerah dikemukakan berikut ini.

1. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional meliputi aspek geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis Indonesia dalam peta global yang menjadi dasar dalam menentukan kebijakan untuk mencapai tujuan nasional.

Geostrategi Indonesia diwujudkan dalam konsep ketahanan nasional. Geopolitik Indonesia diwujudkan dalam konsep wawasan nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sementara strategi geoekonomi Indonesia diwujudkan melalui pembentukan kawasan-kawasan ekonomi khusus yang memiliki daya saing global dengan kombinasi keunggulan faktor ekonomi dan letak geografis dalam perdagangan internasional.

2. Penataan Daerah yang Berwawasan Global

Strategi Penataan Daerah harus menempatkan dinamika perkembangan global sebagai pertimbangan dalam pembentukan daerah dan penghapusan daerah, sehingga kedepan daerah mampu mengelola dinamika perkembangan global tersebut secara maksimal untuk



keuntungan daerah. Penataan Daerah juga harus sensitif terhadap perkembangan global. Isu-isu seperti perdagangan bebas, perubahan iklim, penyelundupan (*trafficking*), hingga terorisme, merupakan tantangan baru yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Keberhasilan dalam mengelola isu-isu tersebut sangat terkait dengan Strategi Penataan Daerah.

3. Integrasi Seluruh Aspek Perubahan Lingkungan Strategis

Penataan Daerah dilakukan secara komprehensif lintas sektoral. Seluruh aspek lingkungan strategis menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan-pilihan Penataan Daerah. Meliputi peningkatan jumlah penduduk, segregasi etnis, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan infrastruktur, mobilitas penduduk, dan bencana alam.

Terkait dengan peningkatan jumlah penduduk, Desartada harus mampu mengantisipasi berbagai dampak dan kebutuhan yang timbul dari pertambahan jumlah penduduk tersebut. Melalui penataan wilayah dan perencanaan tata ruang yang komprehensif dan lintas sektoral, diharapkan tantangan-tantangan yang terjadi akibat perubahan lingkungan strategis dapat lebih diantisipasi.

4. Keterpaduan Pembangunan Pusat dan Daerah

Keterpaduan pembangunan kabupaten dan kota dalam skala ekonomi Daerah, sistem alokasi dana perimbangan, dan kesatuan sosial-ekonomi Daerah yang memerlukan jawaban dari Penataan Daerah jangka panjang, termasuk kriteria yang dipersyaratkan dan bagaimana prosesnya Penataan Daerah agar lebih terarah dan terkendali.

5. Responsibilitas Terhadap Dinamika Politik Dalam Negeri

Isu-isu lain seperti politik dan pemerintahan dalam negeri yang masih menonjol terkait dengan kebutuhan Penataan Daerah antara lain integrasi politik, konflik sosial dan politik, kelembagaan sosial-politik, kesetaraan politik, responsivitas Pemerintah Daerah, akuntabilitas lokal, konsolidasi otonomi Daerah, kohesi sosial, dan akulturasi budaya. Selain itu, terjadi pula kurangnya sinkronisasi manajemen pemerintahan karena egoisme sektoral dan fanatisme kedaerahan yang berlebihan. Maka Penataan Daerah ke depan membutuhkan kewibawaan Pemerintah Pusat dengan cara selalu konsisten melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.



2.1.3. KONSEP PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN

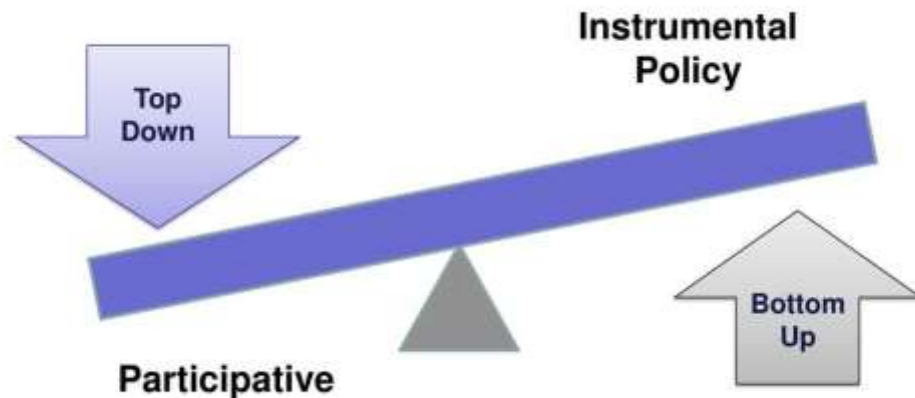
Perencanaan adalah proses yang berlanjut, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang (D. Conyers dan Hills, 1984).

Teori pembangunan wilayah, khususnya di negara berkembang, merupakan landasan konsep pembangunan melalui kegiatan pengendalian arah pembangunan. Secara umum pendekatannya dikelompokkan ke dalam 3 konsep utama, yaitu Konsep Pembangunan dari Atas, Konsep Pembangunan dari Bawah, dan Konsep Pembangunan Berbasis Komunitas (*Community Based Development*). Konsep Pembangunan dari Atas ternyata cenderung memperbesar peluang terjadinya disparitas akibat penghisapan sumberdaya pedalaman/ daerah oleh pusat. Sedangkan Konsep Pembangunan dari Bawah secara konsep cukup kuat, karena wilayah kecil mengelola sumberdayanya secara mandiri dan terintegrasi dengan wilayah lainnya yang memungkinkan wilayah lokal membangun dirinya sendiri. Namun dalam kecenderungan perekonomian dunia yang semakin tanpa batas menyebabkan konsep yang ditawarkan bersifat coba-coba/belum tentu keberhasilannya.

Ginjar Kartasmita dalam buku Administrasi Pembangunan (2008) mengemukakan jenis perencanaan dilihat dari prosesnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *top-down* dan perencanaan *bottom-up*. Penataan Kawasan merupakan salah satu upaya rekayasa sosial yang diselenggarakan di suatu wilayah dan dilakukan bersamaan dengan upaya menciptakan suatu sistem yang komprehensif terkait aktivitas yang berlangsung di kawasan, dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Hal ini berarti yang diharapkan dari Penataan Kawasan adalah hadirnya suatu tatanan baru yang dapat memberikan harapan kualitas kehidupan yang lebih meningkat.



Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up



Gambar II.6. Pendekatan Perencanaan Pembangunan

1. Perencanaan Pembangunan *Bottom Up*

Proses perencanaan atau *planning* adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehubungan dengan pokok pertanyaan: apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajementi maupun usaha-usahanya. Proses perencanaan dapat dilaksanakan menyeluruh, misalnya dalam perencanaan korporat, perencanaan strategis, atau perencanaan jangka panjang. Bisa juga dilakukan per divisi atau unit bisnis strategis menjadi rencana divisi atau anak perusahaan tertentu di dalam suatu korporasi yang lebih besar. Bisa juga dilakukan per fungsi baik di dalam korporasi, di dalam divisi maupun unit bisnis individual, misalnya rencana fungsi pemasaran, rencana fungsi keuangan, rencana fungsi produksi dan distribusi, dan rencana fungsi personalia. Bagaimana pun lingkup perencanaan yang dilakukan, pokok pertanyaan yang dipikirkan sama saja: apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa. Perbedaannya menyangkut metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.

Salah satu proses atau rencana perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan rencana pembangunan adalah dengan menggunakan



sistem pembangunan yang bersifat *Bottom Up*. *Bottom Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, *bottom up planning* atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.

Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kelemahannya memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk perencanaan. Diperlukan pengembangan budaya perusahaan yang sesuai.

Maka dapat disimpulkan, pendekatan perencanaan pembangunan *Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, *bottom-up planning* atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.

2. Perencanaan Pembangunan Top Down

Perencanaan dari atas ke bawah (*Top down*) adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di "bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada di "atas". Pendekatan perencanaan sektoral sering ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, dikarenakan target yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasional tersebut. Pada tahap awal pembangunan, pendekatan perencanaan ini lebih dominan, terutama karena masih terbatasnya sumber daya pembangunan yang tersedia.

Pendekatan *top-down planning*, adalah pendekatan pembangunan di mana penentuan keputusan tidak menampung semua aspirasi elemen di kelompok, tetapi hanya mementingkan keputusan bagian tertentu dalam kelompok. *Top-down planning* merupakan model perencanaan yang



dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait dengan pemerintahan, perencanaan *top-down planning* atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja

3. Perbedaan Mendasar Dari Perencanaan Bottom Up dan Top Down

Dalam suatu proses perencanaan pembangunan dibutuhkan suatu pendekatan perencanaan yang digunakan sebagai pengambil keputusan serta menunjukkan bagaimana proses perencanaan tersebut dilakukan hingga muncul suatu pengambilan keputusan pada produk rencana. Pendekatan perencanaan yang dimaksud adalah pendekatan secara *top-down* atau *bottom-up*.

Secara konseptual, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari kedua tipe perencanaan pembangunan ini, seperti berikut:

Tabel II.1. Tabel Perbedaan *Top Down* dan *Bottom Up*

<i>Top Down</i>	<i>Bottom Up</i>
Top down planning adalah model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait dengan pemerintahan, perencanaan top down planning atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja.	Bottom Up Planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, bottom up planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.
Dari atas ke bawah (top-down). Pendekatan ini mendesak bagian bawah bekerja sesuai kemauan atasan di dalam perencanaan tanpa memedulikan situasi nyata bagian bawah. Waktu perencanaan bisa sangat pendek, tetapi ada banyak hal yang terlewatkan karena sempitnya forum informasi dan komunikasi. Biasanya	Dari bawah ke atas (bottom-up). Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kelemahannya

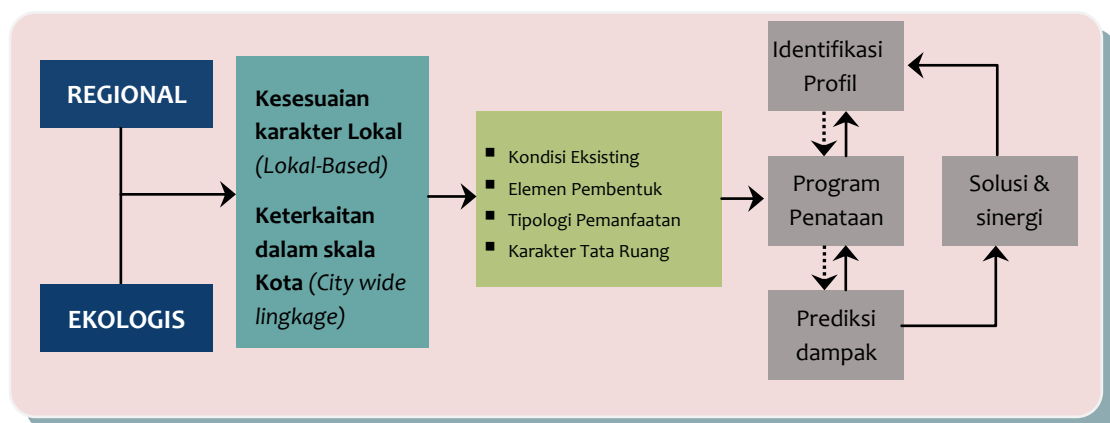
<i>Top Down</i>	<i>Bottom Up</i>
menimbulkan kepatuhan yang terpaksa namun untuk sementara waktu efektif.	memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk perencanaan. Diperlukan pengembangan budaya perusahaan yang sesuai.

Sumber: Pumariksa, 2014

2.1.4. INTEGRATED *ECOLOGICAL LINKAGE* (KETERKAITAN EKOLOGIS YANG TERINTEGRASI)

Pendekatan dalam konteks keterkaitan ekologis yang terintegrasi, salah satunya adalah regionalisme ekologis. Karakter yang digunakan sebagai pendekatan pemikiran dalam **upaya harmonisasi pembangunan dan konservasi lingkungan**. Pada awalnya, aspek lokal harus dianggap sebagai suatu ekosistem dengan daya dukung yang harus dipatuhi serta sebagai karakteristik ruang beserta pemanfaatannya yang harus dipertimbangkan program penataannya yang diwujudkan dalam bentuk hasil rancangan ruang terbuka yang memenuhi kriteria biologis, klimatologis, energi dan *cultural*.

Pendekatan regionalisme ekologis digunakan sebagai jalur pemikiran dalam upaya pencarian identitas lokal, ekologis dan kultural wilayah. Dari sistem tata ruang wilayah secara garis besar dapat dikenali adanya elemen pembentuk dalam kategori elemen fisik yang berupa lingkungan alam dan lingkungan binaan (*built environment*) dan elemen non fisik yang berupa kegiatan sosial, budaya dan ekonomi.



Gambar II.7. Gambar Skema Regionalisme Ekologis

Sumber: Prayitno dalam Jurnal Manusia Dan Lingkungan; p:32-41

2.1.5. KERANGKA PIKIR DAN PARAMETER PENATAAN DAERAH

A. Kerangka Pikir Penataan Daerah

Kerangka pikir penataan daerah otonom dibangun dengan mempertimbangkan tiga dimensi dasar untuk menuju daerah otonom yang maju-mandiri. **Pertama**, dimensi geografi, bersifat relatif tetap, mencakup luas dan karakteristik (kualitas) wilayahnya. **Kedua**, dimensi demografi, bersifat relatif dinamis, yakni manusia yang menjadi subyek dan obyek dari daerah otonom yang mencakup jumlah dan kualitasnya. **Ketiga**, dimensi sistem, yang bersifat sangat dinamis, terdiri dari sistem pertahanan dan keamanan, sistem sosial politik dan budaya, sistem sosial ekonomi, sistem keuangan, sistem administrasi publik, serta sistem manajemen pemerintahan.



Gambar II.8. Dimensi Dasar Menuju Daerah Otonom

1. Dimensi Geografi

Dimensi ini menggambarkan bahwa setiap daerah otonom berdiri di atas satu wilayah geografi tertentu yang memenuhi syarat, baik luasan pada saat dibentuk maupun proyeksinya di masa depan untuk menampung dan mendukung aktivitas manusia yang ada di atasnya. Selain itu, dilihat juga kualitasnya, yakni karakteristik geografi yang memungkinkan satu daerah otonom mengembangkan kemampuannya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, diperlukan **syarat minimal tentang luas dan karakteristik geografi**



untuk membentuk sebuah daerah otonom provinsi, kabupaten, maupun kota. Dimensi geografi ini juga mempertimbangkan kekhususan suatu daerah jika dilihat dari aspek geostrategis wilayahnya, seperti wilayah kepulauan dan kawasan yang memiliki perbatasan laut atau darat dengan negara lain.

2. Dimensi Demografi

Dimensi demografi ini menunjukkan perlunya syarat minimal jumlah serta karakteristik tertentu penduduk dari suatu daerah otonom agar yang bersangkutan dapat berkembang secara lestari. Syarat minimal tersebut berlaku untuk daerah otonom baru yang akan dibentuk, baik daerah otonom provinsi, kabupaten, kota, maupun bagi daerah otonom yang sudah ada.

3. Dimensi Sistem

Dimensi sistem ini bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan situasi lingkungan internal dan eksternal. Dimensi sistem yang dikaji adalah sebagai berikut.

a. Sistem Pertahanan dan Keamanan

Mempertimbangkan aspek sistem pertahanan dan keamanan dalam penataan daerah dimaksudkan agar pembentukan daerah otonom baru tidak membahayakan sistem pertahanan dan keamanan negara.

b. Sistem Ekonomi

Mempertimbangkan sistem sosial ekonomi dimaksudkan agar penataan daerah mengandung semangat pengembangan yang mencakup komponen input berupa sumber daya ekonomi yang meliputi kekayaan alam, lokasi strategis, budaya, serta SDM berkualitas yang mampu mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan nyata. Dengan demikian, sebuah DOB selain dapat menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, juga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakatnya.



c. Sistem Keuangan

Mempertimbangkan aspek sistem keuangan dimaksudkan agar penataan daerah memperhatikan faktor-faktor yang mencakup kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan potensi sumber-sumber keuangan yang memungkinkan daerah, baik yang akan dibentuk maupun yang sudah ada, memiliki kemandirian dalam bidang keuangan.

d. Sistem Sosial Politik dan Budaya

Mempertimbangkan aspek sistem sosial politik dalam penataan daerah harus dapat menggambarkan nilai-nilai dan kenyataan sosial politik dan budaya yang ada pada masing-masing daerah dengan tetap menjaga pluralisme dan semangat multikulturalisme.

e. Sistem Administrasi Publik

Mempertimbangkan aspek sistem administrasi publik dimaksudkan agar penataan daerah memperhitungkan pengembangan hal-hal yang mencakup organisasi dan manajemen dari suatu negara, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

f. Sistem Manajemen Pemerintahan

Mempertimbangkan aspek sistem manajemen pemerintahan dimaksudkan agar penataan daerah memperhatikan hal-hal yang lebih bersifat operasional dan terukur, mencakup prinsip dan fungsi manajemen dalam penataan daerah.

B. Parameter Penataan Daerah

Parameter-parameter utama yang digunakan sebagai penjabaran dari ketiga dimensi kerangka pikir di atas adalah sebagai berikut:

1. Parameter Geografi

Menyediakan dasar pertimbangan luas wilayah (cakupan dan batas), dengan faktor yang dominan di dalam aspek geografi adalah hidrografi, perairan kepulauan, tutupan lahan, lingkungan, *geo-hazards*, dan peta dasar.



2. Parameter Demografi

Dimensi ini menyediakan dasar pertimbangan pembentukan DOB dengan memperhitungkan faktor kependudukan dalam penataan daerah di Jawa Barat sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk

Menetapkan batasan jumlah penduduk minimal serta kualitas SDM yang memungkinkan daerah otonom bersangkutan dapat berkembang secara mandiri.

b. Sumber Daya Manusia

Memberikan penilaian kepemilikan SDM yang difokuskan pada penduduk berusia 20-54 tahun dan pemenuhan kebutuhan birokrasi sekurang-kurangnya tingkatan diploma. Sebagian besar kabupaten/kota (55%) memiliki kurang dari 5% penduduk berusia 20-54 tahun berpendidikan tinggi.

c. Kuantitas dan Kualitas SDM

Menetapkan jumlah dan mutu SDM yang ditentukan oleh kebutuhan daerah bersangkutan, yang dijadikan pertimbangan kelayakan suatu daerah untuk mekar, yaitu wilayah yang antara lain memiliki sumber daya yang memadai untuk dapat memberikan pelayanan sosial minimum pada rakyatnya.

d. Distribusi Penduduk

Menjaga keseimbangan distribusi penduduk dari provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat.

e. Kesenjangan Penduduk.

Mempertimbangkan keserasian penduduk antar kawasan, yang dalam jangka panjang akan merenggang.

3. Parameter Sistem

Dimensi ini menyediakan dasar pertimbangan pembentukan DOB dengan memperhitungkan faktor-faktor sistem dalam penataan daerah di Kabupaten Cianjur yaitu:

a. Sistem Pertahanan dan Keamanan

- 1) Menjamin pembentukan daerah otonom berada dalam koridor NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 beserta kepentingan



nasional, baik yang bersifat abadi maupun yang bersifat dinamis, yang memiliki jenjang pemerintahan dua jenjang, pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah.

- 2) Mempertimbangkan wawasan-wawasan dasar dan beberapa asumsi yang melatarbelakangi pembentukan daerah otonom (antara lain, geopolitik, dan geostrategis) di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional.
- 3) Mempertimbangkan pembagian teritorial pemerintahan daerah, berdasarkan latar belakang: (i) sejarah (bekas kerajaan besar dan kecil); (ii) fungsional (daerah kota dan kabupaten); (iii) ekonomis (terutama untuk daerah otonom baru); (iv) administratif (untuk daerah otonom baru, terutama untuk memperkokoh rentang kendali pemerintahan); (v) etnis (kebhinnekaan dan keharmonisan); dan juga gabungan dari beberapa di antaranya.
- 4) Memperhitungkan dan menyiapkan kebutuhan kelengkapan perangkat pertahanan dan keamanan dalam pembentukan daerah otonom.
- 5) Menyeimbangkan pola penataan wilayah yang tertuang dalam bentuk provinsi, kabupaten/kota, dengan penataan wilayah kompartemen strategis.
- 6) Mensinergikan antara tata ruang pemda (pendekatan kesejahteraan) dan tata ruang pertahanan (pendekatan keamanan), khususnya untuk wilayah yang termasuk kawasan strategis pertahanan dan keamanan.

b. Sistem Ekonomi

Mempertajam sasaran kesejahteraan rakyat dengan ukuran peningkatan IPM, yang merupakan indeks gabungan dari aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, yaitu:

- 1) Kriteria kelayakan pemekaran daerah dari sudut pandang sosioekonomi yang harus dipenuhi setidaknya adalah prediksi pertumbuhan ekonomi daerah $\geq 5\%$ untuk menjaga agar pemekaran daerah tidak menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi pada daerah otonom baru.
- 2) Memiliki potensi SDA yang cukup untuk dijadikan modal dasar bagi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan



kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut dikaji secara mendalam melalui interpretasi secara ilmiah dari citra satelit untuk memastikan bahwa potensi SDA tersebut benar-benar nyata.

c. Sistem Keuangan

- 1) Memiliki kapasitas fiskal yang memadai sebanding dengan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakannya. Kapasitas fiskal mencakup penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- 2) Harmonisasi peraturan perundang-undangan (regulasi) dan kebijakan antara pusat dan daerah, penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan pemerintahan, dan penyempurnaan regulasi dan kebijakan keuangan daerah untuk keadilan (keseimbangan vertikal) serta penguatan kapasitas keuangan daerah.
- 3) Mengalihkan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP) ke Dana Alokasi Khusus (DAK) disertai peningkatan pemerataan dalam distribusi keuangan antardaerah (keseimbangan horizontal), pemberdayaan PAD, dan alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah.
- 4) Peningkatan dan pemberian sistem insentif kerjasama antardaerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta.
- 5) Perbaikan pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme maupun efisiensi, dan efektifitas pengeluaran pemerintah daerah.
- 6) Penegakan hukum dalam pengawasan keuangan di daerah dan peningkatan pengawasan melalui pembatalan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah.
- 7) Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek keuangan dan penegakan terhadap regulasi dan kebijakan penataan daerah (yang saat ini adalah PP No. 78 Tahun 2007).
- 8) Pembatasan jumlah daerah otonom, pemberian sistem insentif bagi penggabungan daerah, dan penentuan batas minimal Penerimaan



Daerah Sendiri (PDS) untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan penyusunan Kerangka Anggaran Jangka Menengah Daerah induk maupun daerah hasil pemekarannya.

d. Sistem Sosial Politik dan Budaya

- 1) Memantapkan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, penjalinan kohesivitas sosial di tengah-tengah elemen daerah, serta akulturasi budaya masyarakat daerah.
- 2) Menghindari penataan daerah yang menimbulkan potensi terjadinya konflik antaretnis, agama, ras, dan kelompok kepentingan dan mendorong semakin kuatnya kelekatan sosial antar berbagai perbedaan yang ada di daerah.
- 3) Mencegah penataan daerah yang menyebabkan hilangnya suatu budaya lokal dan dominasi satu budaya dengan budaya lainnya (yang diharapkan justru adalah pengembangan dan penerimaan budaya atas budaya lainnya).
- 4) Memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan pengukuran kondisi lokalitas.

e. Sistem Administrasi Publik

- 1) Menentukan kriteria dan proses penataan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dasar pembentukan daerah otonom yang terdiri atas efisiensi dan efektivitas administrasi, demokrasi pemerintahan, dan ketahanan nasional. Efisiensi dan efektivitas administrasi, yang mencakup daya saing daerah (kemampuan daerah mengembangkan wilayah), skala ekonomi, jumlah beban daerah (jumlah urusan dan kewenangan), serta *span of control*, aksesibilitas, dan potensi wilayah. Sedangkan demokrasi pemerintahan mencakup aspirasi masyarakat, kontrol masyarakat, dan keterwakilan. Selanjutnya, ketahanan nasional mencakup geopolitik dan geostrategis.
- 2) Memperhatikan dan mempertimbangkan usia pemerintahan (untuk kabupaten/kota telah tujuh tahun) dan kondisi obyektif luas wilayah daerah otonom (luas wilayah yang dinilai layak didasarkan pada luas rata-rata yang bersifat regional).



- 3) Mempertimbangkan rentang kendali kemampuan pelaksanaan peran provinsi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemerintahan kabupaten/kota yang berbeda terutama atas pertimbangan aksesibilitas. Dengan penggunaan teknologi informatika dan komunikasi rentang kendali pemerintahan dapat diperluas.
- 4) Mengembangkan teknologi informatika dan komunikasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

f. Sistem Manajemen Pemerintahan

- 1) Pengelolaan personil mencakup jumlah dan kualitas yang dikelola dengan baik sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal.
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 3) Pengelolaan aset dan peralatan pemerintahan yang mencukupi dan pengadministrasian yang baik guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- 4) Pengelolaan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pengelolaan data dan dokumen secara berkesinambungan yang dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat.

2.1.6. PERENCANAAN WILAYAH

Kegiatan penyusunan tata ruang baik skala makro hingga mikro termasuk dalam kegiatan perencanaan. Definisi yang sangat sederhana dari pengertian perencanaan adalah: menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tingkat yang lebih kompleks, definisi perencanaan adalah: menetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah memperlihatkan faktor-faktor pembatas dalam mencapai tujuan tersebut, memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kondisi yang sangat kompleks, definisi perencanaan adalah: mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan



perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat tercapai serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Terdapat 4 elemen dasar perencanaan, yaitu:

1. Merencanakan berarti memilih.
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.
4. Perencanaan berorientasi ke masa depan.



Gambar II.9. Elemen Dasar Perencanaan

Perencanaan wilayah di Indonesia setidaknya memerlukan unsur-unsur yang urutan atau langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk dapat menggambarkan kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi, mungkin diperlukan kegiatan pengumpulan data terlebih dahulu, baik data sekunder maupun primer.
2. Tetapkan visi, misi dan tujuan umum. Visi, misi dan tujuan umum haruslah merupakan kesepakatan bersama sejak awal.
3. Identifikasi pembatasan dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang.



4. Proyeksikan sebagai variabel yang terkait, baik yang bersifat controllable (dapat dikendalikan) maupun non-controlable (di luar jangkauan pengendalian pihak perencana).
 5. Tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur.
 6. Mencari dan mengevaluasi sebagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam mencari alternatif perlu diperhatikan keterbatasan dana dan faktor produksi yang tersedia.
 7. Memilih alternatif yang terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan.
 8. Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
 9. Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- a. Banyak di antara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbarui.
 - b. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia pada zaman peradaban nenek moyang kita masih sangat sederhana.
 - c. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali.
 - d. Lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya.
 - e. Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian dari masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut.
 - f. Potensi wilayah berupa pemberian alam maupun hasil karya manusia di masa lalu adalah aset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam jangka panjang yang bersifat langgeng.

Sedangkan tujuan perencanaan sendiri adalah:

1. Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang.
2. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan dimana lokasi kegiatan itu diijinkan.

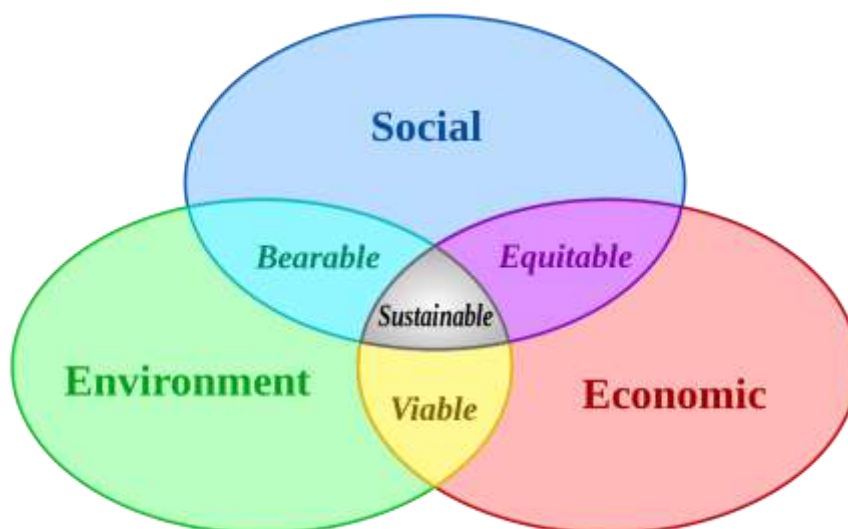


3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah dalam mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan.
4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan prasarana dan sarana.
5. Dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat.

2.1.7. PENDEKATAN PEMBERDAYAAN SOSIO-EKONOMI-BUDAYA

1. Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi adalah kesediaan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam program kegiatan pembangunan tertentu, baik karena dorongan dari dalam maupun dari luar dirinya, yang keikutsertaannya diwujudkan dalam bentuk kontribusi: tenaga, pikiran ataupun materi. Keikutsertaan masyarakat bisa dikarenakan diajak, dipersuasi (dipengaruhi), diperintah, atau dipaksa pamong. Pelaku yang satu cenderung berbuat lebih dari pelaku yang lain, artinya tanpa harus ada kesetaraan. Partisipasi dapat dikategorikan ke dalam strategi pembangunan.



Gambar II.10. Konsep *Social Sustainability*

Sumber: Researchgate.net (diakses pada 2 Juli 2021 pukul 11.03 WIB)

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah merupakan sesuatu yang sangat mendesak untuk mencapai tujuan:



menciptakan rasa tanggung jawab, mendapatkan kesepakatan secara bersama-sama secara musyawarah, dan meningkatkan rasa percaya diri pada masyarakat. 5 (lima) azas yang berlaku dalam upaya-upaya untuk mencapai keberhasilan pada proses partisipasi masyarakat, yaitu:

a) Azas Solidaritas. Penetapan asas solidaritas merupakan hal yang sangat penting karena melalui asas ini akan diperoleh keterpaduan fokus kegiatan pembangunan dari berbagai pelaku (aktor pembangunan) menjadi jelas, sehingga untuk siapa perencanaan dilakukan dapat dijawab dengan tegas. Solidaritas ini tidak saja dituntut antar anggota kelompok masyarakat saja, melainkan terkait dengan kelompok-kelompok yang lainnya.

b) Azas Partisipasi. Asas solidaritas harus dijalankan secara aktif dan bukan hanya sekedar menunggu (pasif). Dengan demikian setiap pelaku pembangunan terkait haruslah bertindak secara aktif sehingga terciptalah pola pembangunan secara partisipatif, dimana setiap pelaku dapat bertindak secara aktif berlandaskan suatu tekad yang telah disepakati bersama yaitu melakukan upaya-upaya dalam proses pelaksanaan pembangunan.

c) Azas Kemitraan. Dalam kegiatan pembangunan partisipatif antar berbagai pelaku pembangunan, dimana masyarakat tetap dalam posisi pelaku utama/penentu, maka peran pelaku-pelaku pembangunan lain haruslah dilakukan mengikuti asas kemitraan artinya interaksi yang terjadi adalah interaksi antar pihak yang setara meskipun berbeda fungsi sehingga terbentuklah kerabat kerja pembangunan seperti bentuk jalinan kerjasama dalam bentuk satu tubuh yang terdiri dari tangan, kaki, badan, kepala dan sebagainya.

d) Azas Memampukan. Pembangunan secara partisipatif menuntut masyarakat menjadi tokoh sentral dan pelaku penentu, untuk itu kemampuan kelompok masyarakat yang terkait perlu ditingkatkan baik dari segi kemampuan manusianya (kesadaran, wawasan, pengetahuan, ketrampilan) maupun sumberdaya yang dikuasainya. Untuk itu diperlukan kontribusi dari pelaku-pelaku pembangunan lainnya. Oleh sebab itu, tidak semua sumberdaya dimiliki atau dikuasai atau ada di tangan masyarakat seperti misalnya perizinan, teknologi, dana, lahan dan peluang-peluang/ kemudahan, maka peran pelaku-pelaku



pembangunan lainnya masih sangat diharapkan sebagai 'enabler' (penyedia) sehingga apa yang tidak mungkin dicapai dapat tercapai.

e) Azas Pemerataan. Asas pemerataan menekankan pada pemerataan kesempatan dalam memanfaatkan segenap peluang dalam proses pembangunan bagi semua komponen warga masyarakat.

2. Bentuk Partisipasi

Perwujudan bentuk partisipasi masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Partisipasi tenaga kerja, yaitu masyarakat memberikan tenaga kerja setempat bagi pembangunan kawasan.
- b) Partisipasi sebagai inisiator program, yaitu masyarakat berinisiatif awal mengajukan adanya kemungkinan penataan bangunan dan lingkungan setempat.
- c) Partisipasi berbagi biaya, yaitu masyarakat berbagi tanggung jawab biaya pada kegiatan penataan kawasan.

Partisipasi pengambilan keputusan pada seluruh proses, yaitu proses pelibatan masyarakat untuk pengambilan keputusan sejak awal proyek, sehingga hasilnya relevan dengan kebutuhan lokal.

2.1.8. PENGEMBANGAN BERBASIS MASYARAKAT

Pengelolaan berbasis masyarakat yang bisa disebut juga *Community-Based Management* (CBM) menurut Nikijuluw 1994 dalam Zamani dan Darmawan 2000, adalah salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam, yang dalam hal ini mengacu sektor perikanan, yang bertumpu pada pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Carter 1996 dalam Zamani dan Darmawan 2000, memberikan definisi pengelolaan berbasis masyarakat sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah berada ditangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut.

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan



terhadap sumber daya yang dimilikinya. Artinya, masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat adalah pendekatan pengelolaan yang melibatkan kerja sama antara masyarakat setempat dan pemerintah dalam bentuk pengelolaan secara bersama dimana masyarakat berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan sampai pada pelaksanaannya. Pemikiran ini sangat didukung oleh tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir di Indonesia antara lain:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.
2. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya alam di wilayah pesisir dan lautan.
3. Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan.
4. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan.

Arnstein (1969) menjelaskan partisipasi sebagai arti di mana warga negara dapat memengaruhi perubahan sosial penting, yang dapat membuat mereka berbagi manfaat dari masyarakat atas. Dia mencirikan delapan anak tangga yang meliputi: manipulasi, terapi, memberi tahu, konsultasi, penentruman, kerjasama, pelimpahan kekuasaan, dan kontrol warga negara. Pada hakikatnya partisipasi masyarakat di bidang pembangunan mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses tersebut, mengusahakan penyusunan program-program pembangunan melalui mekanisme dari bawah ke atas (*bottom up*), dengan pendekatan memperlakukan manusia sebagai subyek dan bukan obyek pembangunan.



Gambar II.11. Skema Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pemberdayaan senantiasa berkaitan dengan penggalan dan pengembangan potensi masyarakat, yang menurut Kartasasmita bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Oleh karena itu ia mengatakan bahwa pemberdayaan harus terarah (*targeted*), ditujukan langsung kepada yang memerlukan (berbasis kebutuhan), langsung mengikutsertakan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program (partisipatif), menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Di sisi lain upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi yaitu:

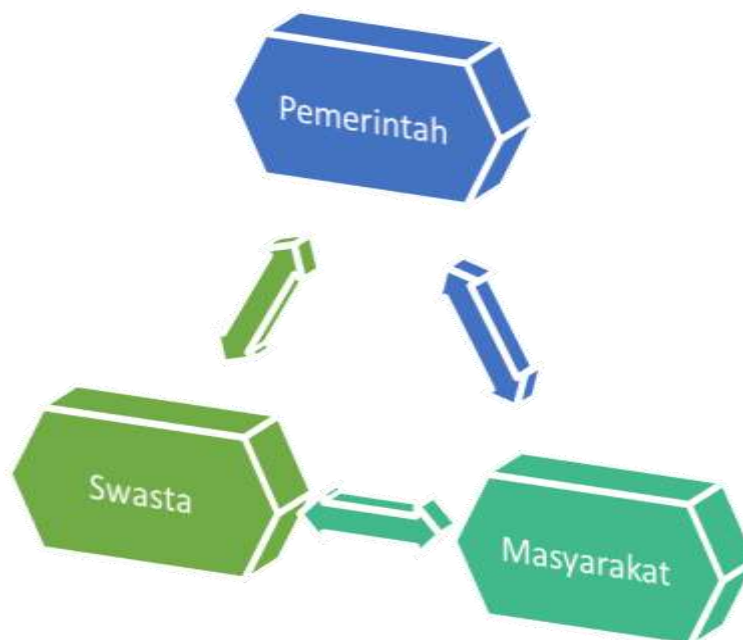
- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka mewujudkan hal ini diperlukan langkah-langkah positif, meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta membuka akses ke berbagai



peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan idealnya harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Selain itu berkaitan dengan otonomi daerah, pemerintah berkepentingan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan pedoman-pedoman teknis yang berlaku secara umum, termasuk dalam hal ini pada bidang penataan ruang terkait sektor perikanan. Kewenangan tersebut akan dilaksanakan melalui penyelenggaraan tugas-tugas pembinaan dan bimbingan kepada para pelaku pembangunan (instansi terkait, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat) sehingga terbentuk kerjasama saling dukung antara ketiga pelaku pembangunan tersebut.



Gambar II.12. Model Hubungan antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

2.1.9. PENDEKATAN *PARTICIPATORY*

Pendekatan ini menekankan adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam merencanakan pembangunan (penyelesaian masalah) mulai dari pengenalan wilayah, pengidentifikasian masalah sampai pada penentuan skala prioritas. Secara garis besar pendekatan partisipatif mengandung makna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara



mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi.

Guna memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu pendekatan dan proses partisipatif, maka dirumuskan mekanisme pembangunan secara partisipatif. Mekanisme umum yang sering digunakan dalam pendekatan ini yaitu:

1. Persiapan sosial
2. Survey (permasalahan umum, potensi, dan kendala)
3. Kesepakatan prioritas permasalahan yang akan ditangani
4. Kesepakatan penggalangan dan alokasi sumber daya
5. Kesepakatan rencana
6. Proses implementasi
7. Pemanfaatan hasil pembangunan
8. Evaluasi



Gambar II.13. Mekanisme Umum Pendekatan Partisipatif

Tiga alasan utama mengapa perencanaan partisipatif dibutuhkan, yaitu (Conyers, 1991, 154-155):

1. Alasan pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
3. Alasan ketiga adalah karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.



Gambar II.14. Ilustrasi Partisipasi Masyarakat

Sumber: gampongcotbaroh.desa.id (Diakses pada 2 Juli 2021 pukul 11.11 WIB)

2.1.10. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang. Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generasi ke generasi. Dilihat dari pengertian lainnya, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem.



Gambar II.15. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

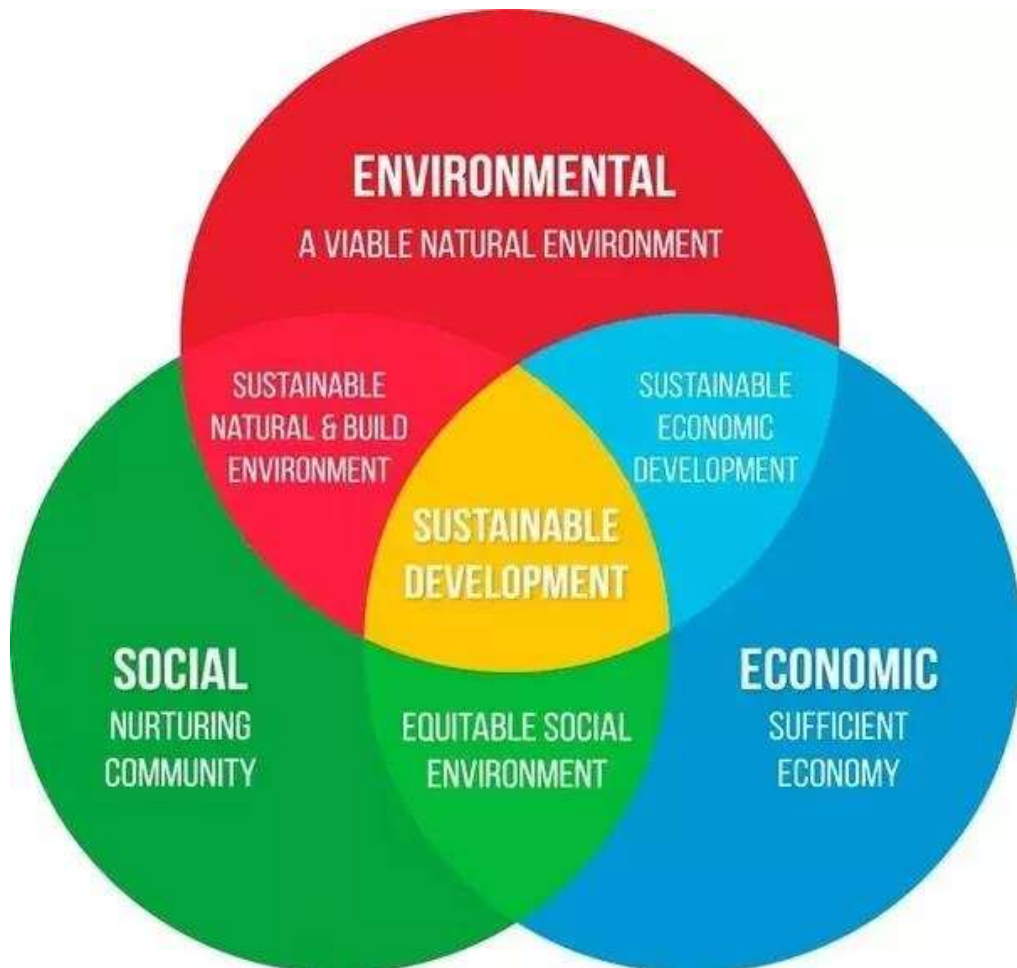
Pembangunan yang berkelanjutan harus mencerminkan tindakan yang mampu melestarikan lingkungan alamnya. Pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan.
3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkesinambungan.
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber alam bagi kehidupan secara berkesinambungan.
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memerhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1990), menggariskan kebijakan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan sebagai berikut:



1. Menggiatkan kembali pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, yang mempunyai kaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Indikator untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Negara yang sedang berkembang pertumbuhan minimum dari pendapatan nasional adalah 5 % per tahun.
2. Mengubah kualitas pertumbuhan yang berhubungan dengan tindakan pelestarian sumber daya alam, perbaikan pemerataan pendapatan, dan ketahanan terhadap berbagai krisis ekonomi.
3. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, antara lain pangan, papan, sandang, energi, air, dan sanitasi harus dapat memenuhi standar minimum bagi golongan ekonomi lemah.
4. Memastikan tercapainya jumlah penduduk yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan adalah penduduk yang stabil dan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ($> 2\%$ per tahun), seperti yang terjadi di negara-negara sedang berkembang perlu ada penurunan penduduk menuju tingkat pertumbuhan 0% (*zero population growth*).
5. Menjaga kelestarian dan meningkatkan sumber daya dengan penciptaan dan perluasan lapangan kerja, pelestarian, dan penggunaan energi secara efisien, pencegahan pencemaran (air dan udara) sedini mungkin.
6. Berorientasi pada teknologi dalam pengelolaan resiko, antara lain penciptaan inovasi teknologi dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
7. Menggabungkan kepentingan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, kebijakan efisiensi penggunaan energi dengan biaya produksi yang minimal dapat menggunakan energi semaksimal mungkin.



Gambar II.16. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (2)

Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut Kementrian Lingkungan Hidup (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu :

1. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*
2. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya
3. Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.



Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
2. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.
4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

2.2. METODOLOGI

2.2.1 METODE PENGUMPULAN DATA

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang diperkuat dengan pendekatan kualitatif. Secara konkret metode pengumpulan data tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. *Desk study* dan *Literature Review* (Kajian Kepustakaan)

Secara proses, studi diawali dengan melakukan kajian berbagai pustaka yang berkaitan dengan Penataan Daerah.



Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk pengkayaan data dan informasi untuk mendukung kelengkapan sumber data dan kedalaman analisis. Kegiatan pengumpulan data sekunder tersebut antara lain mencakup:

a. Mencari literatur (artikel, buku dan laporan riset yang belum diterbitkan mengenai Penataan Daerah di Jawa Barat atau wilayah lainnya)

Kajian kepustakaan yang dilakukan yaitu mempelajari lebih dalam mengenai analisis potensi daerah, penataan daerah khususnya pemekaran wilayah, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum wilayah, dan studi mengenai pembangunan wilayah berkelanjutan.

b. Mencari data di internet

Pencarian data di internet mengenai Penataan Daerah di Jawa Barat dimana beberapa daerah di Jawa Barat sudah direncanakan untuk dilakukan pemekaran, seperti misalnya pada berita elektronik pasundanekspres.co tanggal 27 Agustus 2019 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dorong pemekaran 5 wilayah di Jawa Barat. Kelima wilayah tersebut diantaranya adalah: pembentukan DOB Kabupaten Cianjur Selatan dan Kota Cipanas pemekaran Kabupaten induk Kabupaten Cianjur, pembentukan DOB Kabupaten Bekasi Utara pemekaran induk Kabupaten Bekasi, pembentukan DOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan pemekaran induk Kabupaten Tasikmalaya, pembentukan DOB Kota Cikampek pemekaran induk Kabupaten Karawang, dan pembentukan DOB Kabupaten Bandung Timur pemekaran induk Kabupaten Bandung. Untuk mendapatkan referensi lebih lanjut dapat dicari melalui mesin pencari google ataupun yang lainnya.

2. Pengamatan Langsung (Survey Lapangan)

Merupakan metode atau tindakan yang dilakukan setelah kita berada di lapangan pada wilayah kajian melalui pengamatan dan pendokumentasian langsung terhadap kondisi di lapangan. Pengamatan langsung di lapangan misalnya dengan melakukan triangulasi data sekunder penggunaan lahan dengan kondisi eksisting penggunaan lahan di lapangan; pendokumentasian adat dan tradisi masyarakat; melakukan pengamatan terhadap kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum; pendokumentasian kekayaan alam, mengamati potensi ekonomi misalnya keberadaan pusat-pusat perbelanjaan; dan lain sebagainya. Hasil dari



perolehan data tersebut disimpan sebagai acuan untuk membuat laporan kondisi eksisting kawasan kajian.



Gambar II.17. Tradisi Kuda Kosong di Cianjur



Gambar II.18. Salah Satu Pusat Perbelanjaan di Cianjur



Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang dihadapi. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu metode survei dan wawancara.

Dalam metode survei terdapat beberapa alat yang harus tersedia untuk melakukan sebuah rekaman data. Adapun peralatan yang harus disiapkan dalam pengamatan langsung adalah sebagai berikut:



Gambar II.19. Kamera

Sumber: <https://www.harapanrakyat.com> (diakses pada 1 Juli 2021 pukul 10.31 WIB)



Gambar II.20. Drone

Sumber: <https://www.unsplash.com> (diakses pada 1 Juli 2021 pukul 10.32 WIB)



Gambar II.21. GPS

Sumber: <https://travel.tempo.co> (diakses pada 1 Juli 2021 pukul 10.33 WIB)

Dalam metode survei terdapat beberapa alat yang harus tersedia untuk melakukan sebuah rekaman data. Alat tersebut diantaranya adalah Kamera atau *Video recorder* yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan dilapangan dan mendapatkan gambar mengenai kondisi lapangan serta kepentingan lainnya yang perlu diabadikan.

3. Wawancara (*Indepth interview*)

Wawancara dilakukan kepada *stakeholders* termasuk pemerintah dan masyarakat di daerah yang menjadi sasaran studi dari tingkat kelurahan/desa hingga kota/kabupaten agar didapat data-data mengenai penataan daerah dan pengaruhnya bagi perekonomian, kendala dan masalah serta solusinya menurut mereka serta masukan-masukan dari masyarakat dan pemerintah setempat.

Indepth interview akan dilakukan dalam bentuk wawancara secara mendalam dengan tokoh-tokoh atau pelaku kunci yang terkait dengan isu/permasalahan penataan daerah yang disesuaikan dengan daya dukung. Wawancara merupakan proses antara pewawancara (*Interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewed*) melalui komunikasi langsung atau dapat juga dikatakan sebagai proses percakapan tatap muka (*face to face*) antara *interviewer* dengan *interviewed* dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu aspek yang dinilai dan telah dirancang sebelumnya.

Sasaran *indepth interview* tersebut mencakup antara lain: aparat di lingkungan pemerintahan seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekda, OPD terkait, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya.



Metode wawancara dilakukan untuk mengetahui permasalahan, keluhan, kendala dan potensi yang bisa digali. Sesi ini sebaiknya dijalankan sebagai cara untuk mengenal masyarakat dan mengetahui keinginan yang dapat ditampung serta aspirasi masyarakat dalam kegiatan penyusunan program.



Gambar II.22. Pengumpulan Data/Informasi dan Diskusi Terkait Kajian Lokasi Ibukota Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan



Instrumen pertanyaan dalam *indepth interview* mencakup alasan akan dilakukannya penataan wilayah (pemekaran wilayah) di Kabupaten Cianjur hingga kesiapan Kabupaten Cianjur melakukan penentuan lokasi calon ibukota. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada *stakeholder* seperti:

- a. Bagaimana perkembangan wilayah Kabupaten Cianjur hingga saat ini/saat ini jika dilihat dari dimensi geografi, dimensi demografi, dan dimensi sistem? (untuk mengetahui perkembangan wilayah atau kondisi eksisting Kabupaten Cianjur dari berbagai dimensi)
- b. Bagaimana persiapan pemerintah daerah setempat dalam mempersiapkan lahan calon lokasi ibukota baru di Cianjur Selatan? (untuk melihat kesiapan pemerintah daerah setempat)
- c. Bagaimana persiapan dokumen-dokumen maupun strategi yang akan dilakukan agar proses pemindahan lokasi calon ibukota baru ini berhasil dilakukan? (untuk mengetahui seberapa jauh Kabupaten Cianjur mempersiapkan urusan administrasi terkait calon lokasi ibukota baru)
- d. Bagaimana proses yang dilakukan selama mempersiapkan lokasi calon ibukota baru termasuk bantuan dan upaya campur tangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, dalam bentuk fisik/infrastruktur maupun regulasi? (untuk mengetahui hambatan atau tantangan yang dihadapi selama proses mempersiapkan lokasi calon ibukota)
- e. Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana umum ataupun sosial untuk mendukung keberadaan ibukota kabupaten persiapan?

4. Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan untuk penyusunan Kajian Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur terdiri dari data sekunder dan data primer. Mengenai kebutuhan data sekunder dan data primer dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel II.2. Matriks Kebutuhan Data

No (1)	Jenis Aspek (2)	Jenis Data (3) (4)		Sumber Data (5)
1	Geografis	Luas wilayah Kabupaten Cianjur	Dokumen dan Peta	• Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur • BPBD Kabupaten Cianjur
		Hidrografi	Dokumen dan Peta	
		Kerawanan Bencana	Dokumen dan Peta	
2	Demografi	Jumlah Penduduk	Dokumen	• Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur
		Distribusi Penduduk	Dokumen	
		Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)	Dokumen	
3	Sosial	Kriminalitas	Dokumen	• Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur • Dinas Sosial Kabupaten Cianjur
		Konflik Sosial	Dokumen	
		Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Dokumen	
		Kohesivitas Sosial	Dokumen	
		Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	
4	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Dokumen	• Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur
		Potensi Unggulan Daerah	Dokumen	
5	Keuangan Daerah	Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk	Dokumen	• Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
		Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan	Dokumen	
		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen	
6	Kemampuan penyelenggaraan	Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Dokumen	• Bappeda Kabupaten Cianjur



No (1)	Jenis Aspek (2)	Jenis Data (3)		Sumber Data (5)
	pemerintah	Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Dokumen	
		Aksesibilitas Pelayanan Dasar Infrastruktur	Dokumen	
		Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Induk	Dokumen	
		Rancangan Rencana Tata Ruang Calon Daerah Persiapan	Dokumen	

2.2.2 METODE ANALISIS

Kajian ini secara umum menggunakan analisa kuantitatif dengan menggunakan penentuan skor terhadap setiap indikator yang menjadi persyaratan kelayakan pembentukan daerah baru seperti yang diuraikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dari data yang diperoleh, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisa secara deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan hasil kajian.

Data yang digunakan dalam analisis setiap indikator bersumber dari data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan meliputi data provinsi dalam angka, kabupaten dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan beberapa data sekunder lainnya yang bersumber dari kantor-kantor dinas dan badan yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara data primer yang digunakan bersumber dari wawancara dengan narasumber tokoh, terutama di wilayah-wilayah pemekaran.

Analisa data dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan.

1. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian akademis terhadap rencana pembentukan daerah.
2. Persyaratan teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.
3. Sedangkan persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.



2.2.2.1. TATA CARA PENILAIAN PERSYARATAN DASAR KEWILAYAHAN

1. Luas Wilayah Minimal

Yang dimaksud dengan “luas wilayah minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan” adalah luas rata-rata wilayah pada Daerah provinsi, luas rata-rata wilayah pada Daerah kabupaten atau luas rata-rata wilayah pada Daerah kota dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tertentu ditambah dengan luas wilayah Daerah provinsi terkecil, Daerah kabupaten terkecil atau Daerah kota terkecil yang ada dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut, kemudian dibagi 2 (dua).

- a. Luas wilayah minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kabupaten

$$LWM = \frac{\bar{x} \text{ LDP} + \text{LDPK}}{2}$$

Keterangan:

LWM = luas wilayah minimal kabupaten.

$\bar{x} \text{ LDP}$ = rata-rata luas wilayah Daerah kabupaten dalam kelompok pulau atau kepulauan.

LDPK = luas wilayah Daerah kabupaten terkecil dalam kelompok pulau atau kepulauan.

- b. Luas wilayah minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan

$$LWM = \frac{\bar{x} \text{ LDP} + \text{LDPK}}{2}$$

kota

Keterangan:

LWM = luas wilayah minimal kota.

$\bar{x} \text{ LDP}$ = rata-rata luas wilayah Daerah kota terkecil dalam kelompok pulau atau kepulauan.

LDPK = luas wilayah Daerah kabupaten terkecil dalam kelompok pulau atau kepulauan.

2. Jumlah Penduduk Minimal

Yang dimaksud dengan “jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan” adalah jumlah rata-rata penduduk pada Daerah provinsi, jumlah rata-rata penduduk pada Daerah kabupaten atau jumlah rata-rata penduduk pada Daerah kota dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tertentu ditambah dengan jumlah penduduk Daerah provinsi yang paling sedikit, jumlah penduduk Daerah kabupaten yang paling sedikit atau jumlah penduduk Daerah kota yang paling sedikit yang ada dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut, kemudian dibagi 2 (dua).

a. Jumlah penduduk minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kabupaten:

$$JPM = \frac{\bar{x}JPP + JPPK}{2}$$

Keterangan:

JPM = jumlah penduduk minimal kabupaten.

$\bar{x}JPP$ = rata-rata jumlah penduduk Daerah kabupaten dalam kelompok pulau atau kepulauan.

JPPK = jumlah penduduk Daerah kabupaten terkecil dalam kelompok pulau atau kepulauan.

b. Jumlah penduduk minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kota:

$$JPM = \frac{\bar{x}JPP + JPPK}{2}$$

Keterangan:

JPM = jumlah penduduk minimal kota.

$\bar{x}JPP$ = rata-rata jumlah penduduk Daerah kota dalam kelompok pulau atau kepulauan.

JPPK = jumlah penduduk Daerah kota terkecil dalam kelompok pulau atau kepulauan.

3. Batas Wilayah

a. Batas wilayah antara daerah induk dengan daerah sekitarnya



- b. Batas wilayah antara daerah calon daerah persiapan dengan daerah induk setelah dikurangi calon daerah persiapan.

Batas dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar skala 1:5.000 dan/atau citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 (empat) meter. Batas wilayah digambarkan dalam peta dasar diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan per undang-undangan.

4. Cakupan Wilayah

Rincian nama-nama kecamatan pada masing-masing kabupaten dan nama-nama desa pada masing-masing kecamatan yang masuk menjadi Cakupan Wilayah.

- a. Cakupan Wilayah Daerah Persiapan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota.
- b. Cakupan wilayah daerah persiapan tidak boleh melebihi cakupan wilayah daerah induknya
- c. Daerah yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan harus sudah memiliki sarana dan prasarana dasar pemerintahan (kantor bupati/walikota, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah untuk Daerah Persiapan provinsi dan kantor kecamatan untuk Daerah Persiapan Kabupaten/Kota).
- d. Cakupan wilayah dituangkan dalam peta wilayah berdasarkan peta batas yang terdiri dari peta wilayah daerah induk, peta Cakupan Daerah Persiapan, dan peta Daerah induk dikurangi Cakupan Daerah Persiapan (dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota, nama kecamatan, garis batas wilayah, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon provinsi apabila ada).

5. Batas Usia Minimal Daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan

- a. Batas usia minimal Daerah Kabupaten/Kota dihitung sejak pembentukannya dengan Undang-Undang dan batas usia minimal kecamatan dihitung sejak dibentuknya kecamatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Batas usia minimal Daerah Kabupaten/Kota induk 7 (tujuh) tahun sejak pembentukan.
- c. Batas usia minimal kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan kabupaten/kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pembentukan.



Tabel II.3. Parameter dan Indikator Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan

NO (1)	PARAMETER (2)	INDIKATOR (3)	KETERANGAN (4)
1.	Luas Wilayah Minimal	1. Luas wilayah minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kabupaten 2. Luas wilayah minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kota	$LWM = \frac{\bar{x} \text{ LDP} + \text{LDPK}}{2}$ Keterangan: LWM = luas wilayah minimal kabupaten. x LDP = rata-rata luas wilayah Daerah kabupaten dalam kelompok pulau atau kepulauan. LDPK = luas wilayah Daerah kabupaten terkecil dalam kelompok pulau atau kepulauan.
2.	Jumlah Penduduk Minimal	Jumlah penduduk minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kabupaten Jumlah penduduk minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kota	$JPM = \frac{\bar{x} \text{ JPP} + \text{JPPK}}{2}$ Keterangan: JPM = jumlah penduduk minimal kota. x JPP = rata-rata jumlah penduduk Daerah kota dalam kelompok pulau atau kepulauan. JPPK = jumlah penduduk Daerah kota terkecil dalam kelompok pulau atau kepulauan.
3.	Batas Wilayah	Batas wilayah antara daerah induk dengan daerah sekitarnya Batas wilayah antara daerah calon daerah persiapan dengan daerah induk setelah dikurangi calon daerah persiapan	Batas dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar skala 1:5.000 dan/atau citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 (empat) meter
4.	Cakupan Wilayah	a. Cakupan Wilayah Daerah Persiapan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten b. 4 (empat) kecamatan	

NO (1)	PARAMETER (2)	INDIKATOR (3)	KETERANGAN (4)
		untuk pembentukan daerah kota.	
		Cakupan wilayah daerah persiapan tidak boleh melebihi cakupan wilayah daerah induknya	
		Daerah yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan harus sudah memiliki sarana dan prasarana dasar pemerintahan	Kantor bupati/walikota, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah untuk Daerah Persiapan provinsi dan kantor kecamatan untuk Daerah Persiapan Kabupaten/Kota
		Peta batas yang terdiri dari peta wilayah daerah induk, peta Cakupan Daerah Persiapan, dan peta Daerah induk dikurangi Cakupan Daerah Persiapan	Dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota, nama kecamatan, garis batas wilayah, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon provinsi apabila ada
5.	Batas Usia Minimal Daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan	a. Batas usia minimal Daerah Kabupaten/Kota dihitung sejak pembentukannya dengan Undang-Undang b. Batas usia minimal kecamatan dihitung sejak dibentuknya kecamatan dengan Peraturan Daerah Kabuapten/Kota Batas usia minimal Daerah Kabupaten/Kota induk 7 (tujuh) tahun sejak pembentukan Batas usia minimal kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.	

Sumber: RPP Tentang Desain Besar Penataan Daerah

2.2.2.2. TATA CARA PENILAIAN PERSYARATAN DASAR KAPASITAS DAERAH

Penilaian persyaratan dasar kapasitas Daerah dilakukan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan mengenai kelayakan suatu calon Daerah Persiapan dilihat dari pemenuhan persyaratan dasar kapasitas Daerah. Persyaratan dasar kapasitas Daerah terdiri dari beberapa parameter, masing-masing parameter terdiri dari 1 (satu) atau lebih indikator, dan pada masing-masing indikator terdapat 1 (satu) atau lebih subindikator.

A. Parameter

Parameter merupakan keadaan atau kondisi yang utama yang menjadi dasar dalam penilaian persyaratan dasar kapasitas Daerah. Parameter persyaratan dasar kapasitas Daerah terdiri atas:

1. Parameter geografi;
2. Parameter demografi;
3. Parameter keamanan;
4. Parameter sosial, politik, adat, dan tradisi;
5. Parameter potensi ekonomi;
6. Parameter keuangan Daerah,
7. Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Indikator

Masing-masing parameter terdiri atas 1 (satu) atau lebih indikator. Indikator merupakan suatu keadaan atau kondisi yang secara lebih khusus dipandang dapat memberikan gambaran mengenai parameter.

C. Subindikator

Setiap indikator kemudian dielaborasi lagi menjadi subindikator. Subindikator merupakan 1 (satu) atau lebih ukuran yang dipandang dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai suatu indikator, yang berupa data atau fakta yang berasal dari lapangan. Subindikator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Datanya tersedia;
2. Mudah dihitung;
3. Relevan;
4. Terukur;
5. Reliabel.

Penilaian persyaratan kapasitas Daerah dilakukan dengan melakukan penghitungan terhadap parameter, indikator, dan subindikator sebagaimana tersebut di atas untuk menghasilkan skor subindikator, bobot subindikator, nilai subindikator, nilai total, dan kriteria kelayakan.

D. Skor dan Bobot Subindikator

1. Skor Subindikator

Masing-masing subindikator diberi skor. Penerapan metode pemberian skor (scoring) pada masing-masing subindikator dilakukan dengan tujuan:

- a. Menjaga objektivitas;
- b. Membakukan cara penilaian;
- c. Mempermudah penghitungan.

Untuk menentukan skor masing-masing subindikator, terlebih dahulu ditetapkan rentang skor subindikator 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), dengan skor terendah 1 (satu) dan skor tertinggi 5 (lima). Untuk sebagian besar subindikator, skor 5 (lima) menunjukkan kondisi yang maksimal, paling baik, atau paling diharapkan, sedangkan skor 1 (satu) menunjukkan kondisi yang minimal, paling buruk, atau paling tidak diharapkan. Sedangkan untuk subindikator aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, dan aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, skor 5 (lima) menunjukkan kondisi yang minimal, paling buruk atau paling tidak diharapkan. Sedangkan skor 1 (satu) menunjukkan kondisi yang sudah maksimal, sudah baik, atau sudah sesuai dengan yang diharapkan.

2. Bobot Subindikator

Masing-masing subindikator mempunyai bobot tertentu. Bobot masing-masing subindikator berbeda-beda sesuai dengan tingkat kepentingan relatifnya terhadap indikator maupun parameter persyaratan dasar kapasitas Daerah. Subindikator yang dipandang relatif memiliki kepentingan yang lebih tinggi memiliki bobot yang lebih besar, sedangkan subindikator yang dipandang relatif memiliki kepentingan yang lebih rendah memiliki bobot yang lebih kecil. Bobot masing-masing subindikator adalah sebagai berikut.



Tabel II.4. Parameter, Indikator, dan Bobot Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah

PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
1. GEOGRAFI	1. Lokasi Ibukota	1. Rasio ketimpangan jarak antara batas terdekat dan batas terjauh Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan calon ibukotanya.	0,00-0,20 =1 0,21-0,40 =2 0,41-0,60 =3 0,61-0,80 =4 0,81-1,00 =5	2
		2. Ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan calon Daerah Persiapan yang sudah ada berita acara penyerahannya dihadapan notaris.	a. Provinsi (ha): <80 = 1 81-90 = 2 91-100 = 3 101-110 = 4 >110 = 5 b. Kabupaten (ha): <30 = 1 31-40 = 2 41-50 = 3 51-60 = 4 >60 = 5 c. Kota (ha): <20 = 1 21-30 = 2 31-40 = 3 41-50 = 4 >50 = 5	2
	2. Hidrografi	1. Potensi air permukaan dan air tanah di cakupan wilayah calon Daerah Persiapan dengan klasifikasi dan kriteria tinggi, sedang, atau rendah.	Sangat tinggi = 5 Tinggi = 4 Sedang = 3 Rendah = 2 Sangat rendah = 1	1
		2. Ketersediaan air baku untuk	≤10% = 1	1



PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		kebutuhan sehari-hari penduduk dan untuk kegiatan ekonomi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	10,1%-20% = 2 20,1%-30% = 3 30,1%-40% = 4 >40% = 5	
	3. Kerawanan Bencana	1. Jumlah jenis potensi bencana yang diukur dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Tinggi = 1 Sedang = 3 Rendah = 5	1
		2. Jumlah kejadian bencana alam dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	a. Provinsi Bencana <5 kali = 5 Bencana 5-9 kali = 4 Bencana 10-14 kali = 3 Bencana 15-19 kali = 2 Bencana ≥20 kali = 1 b. Kabupaten Tanpa bencana = 5 Bencana ≤5 kali = 4 Bencana 6-10 kali = 3 Bencana 11-15 kali = 2 Bencana >15 kali = 1 c. Kota Bencana ≤2 kali = 5 Bencana 3-5 kali = 4 Bencana 6-8 kali = 3 Bencana 9-11 kali = 2 Bencana ≥12 kali = 1	2
2. DEMOGRAFI	4. Kualitas SDM	1. Rasio angka lama bersekolah di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata angka lama bersekolah berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.	<0,70 = 1	4



PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		2. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah atas di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	4
		3. Rasio APK pendidikan dasar di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	4
	5. Distribusi Penduduk	Rasio tingkat kepadatan penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata kepadatan penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	3
	6. Tindakan Kriminal Umum	Rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$\geq 1,00 = 1$ $0,90-0,99 = 2$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 4$ $< 0,70 = 5$	2
3. KEAMANAN	7. Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang terjadi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	a. Provinsi Konflik < 5 kali = 5 Konflik 5-9 kali = 4 Konflik 10-14 kali = 3 Konflik 15-19 kali = 2 Konflik ≥ 20 kali = 1	2



PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
			b. Kabupaten Tanpa konflik = 5 Konflik ≤ 5 kali = 4 Konflik 6-10 kali = 3 Konflik 11-15 kali = 2 Konflik > 15 kali = 1 c. Kota Konflik ≤ 2 kali = 5 Konflik 3-5 kali = 4 Konflik 6-8 kali = 3 Konflik 9-11 kali = 2 Konflik ≥ 12 kali = 1	
4. SOSIAL, POLITIK, ADAT, DAN TRADISI	8. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah penduduk yang ikut pemilihan umum terhadap jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	$> 70\% = 5$ $60\% - 70\% = 4$ $50\% - 59\% = 3$ $40\% - 49\% = 2$ $< 40\% = 1$	3
	9. Kohesivitas Sosial	Jumlah etnik/subetnik di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	1 etnik/subetnik = 5 2-3 etnik/subetnik = 4 4-5 etnik/subetnik = 3 6-7 etnik/subetnik = 2 > 8 etnik/subetnik = 1	2
	10. Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	> 40 organisasi kemasyarakatan = 5 31-40 organisasi kemasyarakatan = 4 21-30 organisasi kemasyarakatan = 3 11-20 organisasi kemasyarakatan = 2 < 10 organisasi kemasyarakatan = 1	3
5. EKONOMI	11. Pertumbuhan Ekonomi	1. Rasio rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi	$\geq 1,00 = 5$ $0,90 - 0,99 = 4$ $0,80 - 0,89 = 3$ $0,70 - 0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	3



PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan selama 5 (lima) tahun.		
		2. Rasio pendapatan perkapita di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap pendapatan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	3
		3. Rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap IPM berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	3
		4. Rasio persentase angka kemiskinan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap persentase angka kemiskinan berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$< 0,70 = 5$ $0,70-0,79 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,90-0,99 = 2$ $\geq 1,00 = 1$	3
	12. Potensi Unggulan Daerah	1. Jumlah cadangan tambang minyak dan gas yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	• Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi dan sudah diusahakan = 5 • Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi tetapi belum diusahakan = 4 • Ada cadangan terukur tetapi belum layak secara ekonomi = 3 • Ada cadangan tetapi belum terukur = 2 • Tidak ada cadangan = 1	1



PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		2. Jumlah cadangan tambang mineral dan batu bara yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	• Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi dan sudah diusahakan = 5 • Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi tetapi belum diusahakan = 4 • Ada cadangan terukur tetapi belum layak secara ekonomi = 3 • Ada cadangan tetapi belum terukur = 2 • Tidak ada cadangan = 1	1
		3. Jumlah cadangan panas bumi yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	• Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi dan sudah diusahakan = 5 • Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi tetapi belum diusahakan = 4 • Ada cadangan terukur tetapi belum layak secara ekonomi = 3 • Ada cadangan tetapi belum terukur = 2 • Tidak ada cadangan = 1	1
		4. Rasio nilai kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian perkapita nasional.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	1
		5. Rasio nilai kontribusi PDRB sektor industri perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor industri perkapita	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$	1



PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$<0,70 = 1$	
		6. Rasio nilai kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita nasional.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	1
		7. Rasio nilai kontribusi PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	1
		8. Rasio nilai kontribusi PDRB sektor keuangan dan persewaan perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor keuangan dan persewaan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	1
		9. Rasio nilai PDRB sektor jasa perkapita di wilayah induk	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$	1



PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		terhadap nilai kontribusi PDB sektor jasa perperkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	0,80-0,89 = 3 0,70-0,79 = 2 <0,70 = 1	
6. KEUANGAN DAERAH	13. Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) induk terhadap total pendapatan Daerah induk.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	5
	14. Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan	Rasio pendapatan asli calon Daerah Persiapan terhadap total PAD induk.	$\geq 1,00 = 1$ $0,90-0,99 = 2$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 4$ $<0,70 = 5$	8
	15. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) induk dalam 5 (lima) tahun terakhir.	WTP 5 kali selama 5 tahun = 5 WTP 4 kali selama 5 tahun = 4 WTP 3 kali selama 5 tahun = 3 WTP 3 kali selama 5 tahun = 2 WTP 1 kali selama 5 tahun = 1	4
7. KEMAMPUAN PENYELENGGARAA N PEMERINTAH	16. Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	1. Rata-rata jumlah murid sekolah dasar (SD) pada setiap ruang belajar SD di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	$\leq 32 = 1$ $32-35 = 2$ $36-39 = 3$ $40-42 = 4$ $\geq 43 = 5$	2
		2. Rata-rata jumlah murid sekolah menengah pertama (SMP) pada setiap ruang belajar SMP di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	$\leq 32 = 1$ $32-35 = 2$ $36-39 = 3$ $40-42 = 4$ $\geq 43 = 5$	2
		3. Rata-rata jumlah murid sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK)	$\leq 32 = 1$ $32-35 = 2$ $36-39 = 3$	1



PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		pada setiap ruang belajar SMA/SMK di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	40-42 = 4 ≥43 = 5	
	17. Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	1. Rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	<2500 = 1 2500-2999 = 2 3000-3499 = 3 3500-3999 = 4 >4000 = 5	3
		2. Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit/puskesmas rawat inap terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	≤1000 = 1 1001-1500 = 2 1501-2000 = 3 2001-2500 = 4 <2500 = 5	2
	18. Aksesibilitas Pelayanan Dasar Infrastruktur	1. Rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah pada calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata panjang jalan dibandingkan rata-rata luas wilayah di kelompok pulau dan kepulauan.	0,80-100 = 1 0,60-0,79 = 2 0,41-0,59 = 3 0,21-0,40 = 4 <0,20 = 5	5
		2. Rasio jumlah pelabuhan yang menghubungkan antar pulau di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dibandingkan dengan rata-rata jumlah pelabuhan di kelompok pulau dan kepulauan, untuk wilayah kepulauan.	0,80-100 = 1 0,60-0,79 = 2 0,41-0,59 = 3 0,21-0,40 = 4 <0,20 = 5	5
	19. Jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Induk	1. Rasio jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) terhadap jumlah penduduk di Daerah induk terhadap rata-rata pegawai ASN berdasarkan kelompok pulau dan kepulauan.	0,80-100 = 1 0,60-0,79 = 2 0,41-0,59 = 3 0,21-0,40 = 4 <0,20 = 5	2



PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		2. Rasio jumlah pegawai ASN pada calon Daerah Persiapan terhadap jumlah pegawai ASN di Daerah induk.	0,80-100= 1 0,60-0,79 = 2 0,41-0,59 = 3 0,21-0,40 = 4 <0,20= 5	2
	20. Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Calon Daerah Persiapan	Ketersediaan dokumen rancangan rencana tata ruang wilayah (RTRW) calon Daerah Persiapan.	• Sudah masuk dalam dokumen RTRW induk = 5 • Sudah ada kajian tapi belum masuk dalam dokumen RTRW induk= 3 • Belum ada kajian= 1	2
TOTAL BOBOT SUBINDIKATOR				100

Sumber: RPP Tentang Desain Besar Penataan Daerah



E. Kriteria Kelayakan

Dari hasil penjumlahan keseluruhan Nilai Subindikator, akan dapat diketahui Nilai Total Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah tiap Calon Daerah Persiapan. Sesuai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Daerah, Nilai Total tersebut kemudian digunakan sebagai acuan untuk mengkategorikan calon-calon Daerah Persiapan ke dalam dua kategori, yaitu **berkapasitas** dan **tidak berkapasitas**. Dimana selanjutnya kedua kategori tersebut menentukan kriteria Calon Daerah Persiapan yang terbagi menjadi **layak** dan **tidak layak**.

Tabel II.5. Kriteria Kelayakan Calon Daerah Persiapan Berdasarkan Nilai Total Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah

No.	Nilai Total	Kategori	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	400-500	Berkapasitas	Layak
2.	Di bawah 400	Tidak Berkapasitas	Tidak Layak

2.2.2.3. TATA CARA PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Persyaratan administratif dibuat berdasarkan tata urutan yaitu pemenuhan persyaratan secara berurutan, artinya persyaratan kedua dan ketiga tidak dapat dilaksanakan sebelum persyaratan sebelumnya terpenuhi.

A. Keputusan Musyawarah Desa yang Akan Menjadi Cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota

Berita acara persetujuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memuat:

- Persetujuan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan kabupaten/kota
- Persetujuan nama Daerah Persiapan kabupaten/kota
- Persetujuan calon ibu kota Daerah Persiapan

Keputusan musyawarah desa menjadi Lampiran Berita Acara persetujuan kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi Cakupan wilayah Daerah Persiapan kabupaten/kota.



B. Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota Daerah Induk dengan DPRD Kabupaten/Kota Induk

Berita acara persetujuan DPRD kabupaten/kota induk dan bupati/walikota kabupaten/kota induk memuat:

- a. Pembentukan Daerah Persiapan kabupapten/kota
- b. Cakupan wilayah daerah persiapan kabupaten/kota
- c. Nama Daerah Persiapan kabupaten/kota
- d. Lokasi ibu kota Daerah Persiapan kabupaten dengan menunjuk kecamatan yang menjadi lokasi ibu kota dan menyebutkan koordinatnya yang tergambar dalam peta sebagai lampiran
- e. Dukungan dana dari kabupaten/kota induk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan kabupaten/Kota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah persiapan
- f. Penyerahan personel, sarana dan prasarana, serta dokumen yang dibutuhkan oleh Daerah Persiapan

C. Persetujuan Bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur dari Daerah Provinsi yang Mencakup Daerah Persiapan Kabupaten/Kota yang akan Dibentuk

Berita acara persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD provinsi dan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakup Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk yang memuat:

- a. Pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota
- b. Cakupan wilayah daerah persiapan kabupaten/kota
- c. Nama daerah persiapan kabupaten/kota
- d. Lokasi ibu kota Daerah Persiapan kabupaten/kota dengan menunjuk kecamatan yang menjadi lokasi ibu kota dan menyebutkan koordinat pendekatan lokasi kantor bupati/walikota yang tergambar dalam peta sebagai lampiran
- e. Pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah Persiapan kabupaten/kota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak peresmian sebagai Daerah Persiapan

**Tabel II.6. Parameter dan Indikator Penilaian Persyaratan Administratif**

No	PARAMETER	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
1.	Keputusan Musyawarah Desa yang Akan Menjadi Cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan Daerah Persiapan kabuapten/kota
		Persetujuan nama Daerah Persiapam kabupaten/kota
		Persetujuan calon ibu kota Daerah Persiapan
2.	Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota Daerah Induk dengan DPRD Kabupaten/Kota Induk	Pembentukan Daerah Persiapan kabuapten/kota
		Cakupan wilayah daerah persiapan kabupaten/kota
		Nama Daerah Persiapan kabupaten/kota
		Lokasi ibu kota Daerah Persiapan kabupaten dengan menunjuk kecamatan yang menjadi lokasi ibu kota dan menyebutkan koordinatnya yang tergambar dalam peta sebagai lampiran
		Dukungan dana dari kabupaten/kota induk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan kabupaten/Kota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah persiapan
		Penyerahan personel, sarana dan prasarana, serta dokumen yang dibutuhkan oleh Daerah Persiapan
3.	Persetujuan Bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur dari Daerah Provinsi yang Mencakup Daerah Persiapan Kabupaten/Kota yang akan Dibentuk	Pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota
		Cakupan wilayah daerah persiapan kabupaten/kota
		Nama daerah persiapan kabupaten/kota
		Lokasi ibu kota Daerah Persiapan kabupaten/kota dengan menunjuk kecamatan yang menjadi lokasi ibu kota dan menyebutkan koordinat pendekatan lokasi kantor bupati/walikota yang tergambar dalam peta sebagai lampiran



No	PARAMETER	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		Pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah Persiapan kabupaten/kota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak peresmian sebagai Daerah Persiapan

Sumber: RPP Desain Besar Penataan Daerah



2.2.3 METODE PERUMUSAN REKOMENDASI/ KESIMPULAN/ RENCANA

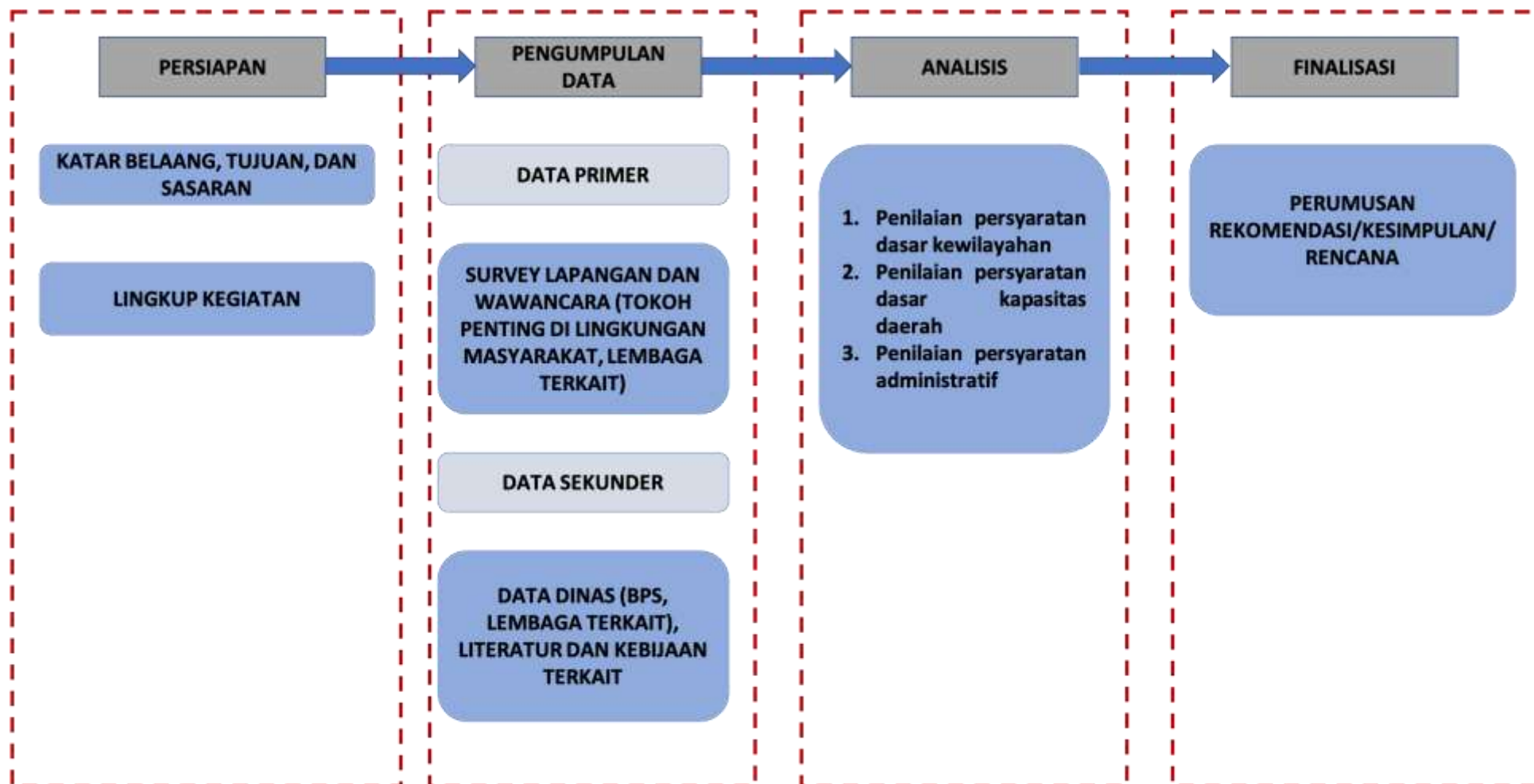
1. Perumusan rekomendasi yang menekankan tanggung jawab dan kemanfaatan bagi masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai yang mencakup efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Perumusan rekomendasi yang mempertimbangkan karakteristik regional dan tahapan-tahapan pelaksanaannya.
3. Perumusan rekomendasi yang mempertimbangkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam kaitannya dengan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
4. Perumusan rekomendasi untuk dilakukan studi secara mendalam terhadap faktor-faktor pemicu pemekaran maupun kelayakan pemekarannya (*feasibility*) sendiri.
5. Perumusan rekomendasi kerjasama antar pemerintah daerah
6. Perumusan upaya pengendalian pertambahan jumlah daerah baru dengan cara:
 - a. Mengusulkan untuk dilakukan revisi peraturan perundangan yang memperketat persyaratan teknis maupun persyaratan administratif dalam upaya pembentukan daerah baru.
 - b. Mengusulkan untuk dikeluarkan kebijakan yang bersifat disinsentif terhadap pemekaran daerah.



2.3. PROGRAM KERJA

Program kerja yang dilakukan dalam Kajian Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Survey data sekunder dan primer
2. Menyusun analisis kriteria dan kelayakan yang dibutuhkan dalam Kajian Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat
3. Menyusun analisis potensi wilayah kabupaten/kota sebagai pembanding yang dibutuhkan sebagai syarat dalam Kajian Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat
4. Melakukan uji coba kelayakan terhadap desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur
5. Menyusun laporan dan melakukan ekspose awal, antara, dan akhir
6. Perumusan hasil kajian, kesimpulan dan rekomendasi



Gambar II.23. Kerangka Alur Berpikir

BAB III

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN



Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), waktu yang tersedia bagi penyedia jasa konsultasi untuk menyerahkan hasil kegiatan adalah 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender. Pada bagian ini, konsultan akan menjabarkan waktu yang tersedia ke dalam jadwal yang lebih rinci mulai dari persiapan sampai pada kegiatan berlangsung dan penyerahan produk akhir kepada pemilik pekerjaan

3.1. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Bulan ke-							
		I				II			
		1	2	3	4	1	2	3	4
A	PERSIAPAN KEGIATAN	●	●						
1	Persiapan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	■							
2	Identifikasi Informasi dan Data Awal	■							
3	Perumusan Metodologi dan Rencana Kerja	■							
B	PENGUMPULAN DATA		●	●	●	●			
1	Survei dan Pengumpulan Data Sekunder dan Data Pendukung		■	■					
2	Observasi dan Wawancara (Data Primer)			■	■				
3	Kompilasi Data Hasil Survei Lapangan				■	■			
C	ANALISIS DATA								
1	Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan		■	■	■				
2	Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah			■	■				
3	Penilaian Persyaratan Administratif			■	■	■			
4	Penyusunan Laporan Antara		■	■	■	■			
D	PERUMUSAN RENCANA				●	●	●	●	●
1	Penyusunan Rekomendasi				■	■			
2	Penyusunan Draft Laporan Akhir					■	■		
3	Penyusunan Laporan Akhir					■	■	■	
E	PENYUSUNAN PETA CALON LOKASI IBUKOTA					■	■	■	
F	PENYERAHAN PRODUK								■

3.2. PEMBOBOTAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Bobot	Minggu	Bulan ke-							
				I				II			
				1	2	3	4	1	2	3	4
A	PERSIAPAN KEGIATAN										
1	Persiapan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	1	1	1,0							
2	Identifikasi Informasi dan Data Awal	2	1	2,0							
3	Perumusan Metodologi dan Rencana Kerja	2	1	2,0							
B	PENGUMPULAN DATA										
1	Survei dan Pengumpulan Data Sekunder dan Data Pendukung	4	2		2,0	2,0					
2	Observasi dan Wawancara (Data Primer)	4	2			2,0	2,0				
3	Kompilasi Data Hasil Survei Lapangan	4	2				2,0	2,0			
C	ANALISIS DATA										
1	Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan	6	3		2,0	2,0	2,0				
2	Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah	6	2			3,0	3,0				
3	Penilaian Persyaratan Administratif	9	3			3,0	3,0	3,0			
4	Penyusunan Laporan Antara	12	4		3,0	3,0	3,0	3,0			
D	PERUMUSAN RENCANA										
1	Penyusunan Rekomendasi	10	2				5,0	5,0			
2	Penyusunan Draft Laporan Akhir	10	2					5,0	5,0		
3	Penyusunan Laporan Akhir	15	3					5,0	5,0	5,0	
E	PENYUSUNAN PETA CALON LOKASI IBUKOTA	12	3					4,0	4,0	4,0	
F	PENYERAHAN PRODUK	3	1								3,0
		100		5	7	15	20	27	14	9	3
				5	12	27	47	74	88	97	100

BAB IV

PROFIL WILAYAH



4.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF

Kabupaten Cianjur secara geografis terletak pada koordinat 1060 42'- 1070 25' Bujur Timur dan 60 21'-70 25' Lintang Selatan, dengan ketinggian 7-2.962 mdpl dan memiliki kemiringan 0- 40%.

Batas-batas wilayah daerah meliputi:

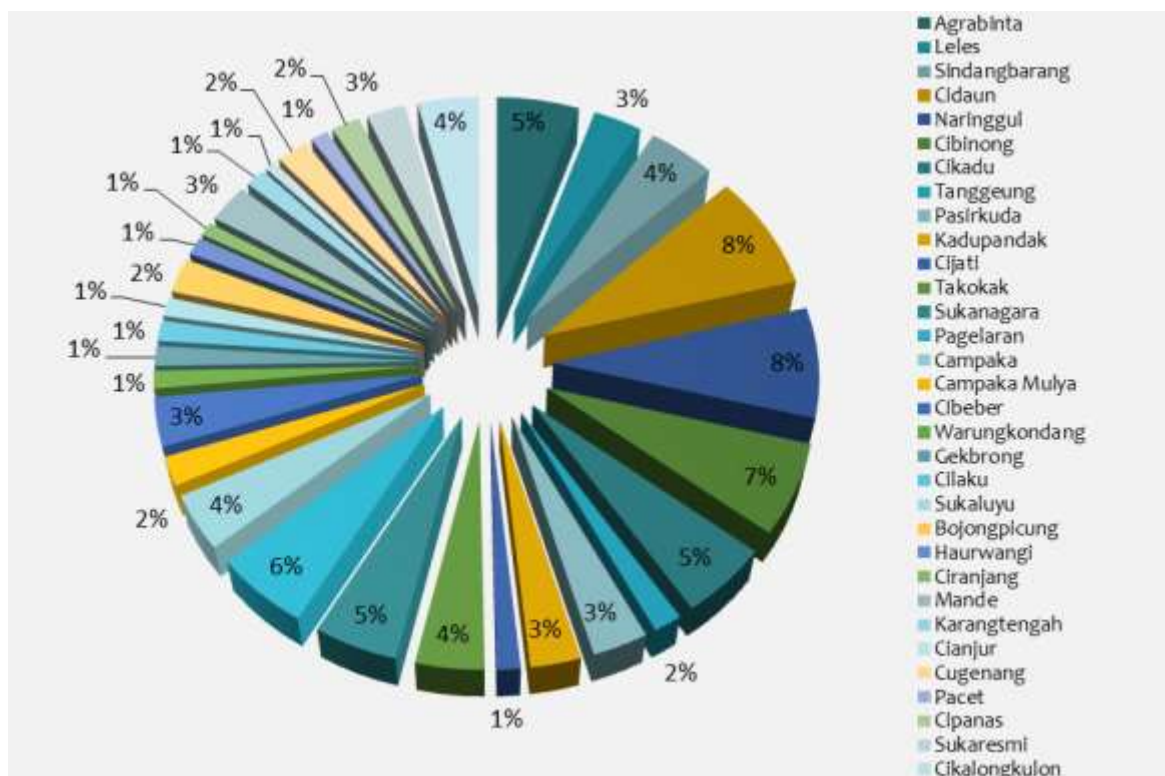
Sebelah utara	:Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
Sebelah timur	: Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut;
Sebelah selatan	: Samudra Hindia;
Sebelah barat	: Kabupaten Sukabumi.

Wilayah Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 kecamatan dengan luas wilayah 361.434,98 ha dan kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah kecamatan Cidaun dengan luas 29.551,23 ha. Untuk luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

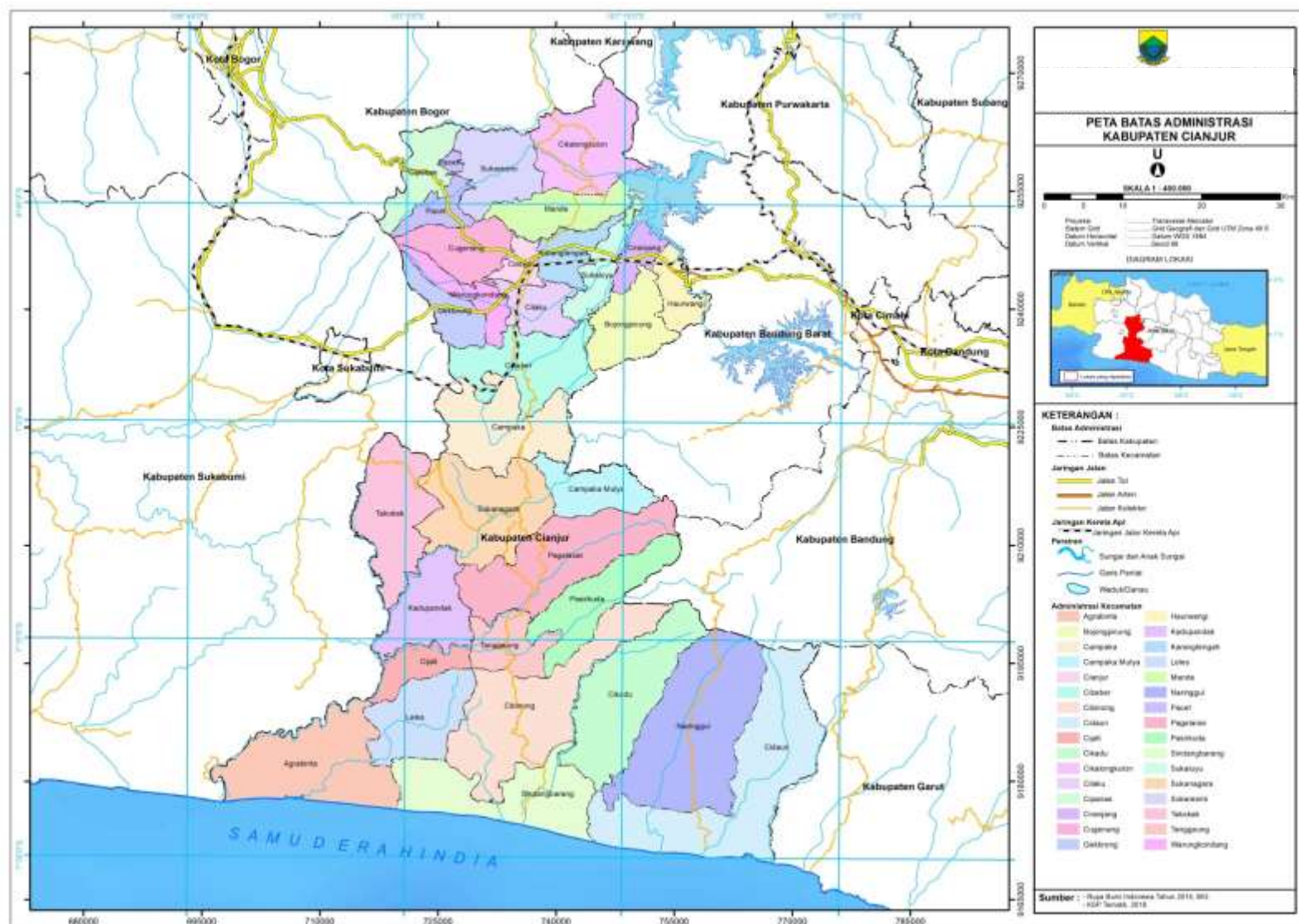
**Tabel IV.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur**

No (1)	Kecamatan (2)	Luas Wilayah (Km2) (3)	Persentase (4)
1	Agrabinta	192,65	5,33
2	Leles	114,32	3,16
3	Sindangbarang	159,08	4,40
4	Cidaun	295,51	8,18
5	Naringgul	281,32	7,78
6	Cibinong	235,48	6,52
7	Cikadu	188,66	5,22
8	Tanggeung	59,54	1,65
9	Pasirkuda	115,15	3,19
10	Kadupandak	104,41	2,89
11	Cijati	49,02	1,36
12	Takokak	142,16	3,93
13	Sukanagara	174,05	4,82
14	Pagelaran	199,44	5,52
15	Campaka	143,75	3,98
16	Campaka Mulya	74,27	2,05
17	Cibeber	124,73	3,45
18	Warungkondang	45,16	1,25
19	Gekbrong	50,77	1,40
20	Cilaku	52,53	1,45
21	Sukaluyu	48,02	1,33
22	Bojongpicung	88,34	2,44
23	Haurwangi	46,18	1,28
24	Ciranjang	34,81	0,96
25	Mande	98,79	2,73
26	Karangtengah	48,53	1,34
27	Cianjur	26,15	0,72
28	Cugenang	76,15	2,11
29	Pacet	41,66	1,15
30	Cipanas	67,28	1,86
31	Sukaresmi	92,15	2,55
32	Cikalongkulon	144,02	3,98
	Cianjur	3614,35	100,00

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021



Gambar IV.1. Diagram Persentase Luas Wilayah di Kabupaten Cianjur



Gambar IV.2. Peta Administrasi Kabupaten Cianjur



Gambar IV.3. Peta Orientasi Kabupaten Cianjur



4.2. KONDISI FISIK

1. Topografi

Wilayah Kabupaten Cianjur mempunyai topografi berupa dataran, perbukitan berelief halus, perbukitan berelief sedang, perbukitan berelief agak kasar serta perbukitan berelief kasar seperti yang diuraikan sebagai berikut:

a. Dataran

Merupakan daerah dengan kemiringan lereng yang berkisar antara 0 – 8 % yang menempati daerah pantai, daerah alluvial sungai dan dataran lahar. Daerah yang termasuk satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi yang rendah yang terdistribusi pada Kecamatan Sukaresmi, Cikalongkulon, Cianjur, Ciranjang, Bojong Picung, sebelah utara pada Kecamatan Cibeber, Pagelaran, Tanggeung, Kadupandak, dan sepanjang Pantai Selatan mulai dari Agrabinta sampai Cidaun.

b. Berbukitan Berelief Halus

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng 8 – 15 % yang terdapat pada daerah utara Kecamatan Pacet, Warungkondang, Takokak sebelah Barat, Cidaun dan sebelah Timur Sindang Barang.

c. Berbukitan Berelief Sedang

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng 15 – 25 % yang tersebar pada daerah Utara Kecamatan Mande, sebelah Selatan Kadupandak, dan sebelah Selatan Cibeber.

d. Berbukitan Berelief Agak Kasar

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 24 – 40 % yang tersebar pada daerah Takokak, bagian Utara dan Selatan Kadupandak, bagian Utara Sukanagara, Agrabinta, sebelah Utara Cidaun, sebelah Selatan Pagelaran, dan sebelah Barat Kecamatan Tanggeung.

e. Berbukitan Berelief Kasar

Bentuk permukaan pada bagian ini adalah bergelombang kasar sampai sangat kasar dengan kemiringan lereng > 40 % yang terdistribusi pada



daerah Selatan Kecamatan Sukaresmi, sebelah Selatan Bojong Picung, Sukanagara, Gunung Buleud, Sebelah Timur Kecamatan Takokak dan Gunung Sambul, sebelah Timur Pagelaran, bagian Selatan dan Utara Kadupandak serta Karangtengah yang membentuk gawir gerakan tanah yang hamper tegak lurus. Daerah lain yang memiliki bentuk permukaan seperti ini adalah daerah Gunung Pangrango, Pasir Besar, pasir Taman sampai pasir Gambir, Pasir Negrog, Gunung Pondokcabang, Gunung Berenuk, dan Pasir Gook.

Letak ketinggian Wilayah Kabupaten Cianjur yaitu: 7 – 2.962 mdpl, wilayah yang mempunyai ketinggian tertinggi adalah Kecamatan Cipanas dan Pacet yaitu 1.080 – 2.962 mdpl.

2. Geologi

Wilayah Kabupaten Cianjur terbentuk dari berbagai formasi geologis dan litologi, yaitu: sebagian besar batuan gunung berapi (volkan) kuarter muda dan volkan kuarter tua, dan sebagian batuan sedimen tersier, serta batuan gamping (Sudjatmiko; Koesmono, 1976). Sebagian kecil di lembah dan daratan terdapat alivium dan endapan pantai. Formasi geologi/litologi, landform dan iklim sangat berpengaruh terhadap pembentukan tanah dan potensi pertaniannya (Desaunettes, 1977).

Bentuk wilayah (landform) di wilayah Kabupaten Cianjur terdiri dari:

- 1) Daratan pantai;
- 2) Jalur aliran sungai;
- 3) Daratan aluvial (Kedung Pandak, Cihea);
- 4) Volkan (daratan volkan, kaki volkan, lungur volkan, kerucut volkan);
- 5) Tektonik/struktural (daratan tektonik, perbukitan tektonik dan pegunungan tektonik); dan
- 6) Karst (daratan karst dan perbukitan karst).





3. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Cianjur menurut klasifikasi Dudal dan Soeprattohardjo (1957 – 1961), terdiri dari tanah Aluvial, Regosol, Andosol, Grumusol, Mediteran dan Podsolik. Karakteristik dan penyebaran jenis tanah tersebut adalah:

- Tanah Aluvial, tersebar di Kecamatan Cilaku, Cibeber, Warungkondang, Gekbrong, Ciranjang, Sukaluyu, Bojongpicung, Karangtengah, Mande dan Cikalongkulon.
- Tanah Regosol tersebar di Kecamatan Ciranjang, Pacet, Cipanas, Cugenang, Cikalongkulon, Sukanagara, Campaka, Campakamulya, Pagelaran, Kadupandak, Cijati Cibinong, Cikadu, Takokak, Tanggeung dan Agrabinta.
- Tanah Andosol terdapat di Kecamatan Pacet, Cipanas, Cugenang, Pagelaran, Cibinong dan Naringgul
- Tanah Grumusol terdapat di Kecamatan Ciranjang, Sukaluyu, Bojongpicung, Cikalongkulon, Sukanagara, Pagelaran, Kadupandak, Cijati dan Takokak
- Tanah Mediteran terdapat di Kecamatan Ciranjang, Cikalongkulon, Sukanagara, Kadupandak, Campaka, Campakamulya, Takokak dan Tanggeung.
- Tanah Latosol terdapat di Kecamatan Cianjur, Cilaku, Cibeber, Warungkondang, Gekbrong, Sukaluyu, Bojongpicung, Karangtengah, Mande, Pacet, Cipanas, Sukaesmi, Cugenang, Cikalongkulon, Sukanagara, Campaka, Campakamulya, Kadupandak, Cijati, Sindangbarang, Cibinong, Cikadu, Cidaun, Takokak, Tanggeung, Agrabinta dan Leles.
- Tanah Podsolik terdapat di Kecamatan Cibeber, Ciranjang, Sukaluyu, Bojongpicung, Sukanagara, Campaka, Campakamulya, Pagelaran, Kadupandak, Cijati, Sindangbarang, Cibinong, Cikadu, Cidaun, Tanggeung, Agrabinta, Leles dan Naringgul.





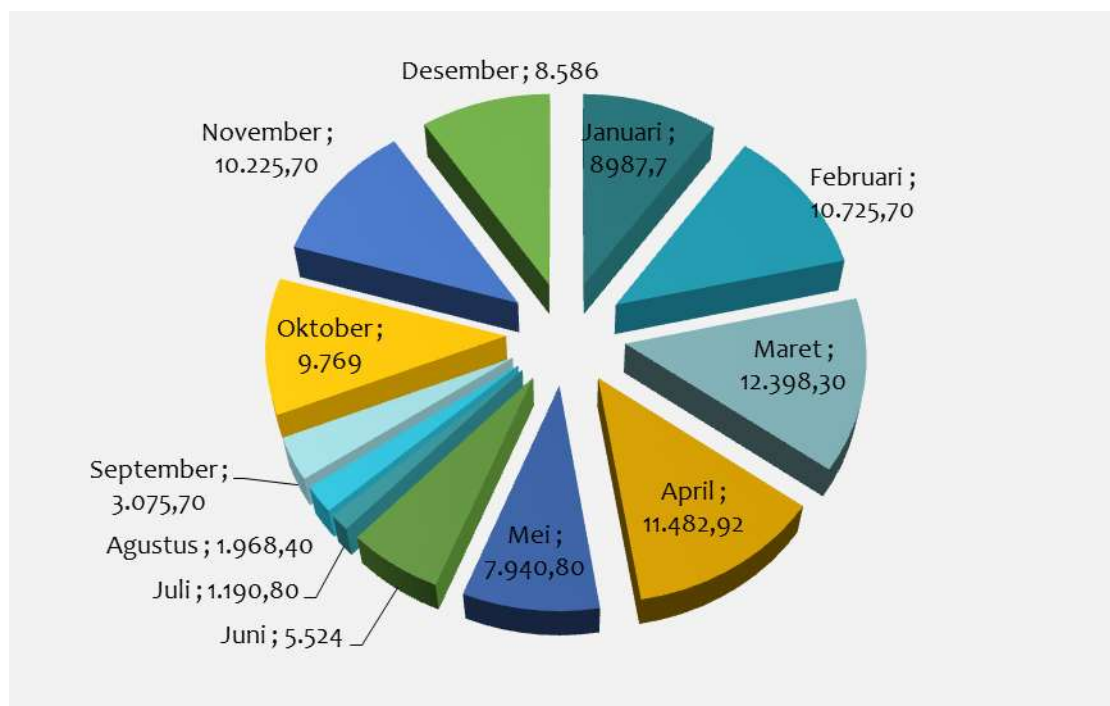
4. Curah Hujan

Curah hujan rata-rata berkisar antara 1.000 – 1.500 mm/tahun, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret dengan jumlah harian hujan efektif selama 1 tahun adalah 100 – 150 hari, namun demikian cuaca di Kabupaten Cianjur khususnya dan Indonesia pada umumnya sangat sulit diduga. Hal ini disebabkan oleh pemanasan global (global warning) yang merupakan fenomena alam yang belakangan menjadi isu dan disyaratkan dan dipertimbangkan dalam pengembangan dan pembangunan wilayah di seluruh dunia.

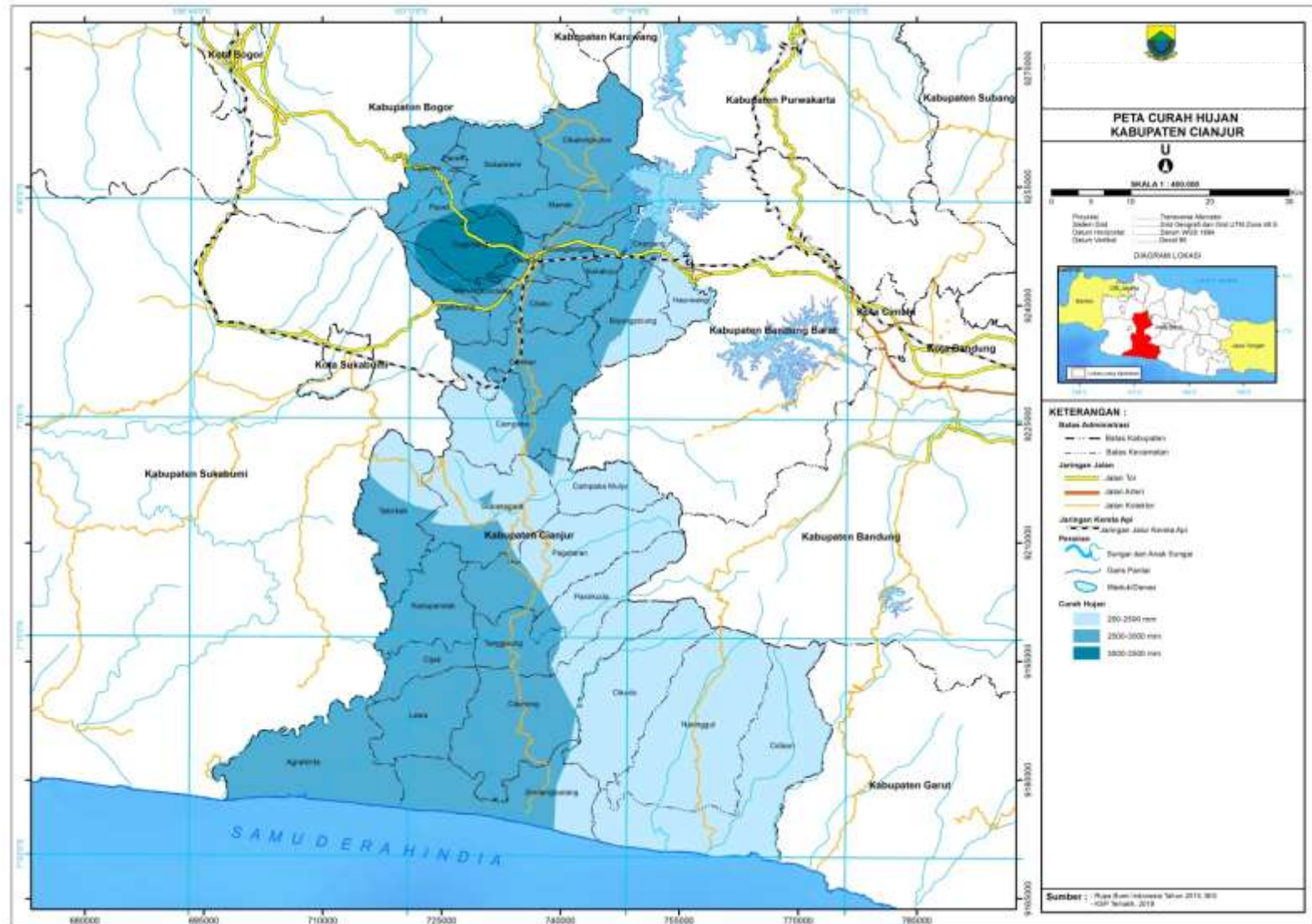
Tabel IV.2. Curah Hujan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)
(1)	(2)	(3)
Januari	8987,7	22
Februari	10.725,7	28
Maret	12.398,3	27
April	11.482,919	24
Mei	7.940,8	21
Juni	5.524	18
Juli	1.190,8	12
Agustus	1.968,4	11
September	3.075,7	15
Oktober	9.769	25
November	10.225,7	28
Desember	8.586	29

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka Tahun 2021



Gambar IV.6. Diagram Curah Hujan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020



Gambar IV.7. Peta Curah Hujan Kabupaten Cianjur



5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Cianjur berupa badan air, belukar, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran, sawah, tambak, dan tanah terbuka. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut.

KECAMATAN	PENGGUNAAN LAHAN											
	Badan Air	Belukar	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Tanaman	Pemukiman	Perkebunan	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering Campur	Sawah	Tambak	Tanah Terbuka
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Agrabinta	354,93	57,85	-	-	918,00	253,92	2200,22	31,30	12522,83	2748,37	-	589,18
Bojongpicung	65,12	-	-	-	4057,96	334,61		920,43		3183,61	-	315,21
Campaka	-	-	-	512,34	11185,32	178,00	959,44	19,65	322,27	1075,94	-	70,96
Campaka Mulya	-	-	-	1023,24	5274,43	196,71	6,36	1,00	496,86	379,91	-	25,52
Cianjur	-	-	-	-	1400,67	982,09	153,72	18,37		77,85	-	5,43
Cibeber	11,73	-	-	38,59	10117,78	399,30		187,70	562,46	957,77	-	151,57
Cibinong	13,82	1,30	-	137,08	2549,09	103,64	4215,30	2205,62	13929,81	478,87	-	154,67
Cidaun	266,31	53,95	-	5476,46	2115,70	98,03	2,54	16116,11	3423,32	1082,15	-	1037,80
Cijati	84,96	-	-	-	29,90	221,70	152,74	1794,61	2267,31	290,88	-	38,25
Cikadu	39,00	73,00	-	3219,15	2280,23	45,66	448,59	2124,80	10362,09	169,68	-	58,15
Cikalongkulon	10,15	-	-	91,26	884,24	333,93	7919,14	884,70	1305,56	1922,41	-	284,96
Cilaku	-	-	-	-	4872,56	348,78	-	-	-	1,34	-	56,80
Cipanas	-	7,93	824,24	1170,80	3100,23	1010,68	0,000027	24,29	343,10	3,89	-	9,45
Ciranjang	42,97	-	-	-	268,82	251,99	-	136,55	-	2415,92	-	43,57
Cugenang	-	-	117,96	508,26	4992,26	364,93	1272,16	0,05	10,97	288,95	-	42,95
Gekbrong	-	-	42,20	736,58	3243,90	188,97	286,69	56,55	30,20	374,84	-	29,63



KECAMATAN	PENGUNAAN LAHAN											
	Badan Air	Belukar	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Tanaman	Pemukiman	Perkebunan	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering Campur	Sawah	Tambak	Tanah Terbuka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Haurwangi	31,98	-	-	-	838,49	195,73	0,24	1087,44	-	1668,10	-	733,09
Kadupandak	86,16	-	-	-	1175,00	36,94	11,93	653,36	6583,59	1698,43	-	164,77
Karangtengah	-	-	-	-	3776,01	702,26	6,46	5,68	-	297,27	-	15,37
Leles	55,59	0,08	-	-	2102,62	122,45	65,30	365,67	8260,83	258,13	-	30,00
Mande	32,95	-	-	-	4771,45	433,66	1365,89	27,36	889,08	872,01	-	45,33
Naringgul	11,03	566,39	-	6524,24	4080,50	131,87	33,29	8029,72	7800,63	790,70	-	370,33
Pacet	-	-	105,34	277,87	1548,03	1044,45	-	211,48	840,73	39,34	-	6,20
Pagelaran	-	-	1014,80	5622,42	3969,58	77,62	0,29	1862,93	5203,55	2040,89	-	88,94
Pasirkuda	-	-	-	1015,27	5724,49	48,25	135,52	339,09	3527,34	73,58	-	15,58
Sindangbarang	176,73	53,68	-	19,08	3933,76	257,66	899,57	3932,66	5152,71	1664,97	26,86	218,79
Sukaluyu	44,06	-	-	-	4446,54	107,14	-	0,0047	-	33,76	-	3,67
Sukanagara	-	-	-	-	14144,67	169,55	1412,64	488,15	1005,57	39,57	-	104,56
Sukaresmi	-	-	-	-	1985,70	390,82	637,88	429,15	5781,32	209,81	-	52,13
Takokak	-	-	-	-	5879,17	67,72	38,48	86,60	7972,95	100,55	-	20,01
Tanggeung	34,71	-	-	340,45	1318,36	277,53	-	1880,02	2107,16	615,03	-	25,20
Warungkondang	-	-	53,65	421,95	2379,25	354,45	568,66	34,63	-	766,83	-	-

Sumber : RBI Tahun 2014





Gambar IV.9. Contoh Penggunaan Lahan Sawah di Kabupaten Cianjur



Gambar IV.10. Contoh Penggunaan Lahan Perkotaan di Kabupaten Cianjur



6. Kerawanan Bencana

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Cianjur antara lain: longsor, banjir, angin puting beliung, gempa bumi dan kekeringan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana alam tersebut dapat dilihat melalui grafik di bawah ini.



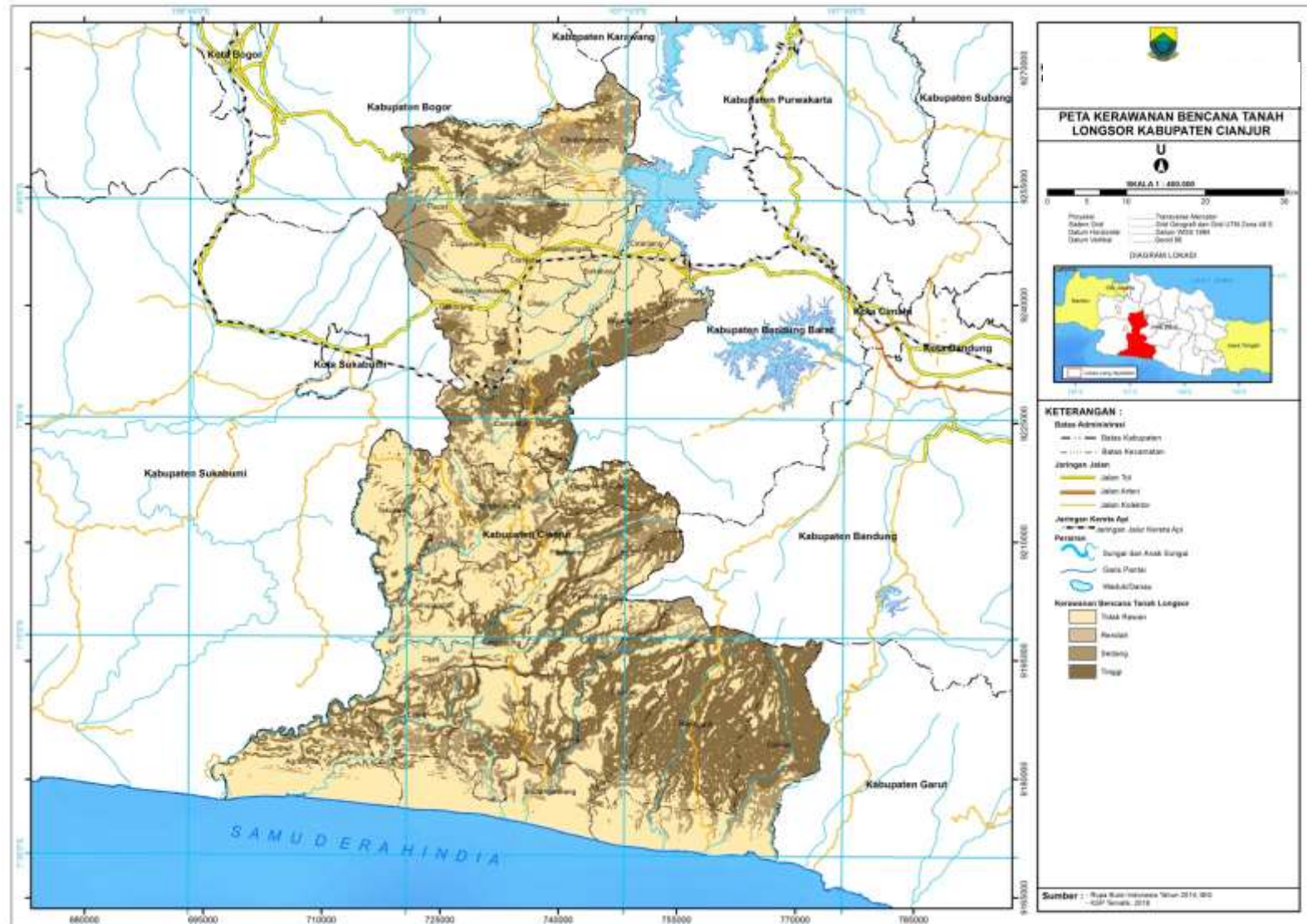
Gambar IV.11. Tren Kejadian Bencana 5 Tahun Terakhir di Kabupaten Cianjur



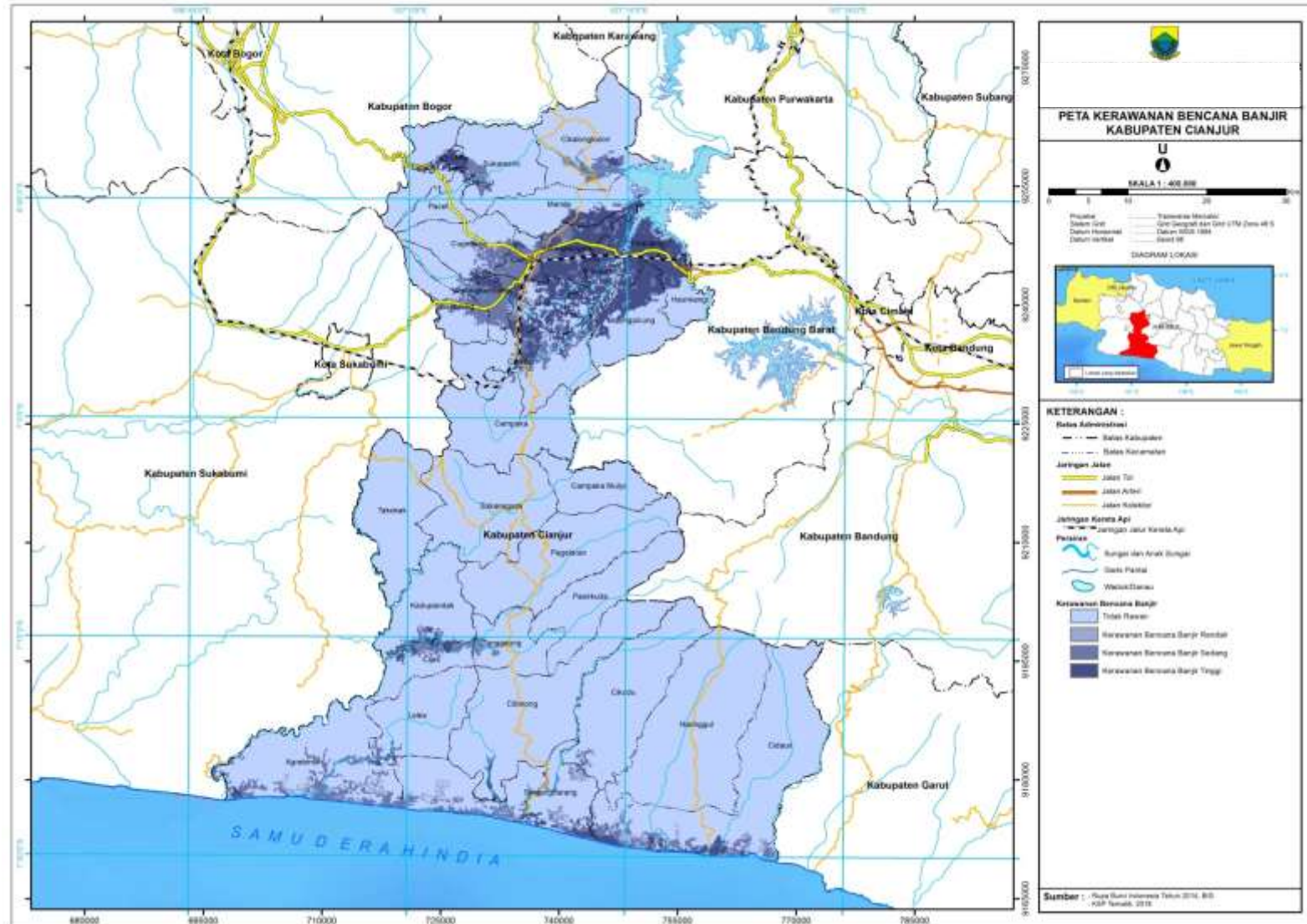
Gambar IV.12. Jumlah Kejadian Bencana 5 Tahun Terakhir di Kabupaten Cianjur

Sumber: www.bnpb.go.id (diakses pada 2 Juli 2021 pukul 08.56 WIB)





Gambar IV.14. Peta Kerawanan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Cianjur



Gambar IV.15. Peta Kerawanan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Cianjur



4.3. KEPENDUDUKAN

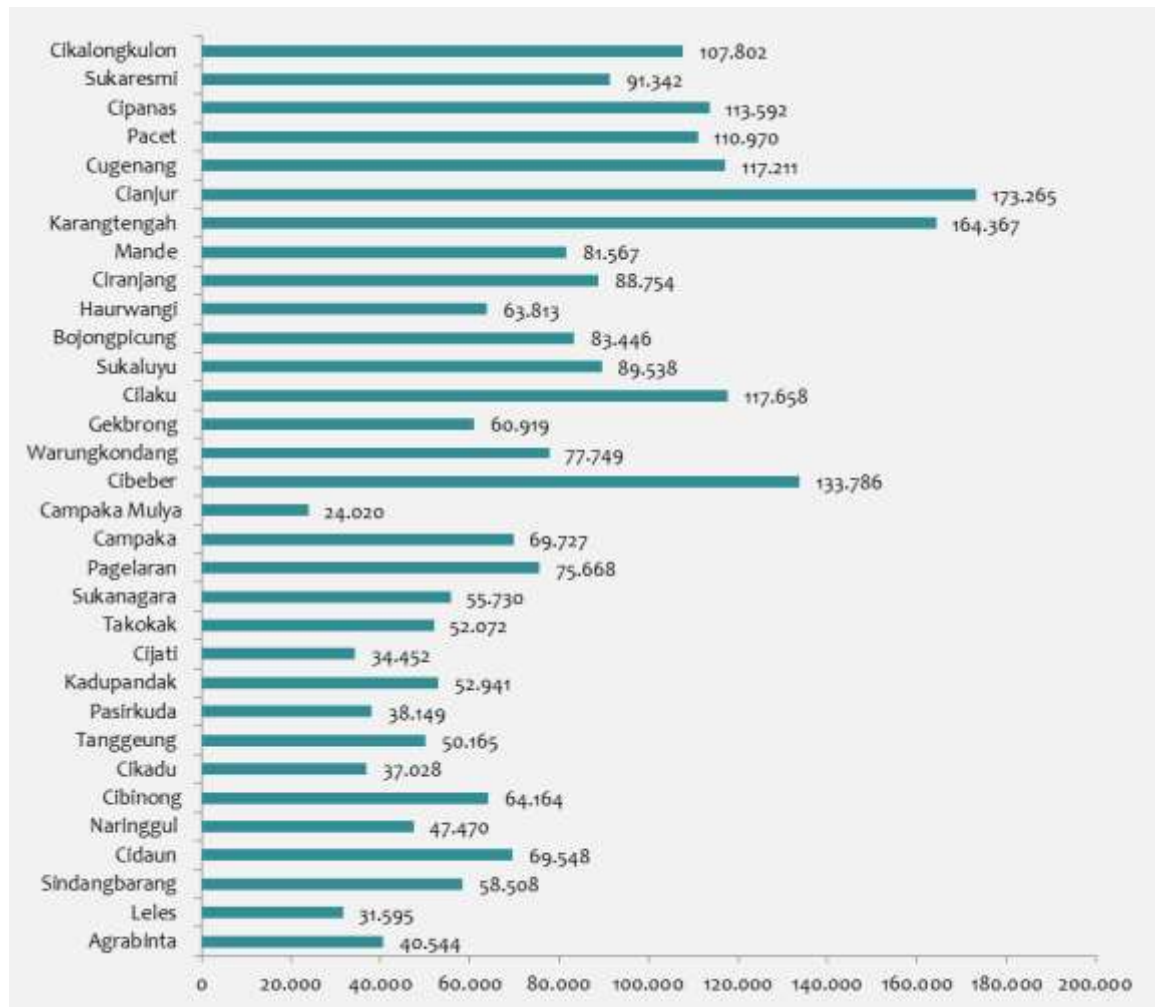
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Mengenai jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Cianjur akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.3. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

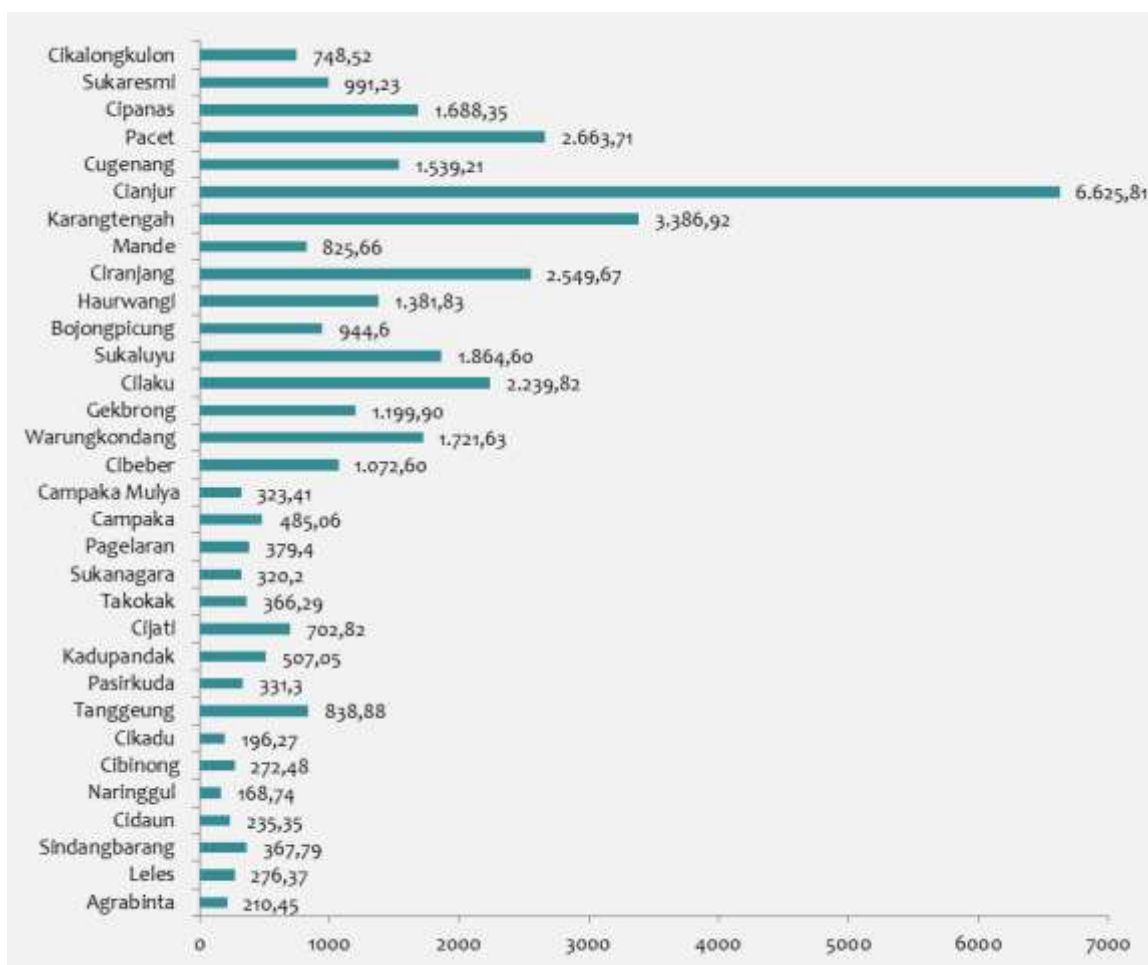
No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Agrabinta	40.544	192,65	210,45
2	Leles	31.595	114,32	276,37
3	Sindangbarang	58.508	159,08	367,79
4	Cidaun	69.548	295,51	235,35
5	Naringgul	47.470	281,32	168,74
6	Cibinong	64.164	235,48	272,48
7	Cikadu	37.028	188,66	196,27
8	Tanggeung	50.165	59,8	838,88
9	Pasirkuda	38.149	115,15	331,30
10	Kadupandak	52.941	104,41	507,05
11	Cijati	34.452	49,02	702,82
12	Takokak	52.072	142,16	366,29
13	Sukanagara	55.730	174,05	320,20
14	Pagelaran	75.668	199,44	379,40
15	Campaka	69.727	143,75	485,06
16	Campaka Mulya	24.020	74,27	323,41
17	Cibeber	133.786	124,73	1.072,60
18	Warungkondang	77.749	45,16	1.721,63
19	Gekbrong	60.919	50,77	1.199,90
20	Cilaku	117.658	52,53	2.239,82
21	Sukaluyu	89.538	48,02	1.864,60
22	Bojongpicung	83.446	88,34	944,60
23	Haurwangi	63.813	46,18	1.381,83
24	Ciranjang	88.754	34,81	2.549,67
25	Mande	81.567	98,79	825,66
26	Karangtengah	164.367	48,53	3.386,92
27	Cianjur	173.265	26,15	6.625,81
28	Cugenang	117.211	76,15	1.539,21
29	Pacet	110.970	41,66	2.663,71
30	Cipanas	113.592	67,28	1.688,35
31	Sukaresmi	91.342	92,15	991,23
32	Cikalongkulon	107.802	144,02	748,52
	Cianjur	2.477.560	3614,35	685,48

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021



Gambar IV.16. Diagram Jumlah Penduduk di Kabupaten Cianjur

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Cianjur yaitu sebanyak 173.265 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Campaka Mulya yaitu sebanyak 24.020 jiwa.



Gambar IV.17. Diagram Kepadatan Penduduk di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur terus mengalami peningkatan. Terhitung laju pertumbuhan penduduk tahun 2019-2020 sebesar 1,29%. Kecamatan Sukaluyu memiliki laju pertumbuhan tertinggi yaitu 2,40%. Sedangkan Kecamatan Leles memiliki laju pertumbuhan terendah yaitu 0,10%.

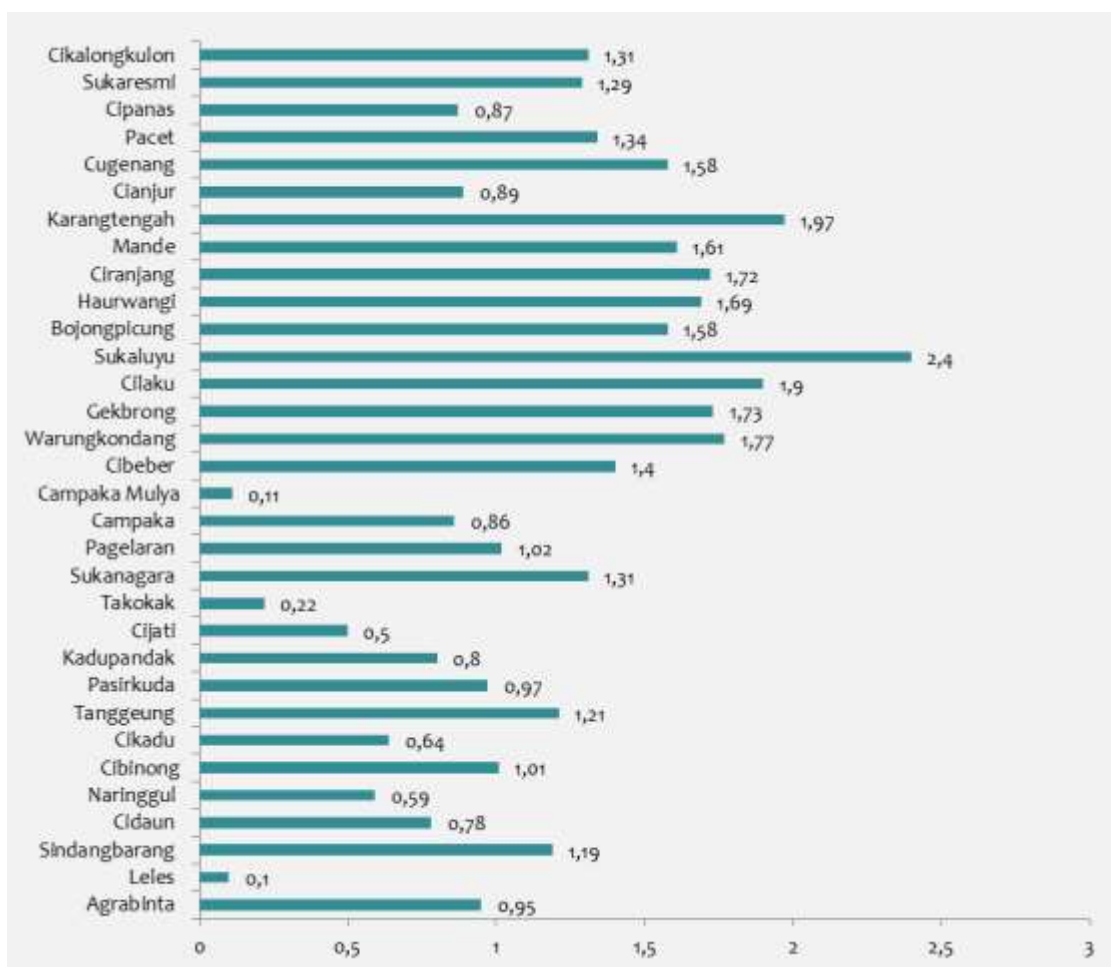
Tabel IV.4. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

No (1)	Kecamatan (2)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020 (%) (4)
1	Agrabinta	0,95
2	Leles	0,10
3	Sindangbarang	1,19
4	Cidaun	0,78
5	Naringgul	0,59
6	Cibirong	1,01
7	Cikadu	0,64
8	Tanggeung	1,21
9	Pasirkuda	0,97



No (1)	Kecamatan (2)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020 (%) (4)
10	Kadupandak	0,80
11	Cijati	0,50
12	Takokak	0,22
13	Sukanagara	1,31
14	Pagelaran	1,02
15	Campaka	0,86
16	Campaka Mulya	0,11
17	Cibeber	1,40
18	Warungkondang	1,77
19	Gekbrong	1,73
20	Cilaku	1,90
21	Sukaluyu	2,40
22	Bojongpicung	1,58
23	Haurwangi	1,69
24	Ciranjang	1,72
25	Mande	1,61
26	Karangtengah	1,97
27	Cianjur	0,89
28	Cugenang	1,58
29	Pacet	1,34
30	Cipanas	0,87
31	Sukaresmi	1,29
32	Cikalongkulon	1,31
	Cianjur	1,29

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka Tahun 2021



Gambar IV.18. Diagram Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

4.4. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

1. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang sosial tidak hanya dapat dilihat dari bentuk fisik saja, namun harus dapat dilihat secara keseluruhan yaitu segi fisik dan mental. Segi fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk menuju masyarakat yang cerdas dan sejahtera.

Tabel IV.5. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

No (1)	Status Pendidikan (2)	APM (3)	APK (4)
1	SD/MI	98,82	102,10
2	SMP/MTs	79,24	95,89
3	SMA/SMK/MA	44,69	62,14

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021



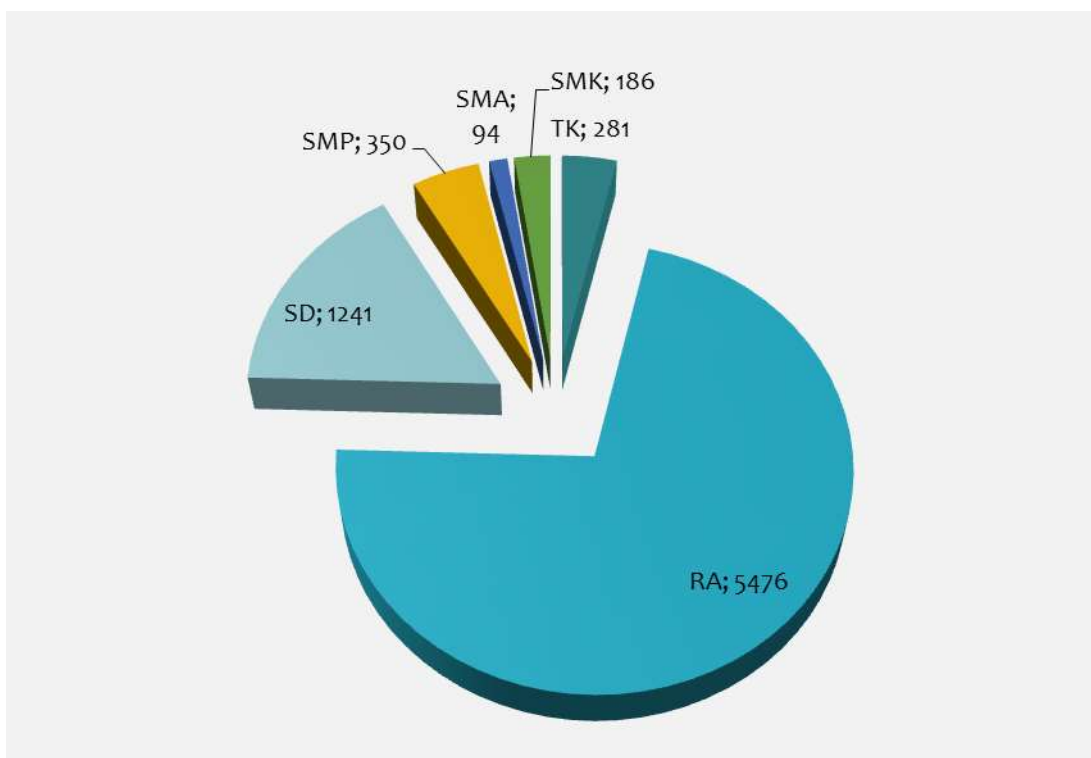
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) di dominasi oleh kelompok umur pada jenjang pendidikan SD/MI dan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk terbanyak yang sedang bersekolah adalah di tingkat pendidikan SD/MI.

Selain mengetahui Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Cianjur. Dibawah ini juga akan disebutkan sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Cianjur mulai dari sarana pendidikan SD/MI hingga SMA/SMK yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.6. Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020/2021

No (1)	Kecamatan (2)	TK (3)	RA (4)	SD (5)	SMP (6)	SMA (7)	SMK (8)
1	Agrabinta	3	31	31	7	3	1
2	Leles	1	17	28	5	2	4
3	Sindangbarang	7	28	35	12	4	5
4	Cidaun	7	141	42	15	7	9
5	Naringgul	6	10	37	12	4	3
6	Cibinong	14	121	47	16	4	2
7	Cikadu	3	0	32	13	3	3
8	Tanggeung	2	171	32	8	0	3
9	Pasirkuda	2	28	24	5	2	2
10	Kadupandak	1	16	40	9	3	5
11	Cijati	3	163	30	10	2	6
12	Takokak	11	84	33	11	2	5
13	Sukanagara	16	78	31	8	1	2
14	Pagelaran	3	0	48	9	2	3
15	Campaka	6	66	44	9	0	3
16	Campaka Mulya	1	0	18	4	0	2
17	Cibeber	10	330	62	15	4	9
18	Warungkondang	2	75	29	12	0	8
19	Gekbrong	3	129	25	3	1	1
20	Cilaku	21	189	55	19	6	13
21	Sukaluyu	1	40	35	11	3	7
22	Bojongpicung	6	333	44	6	1	5
23	Haurwangi	6	107	22	6	2	4
24	Ciranjang	10	432	34	14	3	5
25	Mande	6	240	44	6	1	2
26	Karangtengah	23	648	59	18	6	16
27	Cianjur	51	454	65	27	12	21
28	Cugenang	23	183	54	16	2	7
29	Pacet	13	460	28	11	4	11
30	Cipanas	13	467	40	15	4	9
31	Sukaesmi	3	0	39	7	3	2
32	Cikalongkulon	4	435	54	11	3	8
	Cianjur	281	5.476	1.241	350	94	186

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021



Gambar IV.19. Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020



Gambar IV.20. Salah Satu Sarana Pendidikan di Kabupaten Cianjur

2. Kesehatan

Kebijakan pembangunan di bidang sosial menyangkut berbagai aspek. Selain berdampak pada ekonomi juga dalam sosial politik masyarakat. Di

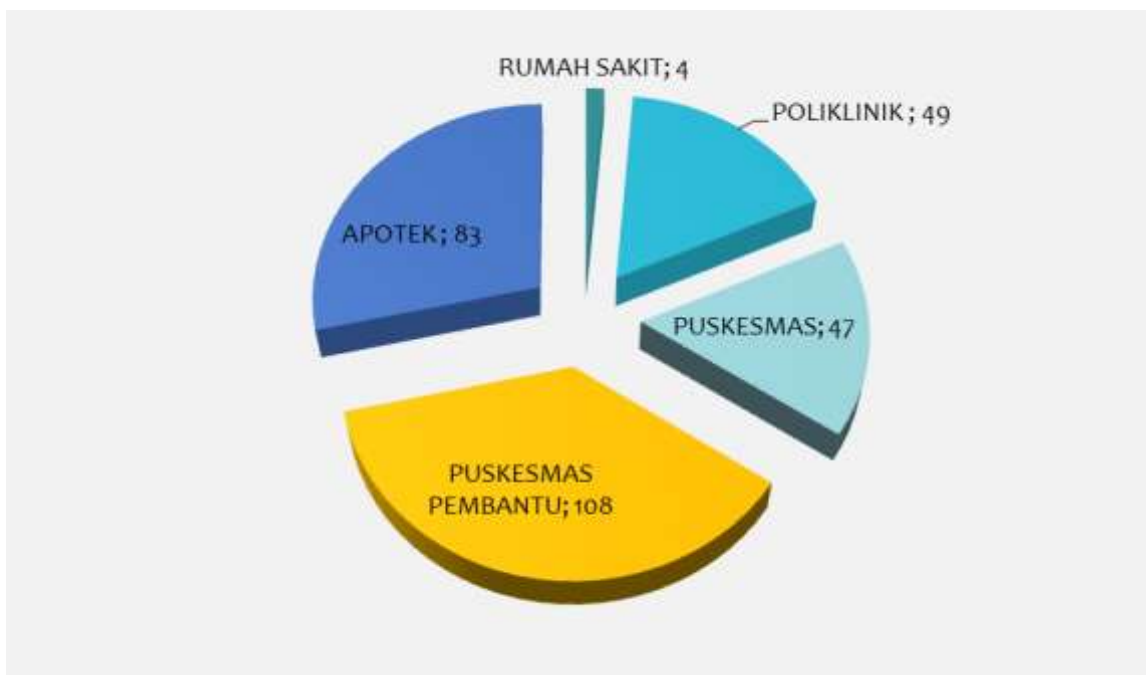


Kabupaten Cianjur sarana kesehatan berupa rumah sakit, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu dan Apotek. Berikut dijelaskan lebih detail mengenai persebaran sarana kesehatan di Kabupaten Cianjur

Tabel IV.7. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

No (1)	Kecamatan (2)	Rumah Sakit (3)	Poliklinik (4)	Puskesmas (5)	Puskesmas Pembantu (6)	Apotek (7)
1	Agrabinta	0	0	1	1	2
2	Leles	0	0	1	2	2
3	Sindangbarang	0	0	1	3	2
4	Cidaun	0	1	2	3	1
5	Naringgul	0	0	1	4	2
6	Cibinong	0	0	2	6	2
7	Cikadu	0	0	2	2	1
8	Tanggeung	0	0	1	4	1
9	Pasirkuda	0	0	1	2	1
10	Kadupandak	0	1	1	3	2
11	Cijati	0	5	2	1	1
12	Takokak	0	0	1	4	0
13	Sukanagara	0	1	1	4	4
14	Pagelaran	1	1	2	2	3
15	Campaka	0	2	1	3	2
16	Campaka Mulya	0	0	1	3	0
17	Cibeber	0	1	2	6	5
18	Warungkondang	0	3	1	2	3
19	Gekbrong	0	1	1	1	1
20	Cilaku	0	3	1	6	3
21	Sukaluyu	0	0	1	4	3
22	Bojongpicung	0	1	2	5	3
23	Haurwangi	0	0	1	3	3
24	Ciranjang	0	3	1	4	3
25	Mande	0	1	2	3	2
26	Karangtengah	1	7	2	7	7
27	Cianjur	1	5	3	4	8
28	Cugenang	0	0	2	3	4
29	Pacet	0	3	2	4	3
30	Cipanas	1	5	1	2	3
31	Sukaresmi	0	4	2	3	3
32	Cikalongkulon	0	1	2	4	3
	Cianjur	4	49	47	108	83

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021



Gambar IV.21. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020



Gambar IV.22. Salah Satu Sarana Kesehatan di Kabupaten Cianjur

3. Agama

Berdasarkan data pada tahun 2020 di Kabupaten Cianjur mayoritas masyarakat beragama Islam. Akan tetapi ada pula masyarakat yang menganut agama Kristen, katolik, dan Budha. Untuk sarana peribadatan bagi masyarakat di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut di Kabupaten Cianjur Tahun 2020



No (1)	Kecamatan (2)	Islam (3)	Protestan (4)	Katholik (5)	Hindu (6)	Budha (7)	Lainnya (8)
1	Agrabinta	36.999	1	0	2	1	0
2	Leles	29.231	0	0	0	0	0
3	Sindangbarang	54.994	12	2	0	0	1
4	Cidaun	60.960	6	1	0	0	
5	Naringgul	43.862	1	0	0	0	0
6	Cibinong	59.032	4	2	0	0	0
7	Cikadu	34.797	5	0	0	0	0
8	Tanggeung	48.191	5	1	0	0	1
9	Pasirkuda	33.663	7	0	0	0	0
10	Kadupandak	50.303	3	5	2	0	0
11	Cijati	32.203	0	0	0	0	0
12	Takokak	49.596	7	1	0	0	0
13	Sukanagara	54.662	8	12	0	0	0
14	Pagelaran	72.562	1	2	0	0	0
15	Campaka	77.909	94	22	0	0	3
16	Campaka Mulya	67.266	18	0	0	0	2
17	Cibeber	22.839	2	0	1	0	0
18	Warungkondang	128.378	65	15	1	7	1
19	Gekbrong	75.618	28	1	0	2	0
20	Cilaku	58.100	14	5	0	0	1
21	Sukaluyu	111.473	515	296	1	47	0
22	Bojongpicung	86.059	323	21	1	0	0
23	Haurwangi	81.897	6	0	0	0	0
24	Ciranjang	62.211	26	5	0	2	0
25	Mande	82.981	3.189	48	0	12	1
26	Karangtengah	156.393	1.752	378	27	40	4
27	Cianjur	166.007	2.856	822	15	1.444	10
28	Cugenang	111.866	51	21	5	7	3
29	Pacet	105.320	615	325	7	152	3
30	Cipanas	108.280	560	610	62	224	1
31	Sukaesmi	85.743	231	180	8	27	2
32	Cikalongkulon	103.853	44	0	0	2	0
	Cianjur	2.353.248	10.449	2.775	132	1.976	33

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021

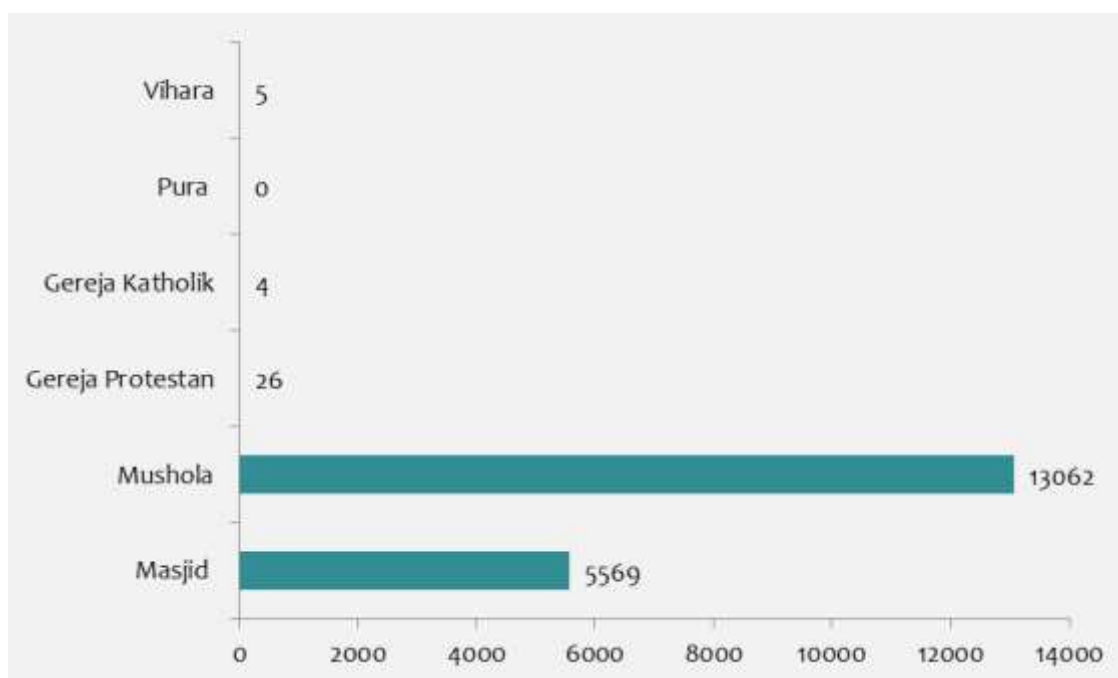
Tabel IV.8. Jumlah Sarana Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018

No (1)	Kecamatan (2)	Masjid (3)	Mushola (4)	Gereja Kristen (5)	Gereja Katholik (6)	Pura (7)	Wihara (8)
1	Agrabinta	201	243	-	-	-	-
2	Leles	171	275	-	-	-	-
3	Sindangbarang	171	451	-	-	-	-
4	Cidaun	272	368	-	-	-	-
5	Naringgul	175	246	-	-	-	-
6	Cibinong	250	530	-	-	-	-
7	Cikadu	145	308	-	-	-	-
8	Tanggeung	192	160	-	-	-	-
9	Pasirkuda	122	329	-	-	-	-
10	Kadupandak	197	404	-	-	-	-
11	Cijati	154	198	-	-	-	-
12	Takokak	237	429	-	-	-	-
13	Sukanagara	133	334	-	-	-	-



No (1)	Kecamatan (2)	Masjid (3)	Mushola (4)	Gereja Kristen (5)	Gereja Katholik (6)	Pura (7)	Wihara (8)
14	Pagelaran	266	541	-	-	-	-
15	Campaka	186	488	-	-	-	-
16	Campaka Mulya	96	400	-	-	-	-
17	Cibeber	310	922	-	-	-	-
18	Warungkondang	118	622	-	-	-	-
19	Gekbrong	134	279	-	-	-	-
20	Cilaku	196	530	-	-	-	-
21	Sukaluyu	129	541	-	-	-	-
22	Bojongpicung	156	466	-	-	-	-
23	Haurwangi	112	285	-	-	-	-
24	Ciranjang	127	360	12	-	-	-
25	Mande	147	336	-	-	-	-
26	Karangtengah	175	681	-	-	-	-
27	Cianjur	205	378	7	2	-	1
28	Cugenang	187	574	-	-	-	-
29	Pacet	145	263	3	-	-	3
30	Cipanas	166	279	3	1	-	-
31	Sukaesmi	156	394	1	1	-	1
32	Cikalongkulon	138	448	-	-	-	-
	Cianjur	5.569	13.062	26	4	-	5

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2018



Gambar IV.23. Diagram Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Cianjur



Gambar IV.24. Salah Satu Sarana Peribadatan di Kabupaten Cianjur

4.5. KONDISI PEREKONOMIAN

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Cianjur adalah Pertanian. Kehutanan. Dan Perikanan yang terlihat dari besarnya peranan kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Cianjur. Sumbangan terbesar pada tahun 2017 dihasilkan oleh kategori Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel IV.9. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2020

No (1)	Lapangan Usaha (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13 839 863	15 098 615	15 642 052
2	Pertambangan dan Penggalian	97 644	98 666	99 473
3	Industri Pengolahan	2 908 819	3 272 024	3 356 159
4	Pengadaan Listrik dan Gas	41 558	42 567	41 658
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15 530	17 470	20 616
6	Konstruksi	3 563 839	3 852 942	3 616 188
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7 404 109	7 907 159	7 498 020
8	Transportasi dan Pergudangan	4 124 923	4 583 216	4 635 737
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2 645 056	2 934 933	2 973 921



No (1)	Lapangan Usaha (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)
10	Informasi dan Komunikasi	1 289 262	1 372 308	1 672 049
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	991 312	1 064 306	1 072 731
12	Real Estate	799 824	893 171	911 138
13	Jasa Perusahaan	286 718	326 523	280 064
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 097 565	1 151 671	1 152 640
15	Jasa Pendidikan	1 849 021	2 107 371	2 287 224
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	351 172	383 254	397 134
17	Jasa Lainnya	1 665 030	1 849 857	1 866 686
PDRB		32.349.715,0	42 971 245	46 956 052

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021

Pada tabel diatas menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur setiap tahunnya mengalami peningkatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Dapat dilihat pada tahun 2020 sebesar 46.956.052 rupiah.

Kontribusi sektor tertinggi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Cianjur sektor tertinggi yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai PDRB sebesar 15.642.052 rupiah. Hal ini terbukti karena Kabupaten Cianjur merupakan penghasil beras terbesar di Jawa Barat dan menjadi lumbung padi nasional. Selain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor yang berkontribusi tinggi terhadap PDRB Kabupaten Cianjur yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai PDRB 7.498.020 rupiah dan transportasi dan pergudangan dengan nilai PDRB 4.635.737 rupiah.

Tabel IV.10. Persentase Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Cianjur 2018-2020

No (1)	Lapangan Usaha (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,21	32,15	32,91
2	Pertambangan dan Penggalian	0,23	0,21	0,21
3	Industri Pengolahan	6,77	6,97	7,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04
6	Konstruksi	8,29	8,21	7,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,23	16,84	15,78
8	Transportasi dan Pergudangan	9,6	9,76	9,75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,16	6,25	6,26
10	Informasi dan Komunikasi	3	2,92	3,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,27	2,26
12	Real Estate	1,86	1,9	1,92
13	Jasa Perusahaan	0,67	0,7	0,59



No (1)	Lapangan Usaha (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,55	2,45	2,43
15	Jasa Pendidikan	4,3	4,49	4,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,82	0,84
17	Jasa Lainnya	3,87	3,94	3,93
PDRB		100	100	100

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 32,91 % di tahun 2020. Selain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, dan sektor konstruksi juga memberikan transportasi dan pergudangan besar dengan nilai 15,78% dan 9,75%.

4.6. POTENSI DAERAH

1. Pertanian

Cianjur terkenal sebagai lumbung padi dan memiliki komoditas padi unggulan jenis pandanwangi. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur, ini terbukti dengan terkenalnya produksi beras Cianjur di seluruh Indonesia. Kabupaten Cianjur sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu penghasil padi terbesar di Jawa Barat. Padi yang dihasilkan para petani di Kabupaten Cianjur sangat dikenal tidak hanya di wilayah Jawa Barat tetapi sudah diakui oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

a. Tanaman Pangan

Tabel IV.11. Luas Tanam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur 2018 (hektar)

No (1)	Kecamatan (2)	Padi (3)	Ubi Kayu (4)	Ubi Jalar (5)	Kacang Kedelai (6)	Kacang Hijau (7)	Jagung (8)
1	Agrabinta	8.177,9	53	0,0	30,0	24,0	349,0
2	Leles	3.968,1	27	10,0	372,4	4,0	241,5
3	Sindangbarang	9.660,1	800	0,0	421,1	6,0	1.475,5
4	Cidaun	7.575,6	1.127	94,0	926,5	79,0	1.665,8
5	Naringgul	5.926,4	4	2,0	288,5	0,0	712,4
6	Cibinong	7.051,8	215	10,0	434,6	7,0	1.205,0
7	Cikadu	5.995,4	56	7,0	414,6	6,0	876,0
8	Tanggeung	4.611,7	506	52,6	238,4	0,0	267,8



No (1)	Kecamatan (2)	Padi (3)	Ubi Kayu (4)	Ubi Jalar (5)	Kacang Kedelai (6)	Kacang Hijau (7)	Jagung (8)
9	Pasirkuda	3.929,2	49	8,0	0,0	0,0	220,0
10	Kadupandak	9.457,5	223	30,0	58,0	0,0	365,0
11	Cijati	3.819,6	10	4,0	144,3	1,0	23,0
12	Takokak	3.561,0	86	45,0	0,0	0,0	36,0
13	Sukanagara	1.721,7	25	33,0	0,0	0,0	253,0
14	Pagelaran	9.085,2	21	23,0	175,4	0,0	320,0
15	Campaka	3.921,0	882	42,8	0,0	0,0	1.236,3
16	Campaka Mulya	4.366,1	7	3,0	0,0	0,0	132,0
17	Cibeber	6.494,6	362	25,0	192,4	0,0	374,0
18	Warungkondang	4.906,6	1	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Gekbrong	3.164,7	11	12,0	0,0	0,0	17,0
20	Cilaku	6.637,2	0	0,0	293,4	0,0	0,0
21	Sukaluyu	5.198,7	0	2,0	527,1	0,0	40,0
22	Bojongpicung	5.971,4	12	0,0	588,7	0,0	259,0
23	Haurwangi	2.940,6	45	21,7	301,1	8,9	206,6
24	Ciranjang	4.105,4	10	6,0	608,8	0,0	21,0
25	Mande	3.983,2	139	0,0	192,4	0,0	255,6
26	Karangtengah	6.208,8	3	50,1	218,4	0,0	78,9
27	Cianjur	2.748,2	11	8,9	0,0	0,0	16,7
28	Cugenang	4.410,9	11	12,9	0,0	0,0	15,0
29	Pacet	928,2	0	0,0	0,0	0,0	34,6
30	Cipanas	346,2	14	13,0	0,0	0,0	34,0
31	Sukaresmi	4.907,3	65	8,0	0,0	0,0	117,0
32	Cikalongkulon	6.111,9	243	69,0	0,0	27,0	224,6
	Cianjur	161.892,2	5.018	593,0	6.426,1	162,9	11.072,3

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel diatas luas tanam padi terbesar berada di Kecamatan Kadupandak dengan luas tanam 9.457,5 hektar. Luas tanam ubi kayu terbesar berada di Kecamatan Cidaun dengan luas tanam 1.127 hektar. Luas tanam ubi jalar terbesar berada di Kecamatan Cidaun dengan luas tanam 94,0 hektar. Luas tanam kacang kedelai terbesar berada di Kecamatan Cidaun dengan luas tanam 926,5 hektar. Luas tanam kacang hijau terbedar berada di Kecamatan Cidaun dengan luas tanam 79,0 hektar. Dan untuk luas tanam jagung terbesar berada di Kecamatan Cidaun dengan luas tanam 1.665,8 hektar.



Gambar IV.25. Hasil Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Cianjur

b. Hortikultura

Selain sektor tanaman pangan khususnya padi yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Cianjur. Sektor hortikultura juga menjadi salah satu sektor unggulan dengan berbagai jenis tanaman hortikultura. Untuk lebih jelasnya luas tanam dan produksi hortikultura di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.12. Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Cianjur Tahun 2020 (hektar)

No	Kecamatan	Kacang Panjang	Bawang Putih	Cabai Besar	Cabai Rawit	Kubis	Tomat	Petsai
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Agrabinta	20	0	27	7	0	3	0
2	Leles	6	0	0	0	0	0	0
3	Sindangbarang	20	0	50	25	0	0	5
4	Cidaun	0	0	20	7	0	1	0
5	Naringgul	0	0	8	2	1	5	0
6	Cibinong	4	0	75	26	0	13	0
7	Cikadu	2	0	85	41	15	2	11
8	Tanggeung	12	0	22	16	0	0	0
9	Pasirkuda	7	0	59	15	20	7	18
10	Kadupandak	13	0	13	21	0	14	4
11	Cijati	6	0	4	0	0	3	0
12	Takokak	5	5	300	182	18	74	0
13	Sukanagara	4	46	115	54	65	71	64



No	Kecamatan	Kacang Panjang	Bawang Putih	Cabai Besarr	Cabai Rawit	Kubis	Tomat	Petsai
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Pagelaran	14	0	9	11	0	7	0
15	Campaka	94	30	319	277	212	231	201
16	Campaka Mulya	8	45	86	29	21	34	28
17	Cibeber	8	0	13	9	0	4	0
18	Warungkondang	8	15	26	19	26	29	43
19	Gekbrong	6	22	86	65	27	90	20
20	Cilaku	6	0	1	3	0	3	0
21	Sukaluyu	0	0	4	0	0	0	0
22	Bojongpicung	2	0	4	0	0	0	0
23	Haurwangi	4	0	42	10	0	4	0
24	Ciranjang	19	0	26	13	0	0	0
5	Mande	21	0	45	20	0	5	0
26	Karangtengah	7	0	0	1	0	1	0
27	Cianjur	2	0	0	0	0	2	0
28	Cugenang	21	50	52	94	153	300	124
29	Pacet	0	74	59	34	137	23	97
30	Cipanas	0	5	36	38	224	55	159
31	Sukaesmi	38	10	22	21	3	26	8
32	Cikalongkulon	190	0	150	120	0	75	0
	Cianjur	547	302	1.758	1.160	922	1.082	782

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021



Gambar IV.26. Hasil Panen Tanaman Sayuran di Kabupaten Cianjur



2. Pariwisata

Daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Cianjur beraneka ragam, diantaranya terdiri dari wisata alam, pertanian (agrowisata) dan wisata budaya yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi daya tarik kunjungan wisata. Daya tarik alam pegunungan merupakan andalan Kabupaten Cianjur, selain potensi perkebunan hortikultura yang dikembangkan sebagai wisata agro. Wisata yang tersedia di Kabupaten Cianjur diantaranya sebagai berikut:

a. Kebun Raya Cibodas

Kebun Raya Cibodas terletak di Kompleks Hutan [Gunung Gede](#) dan [Gunung Pangrango](#), [Desa Cimaican](#), Cipanas, [Cianjur](#), [Jawa Barat](#). Topografi lapangannya bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian kurang lebih 1.300 s.d. 1.425 meter di atas permukaan laut dengan luas 84,99 hektar. Temperatur rata-rata 20,06 °C, kelembaban 80,82 % dan rata-rata curah hujan 2.950 mm per tahun.



Gambar IV.27. Kebun Raya Cibodas



b. Istana Cipanas

Istana Cipanas yang merupakan Istana Kepresidenan yang menjadi salah satu wisata budaya yang ada di Kabupaten Cianjur. Istana Cipanas yang sering disebut dengan Istana Kepresidenan terletak di kaki [Gunung Gede, Jawa Barat](#). Tepatnya lebih kurang 103 km dari [Jakarta](#) ke arah [Bandung](#) melalui Puncak. Istana ini terletak di [Desa Cipanas](#), kecamatan [Cipanas](#), [Kabupaten Cianjur](#). Luas areal kompleks istana ini lebih kurang 26 hektare, namun sampai saat ini hanya 7.760 m² yang digunakan untuk bangunan. Selebihnya dipenuhi dengan tanaman dan kebun tanaman hias yang asri, kebun sayur dan tanaman lain yang ditata seperti hutan kecil.



Gambar IV.28. Istana Cipanas

c. Taman Nasional Gede Pangrango Rarahan

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) adalah salah satu Wisata Alam yang bisa Anda nikmati di kawasan Wisata Cibodas. Gunung Gede Pangrango inilah yang menjadi sumber keindahan bagi alam sekitar termasuk wisata alam lainnya seperti [Kebun Raya Cibodas](#) dan [Bumi Perkemahan Mandalawangi](#). Memiliki luas 21.975 hektare, kawasan Taman



Nasional ini ditutupi oleh hutan hujan tropis pegunungan sehingga memiliki peranan penting dalam sejarah konservasi di Indonesia.



Gambar IV.29. Taman Nasional Gede Pangrango Rarahan

d. Taman Bunga Nusantara

Taman Bunga Nusantara adalah sebuah taman bunga seluas 35 hektare yang terletak dekat Gunung Gede Pangrango dan Kebun Teh Bogor. Taman yang mulai dirintis tahun 1992 dan diresmikan tahun 1995 ini memiliki luas sama dengan lebih dari 1/3 [Kebun Raya Bogor](#) yang 87 hektar.



Gambar IV.30. Kebun Bunga Nusantara



e. Pantai Jayanti

Pantai Jayanti berdekatan dengan Cagar Alam Bojonglarang, pelabuhan nelayan, Pantai Rancabuaya dan Pantai Santolo. Akses menuju pantai bisa melalui 3 rute umum yaitu menempuh jalur 1) Cianjur – Cianjur – Cibeber – Sukanagara – Tanggeng – Sindangbarang – Cidaun - Pelabuhan Jayanti, 2) Garut-Pamengpeuk-Santolo-Rancabuaya-Cidaun-Pantai Jayanti, 3) Ciwidey – Rancabali – Naringgul – Cidaun - Pantai Jayanti. Karena Pantai Jayanti merupakan pantai bagian selatan Indonesia. Pantai Jayanti terletak di Desa Cidamar, Cidaun, Cianjur ini menawarkan pantai pasir yang cukup panjang dengan batu karang yang dihantam ombak samudra.



Gambar IV.31. Pantai Jayanti

BAB V

ANALISIS KEWILAYAHAN



5.1. ANALISIS PENENTUAN CALON LOKASI KECAMATAN IBUKOTA KABUPATEN PERSIAPAN

Dalam menentukan lokasi calon ibukota kabupaetn persiapan Cianjur Selatan, dilakukan dengan mengidentifikasi kawasan perkotaan, kesamaan karakteristik fisik wilayah, kedekatan lokasi geografi, dan aspirasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis akan menghasilkan berbagai alternatif lokasi calon ibukota kabupaten persiapan.

A. Analisis Kawasan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kawasan perkotaan adaah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan



jasapemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, Analisis kawasan perkotaan dilakukan untuk mengetahui wilayah mana saja yang memenuhi kriteria sebagai kota. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai kota jika memiliki ciri-ciri seperti berikut ini:

Tabel 5.1 Indikator Kawasan Perkotaan

No	Karakteristik	Indikator	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fisik	Penggunaan Lahan	Penggunaan Lahan Pertanian <25%
		Ketersediaan Sarana dan Utilitas	Ketersediaan Sarana Pendidikan Tinggi
			Ketersediaan Sarana Kesehatan Tinggi
		Pelayanan Listrik	>67,2% terlayani listrik
2	Sosial Kependudukan	Kepadatan Listrik	Kepadatan penduduk tinggi
		Laju Pertumbuhan penduduk	>1,55
3	Ekonomi	Mata pencaharian	20%-40% penduduk bermata pencaharian sektor pertanian

Sumber: Kurnianingsih, 2016

Dari indikator kawasan perkotaan ini, kemudian dilakukan analisis skoring terhadap 14 Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah perencanaan (kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur bagian selatan). Berikut hasil analisis skoring identifikas kawasan perkotaan di Kabupaten Cianjur bagian selatan.



Tabel 5.2 Analisis Kawasan Perkotaan

No	Kecamatan	Indikator Perkotaan											Ket
		Penggunaan Lahan Pertanian <25%		Ketersediaan Sarana Pendidikan Sangat Tinggi		Ketersediaan Sarana Kesehatan Sangat Tinggi		>67,2% Terlayani Listrik	Kepadatan Penduduk Tinggi (Jiwa/Ha)		Laju Pertumbuhan Penduduk >1,55	Penduduk Petani 20%-40%	
		Penggunaan Lahan Pertanian (Ha)	Lahan (%)	Sarana	Kelas	Sarana	Kelas	Listrik (%)	Kepadatan Penduduk	Kelas			
		Skor 1		Skor 2		Skor 3		Skor 4	Skor 5		Skor 6	Skor 7	
1.	Agrabinta	15.302,50	77,77%	81	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	53,36	2	Rendah	0,95	20%	2
2.	Cibinong	16.614,31	69,84%	217	Rendah	8	Rendah	75,09	3	Rendah	1,01	12%	3
3.	Cidaun	20.621,57	69,50%	238	Rendah	6	Rendah	83,56	2	Rendah	0,78	13%	2
4.	Cijati	4.352,80	89,19%	233	Rendah	8	Rendah	89,83	7	Rendah	0,50	6%	3
5.	Cikadu	12.656,57	67,25%	65	Sangat Rendah	4	Sangat Rendah	72,95	2	Rendah	0,64	12%	3
6.	Kadupandak	8.935,38	85,83%	85	Sangat Rendah	5	Sangat Rendah	75,45	5	Rendah	0,80	10%	2
7.	Leles	8.884,62	78,90%	65	Sangat Rendah	3	Sangat Rendah	79,83	3	Rendah	0,10	17%	2
8.	Naringgul	16.621,05	58,65%	80	Sangat Rendah	5	Sangat Rendah	76,32	2	Rendah	0,59	19%	3
9.	Pagelaran	9.107,38	45,81%	86	Sangat Rendah	6	Rendah	70,95	4	Rendah	1,02	5%	2
10.	Pasirkuda	3.940,01	36,22%	76	Sangat Rendah	3	Sangat Rendah	52,69	3	Rendah	0,97	9%	3
11.	Sindangbarang	10.750,34	65,81%	99	Sangat Rendah	4	Sangat Rendah	76,34	4	Rendah	1,19	11%	1
12.	Sukanagara	1.533,29	8,83%	143	Sangat Rendah	6	Rendah	85,00	3	Rendah	1,31	5%	1
13.	Takokak	8.160,10	57,61%	163	Sangat Rendah	5	Sangat Rendah	70,45	4	Rendah	0,22	13%	3
14.	Tanggeung	4.602,22	69,75%	232	Rendah	5	Sangat Rendah	77,37	8	Rendah	1,21	6%	3

Sumber: Analisis, 2021



Berdasarkan hasil analisis kawasan perkotaan dari tabel di atas, dari 14 (empat belas) kecamatan yang termasuk dalam wilayah Cianjur bagian Selatan sesuai dengan penjelasan di KAK, terdapat 2 (dua) Kecamatan yang memenuhi syarat sebagai kawasan perkotaan, yaitu:

1. Kecamatan Sukanagara
2. Kecamatan Sindangbarang

Sedangkan untuk 12 (dua belas) kecamatan lainnya di wilayah identifikasi lokasi calon ibukota tidak memenuhi persyaratan sebagai kawasan perkotaan. Klasifikasi kategori kawasan perkotaan sesuai paramater dapat dilihat pada tabel berikut.

Kategori Kawasan Perkotaan (Nilai skor 1)	Kategori Kawasan Perkotaan-Perdesaan (Nilai skor 2)	Kategori Kawasan Perdesaan (Nilai skor 3)
Sindangbarang Sukanagara	Agrabinta Cidaun Kadupandak Leles Pagelaran	Cibinong Cijati Cikadu Naringgul Pasirkuda Takokak Tanggeung

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditemukan kesimpulan bahwa opsi lokasi calon lokasi ibukota kabupaten persiapan Cianjur Selatan adalah Kecamatan Sindangbarang dan Kecamatan Sukanagara, sesuai dengan parameter karakteristik kawasan perkotaan yang diperlukan sebagai syarat penentuan lokasi calon ibukota skala kabupaten.

5.2. ANALISIS KARAKTERISTIK FISIK WILAYAH

Analisis karakteristik fisik wilayah dilakukan untuk mengetahui wilayah mana saja yang memiliki kemiripan dan kesetaraan secara fisik. Dengan adanya kesamaan karakteristik wilayah akan memudahkan dalam melakukan pengembangan wilayah ke depannya. Pada analisis karakteristik ini menggunakan beberapa indikator, antara lain:



1. Lokasi administrasi
2. Infrastruktur Jalan
3. Sarana Pendidikan
4. Sarana Kesehatan
5. Sarana Peribadatan
6. Penggunaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Analisis ini juga menggunakan analisis skoring, dimana setiap indikator memiliki bobot. Skor untuk penilaian skoring antara 1-3, skor 1 menunjukkan rendah, skor 2 menunjukkan sedang, dan skor 3 menunjukkan tinggi. Kemudian setiap skor dan bobot indikator dikalikan dan jumlahkan. Hasil akhir dari penjumlahan akan dikelaskan menjadi 2 kelas atau 2 kelompok wilayah, berdasarkan hasil jumlah skoring per masing-masing parameter yang diakumulasikan.

Untuk lebih jelasnya, perhitungan analisis karakteristik fisik kawasan perkotaan terpilih (Kecamatan Sindangbarang dan Kecamatan Sukanagara) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3 Perhitungan Analisis Karakteristik Fisik Wilayah di Kecamatan Sukanagara**

Desa	INDIKATOR						PENILAIAN						NILAI	KELAS
	Lokasi	Jalan	Pendidikan	Kesehatan	Sarana Ibadah	Pertanian Tanaman Pangan	Lokasi	Jalan	Pendidikan	Kesehatan	Sarana Ibadah	Pertanian Tanaman Pangan		
	45	15	10	10	10	10	Skor (Bobot)							
Jayagiri	1	3	1	1	2	1	45	45	10	10	20	10	140	II
Ciguha	1	1	1	1	2	1	45	15	10	10	20	10	110	II
Sukakarya	1	2	1	1	1	1	45	30	10	10	10	10	115	II
Sukarame	2	1	1	1	1	1	90	15	10	10	10	10	145	II
Sukalaksana	2	1	1	1	1	1	90	15	10	10	10	10	145	II
Sukanagara	2	2	2	2	2	1	90	30	20	20	20	10	190	II
Gunungsari	2	1	2	1	2	1	90	15	20	10	20	10	165	II
Sindangsari	1	1	2	1	1	2	45	15	20	10	10	20	120	II
Sukajembar	2	1	1	1	1	2	90	15	10	10	10	20	155	II
Sukamekar	1	1	2	1	2	2	45	15	20	10	20	20	130	II

Sumber : Hasil Analisis, 2021



Berdasarkan hasil analisis karakteristik fisik wilayah, dari 10 desa yang ada di Kecamatan Sukanagara, didapatkan hasil seluruh desa masuk ke dalam kelas heierarki II karena tidak ada desa yang mencapai angka akumulasi sebesar 200. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Pembagian Hierarki Desa di Kecamatan Sukanagara

Hierarki I	Hierarki II
-	Desa Jayagiri Desa Ciguha Desa Sukakarya Desa Sukarame Desa Gunungsari Desa Sindangsari Desa Sukajembar Desa Sukameka Desa Sukanagara Desa Sukalaksana r

**Tabel 5.5 Perhitungan Analisis Karakteristik Fisik Wilayah di Kecamatan Sindangbarang**

Desa	INDIKATOR						PENILAIAN						NILAI	KELAS
	Lokasi	Jalan	Pendidikan	Kesehatan	Sarana Ibadah	Pertanian Tanaman Pangan	Lokasi	Jalan	Pendidikan	Kesehatan	Sarana Ibadah	Pertanian Tanaman Pangan		
	45	15	10	10	10	10	Skor (Bobot)							
Hegarsari	1	3	1	1	2	1	45	45	10	10	20	10	140	II
Jatisari	1	1	1	1	2	1	45	15	10	10	20	10	110	II
Kertasari	1	2	1	1	1	1	45	30	10	10	10	10	115	II
Talagasari	2	2	2	1	1	1	90	30	20	10	10	10	170	II
Sirnagalih	2	1	1	1	1	1	90	15	10	10	10	10	145	II
Saganten	3	3	3	2	2	1	135	45	30	20	20	10	260	I
Jayagiri	3	2	2	2	2	1	135	30	20	20	20	10	235	I
Muaracikadu	1	1	2	1	1	2	45	15	20	10	10	20	120	II
Girimukti	2	2	1	1	1	2	90	30	10	10	10	20	170	II
Mekarlaksana	3	3	3	1	2	2	135	45	30	10	20	20	260	I
Kertamukti	1	3	1	1	1	1	45	45	10	10	10	10	130	II

Sumber : Hasil Analisis, 2021



Berdasarkan hasil analisis karakteristik fisik wilayah, dari 11 desa yang ada di Kecamatan Sindangbarang, didapatkan hasil 3 (tiga) Desa termasuk kedalam kelas I dan 8 (delapan) desa lainnya masuk ke dalam kelas II. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Pembagian Hierarki Desa di Kecamatan Sindangbarang

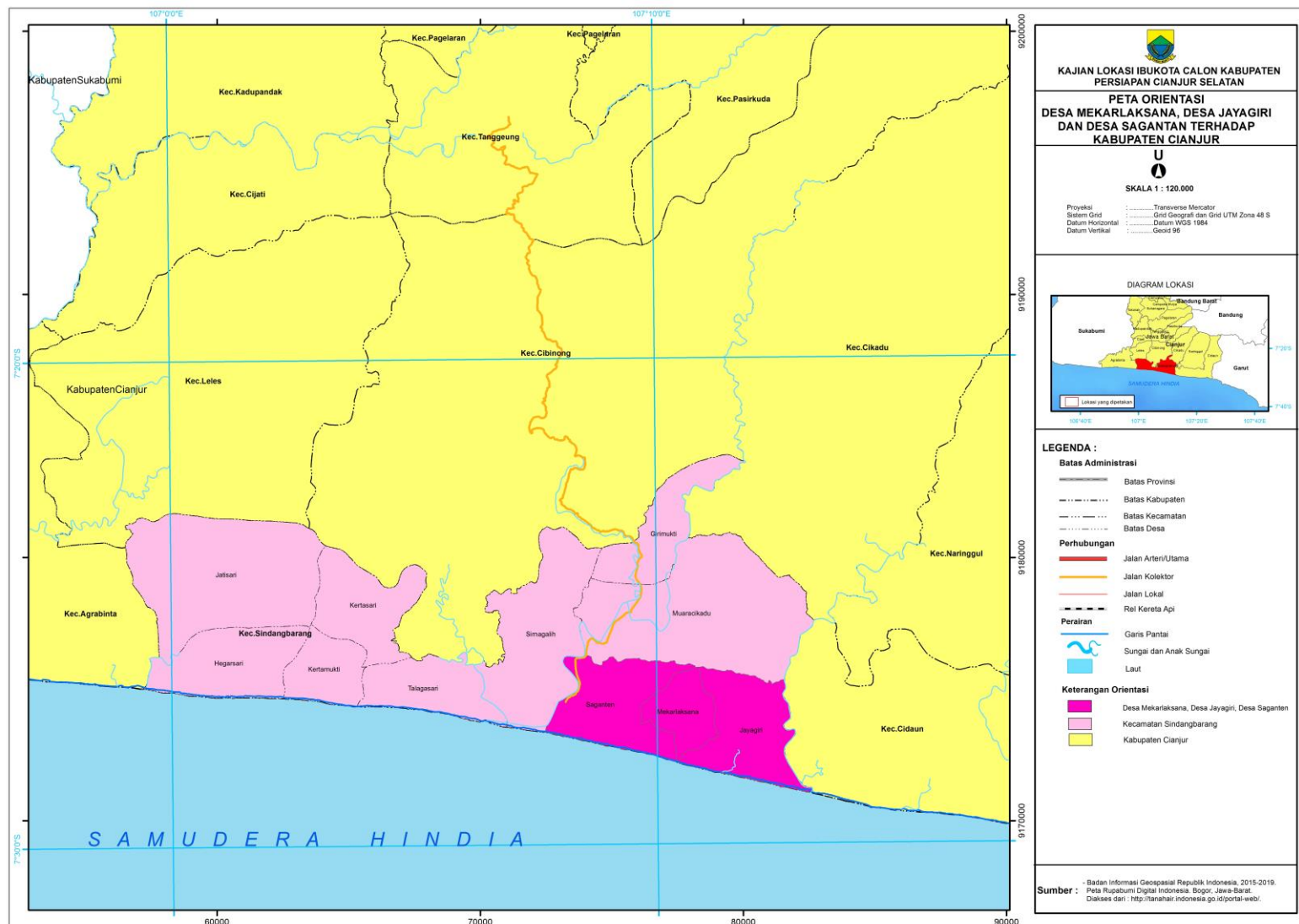
Hierarki I	Hierarki II
Desa Saganten Desa Jayagiri Desa Mekaraksana	Desa Hegarsari Desa Jatisari Desa Kertasari Desa Talagasari Desa Sirnagalih Desa Muaracikadu Desa Girimukti Desa Kertamukti

Akan tetapi, di dalam perhitungan tersebut di atas, desa di Kecamatan Sukanagara yang memiliki skor tertinggi berada di angka kurang dari 200, sedangkan desa yang memiliki skor tertinggi di Kecamatan Sindangbarang lebih dari 200, sehingga yang layak untuk dijadikan lokasi calon ibukota baru adalah desa yang berada di Kecamatan Sindangbarang.

Berikut ini adalah peta pembagian desa yang masuk ke dalam hierarki I dan hierarki II di Kecamatan Sindangbarang.



KAJIAN LOKASI IBUKOTA CALON KABUPATEN PERSIAPAN CIANJUR SELATAN

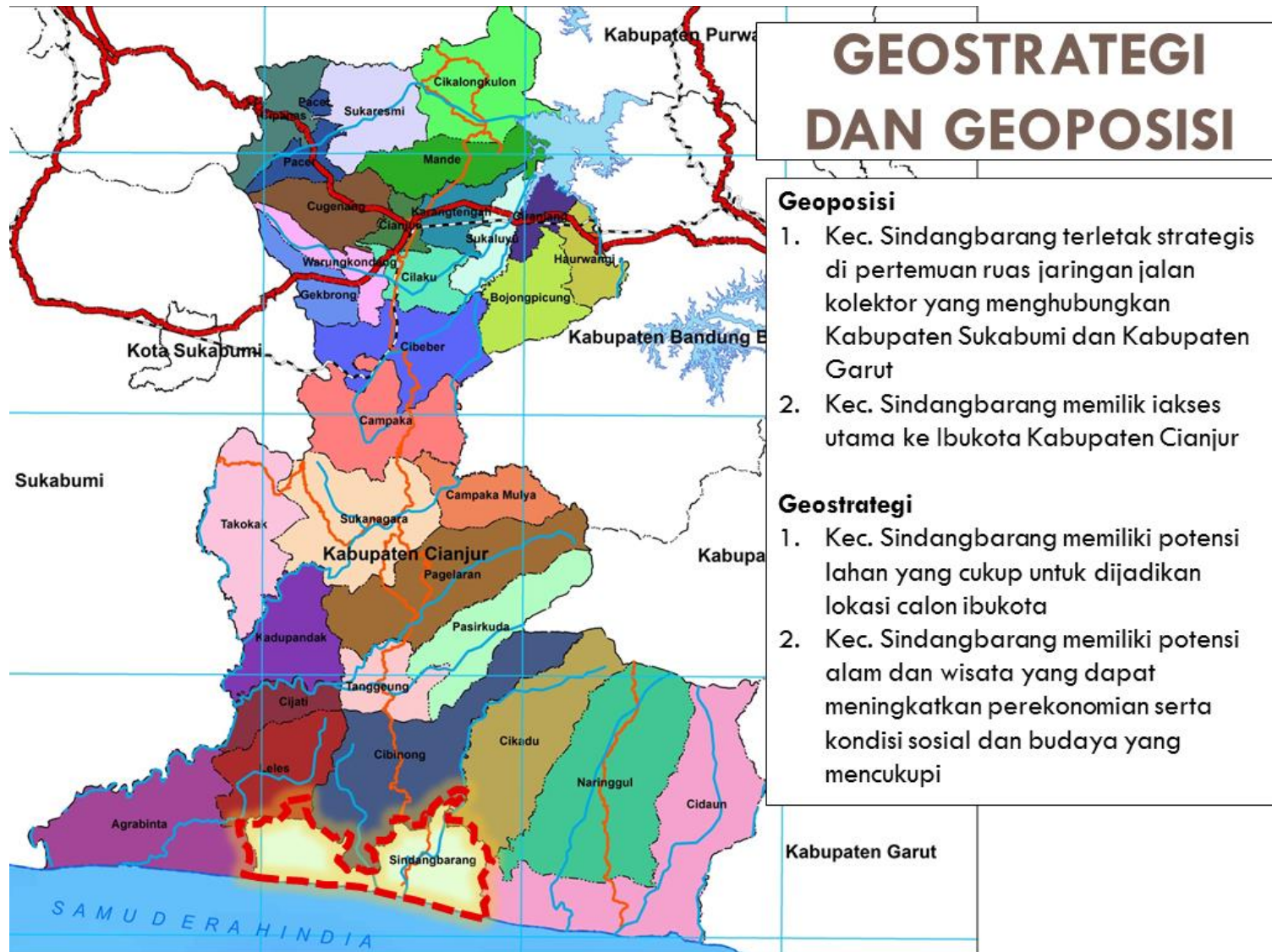


Gambar 5.1. Peta Pembagian Hierarki Desa di Kecamatan Sindangbarang



5.3. ANALISIS KETATA RUANGAN

- Gambaran aspek ketataruangan Desa Mekarlsakana dan Desa Saganten memiliki kedekatan dengan indikator kriteria titik ibu kota kecamatan dengan perkembangan Kecamatan Sindangbarang, dengan fungsi utama Kawasan Kegiatan Pemerintahan, yang ditunjang dengan kegiatan Pertanian dan peningkatan fasilitas perkantoran, Sosial, ekonomi.
- Hal ini lebih disebabkan wilayah Kecamatan Sindangbarang yang berpusat di Desa Mekarlsakana yang saat ini sebagai pusat pemerintahan dengan luasan lahan yang terbatas akan lebih difokuskan kepada pusat pendukung pemerintahan dalam hal ini menitikberatkan pada kawasan ekonomi
- Aspek Kebencanaan Relatif aman dari bencana banjir, longsor dan gempa bumi (berdasarkan peta kerawanan bencana).
- Perlu diperhatikan di wilayah Desa Mekarlsakana relatif aman dari ancaman bencana tsunami (tergolong menengah dibandingkan Desa Talagasari, Kertamukti dan Sirnagalih)



Gambar 5.2. Analisa Geoposisi dan Geostrategi Wilayah Kecamatan Sindangbarang

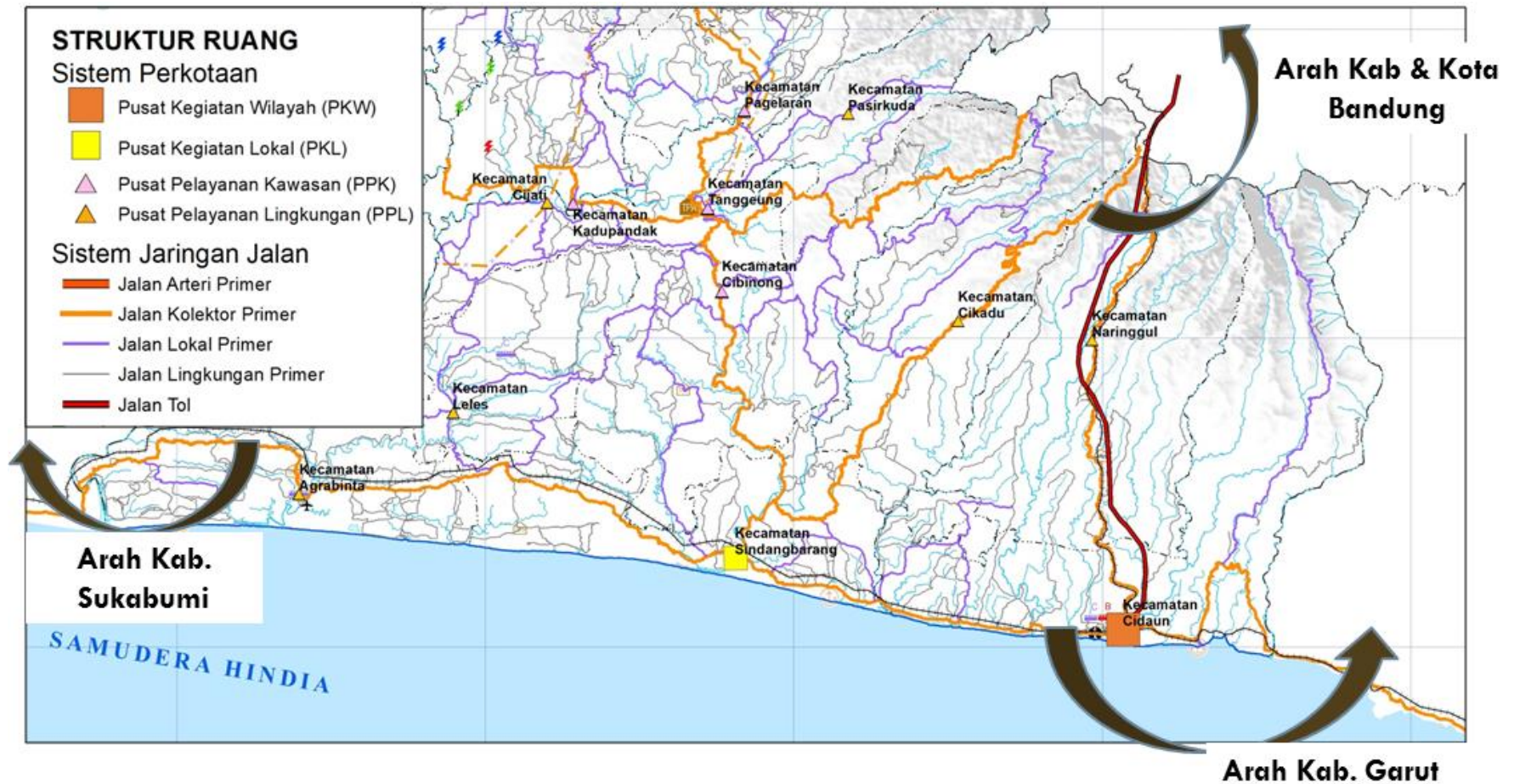


5.4. ANALISIS AKSESIBILITAS

- Aspek Kondisi jaringan ruas jalan Sirnagalih – Panyindangan; Ruas jalan Muara Cikadu-simpang Pancuhtilu-Cikadu-Kebonmuncang-Sukasari-Cirendeudeu di dalam rencana pengembangan struktur ruang pada Revisi RTRW Kabupaten Cianjur 2021-2041
- Rencana jaringan jalan provinsi yang menghubungkan Ruas Sukabumi – Cianjur ; dan Ruas Jalan yang menghubungkan Soreang – Ciwidey – Cidaun
- Namun demikian, dilapangan dapat kita temui dengan mengedepankan aspek kelayakan titik ibukota kabupaten yang relatif aman dari lintasan **jalan kolektor primer** dengan frekuensi kepadatan laju kendaraan yang tinggi, terdapat di **Hegarsari, Kertamukti, Talagasari, Sirnagalih, Saganten, dan Mekarlaksana.**



Gambar 5.3. Aksesibilitas Lokasi Pusat Kecamatan Sindangbarang

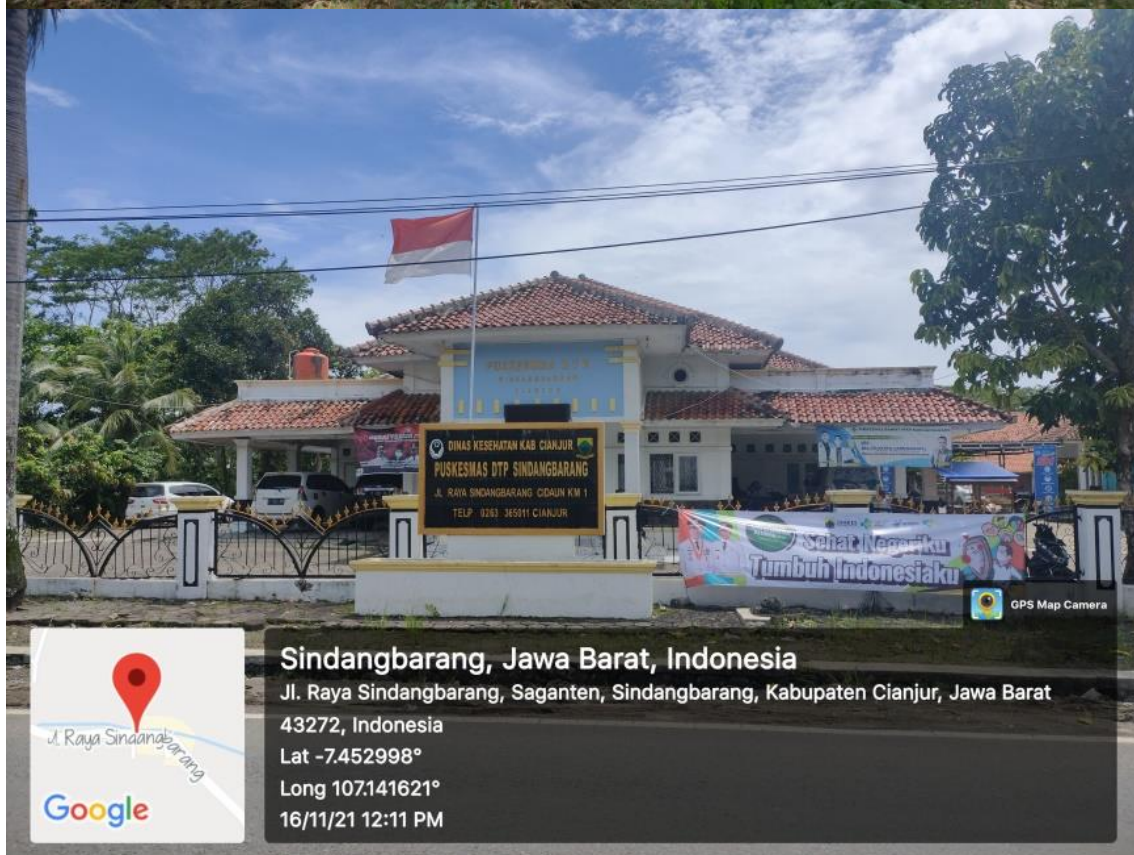


Gambar 5.4. Peta Aksesibilitas Wilayah Kecamatan Sindangbarang berdasarkan Struktur Ruang Kab. Cianjur



5.5. ANALISIS PEREKONOMIAN

- Fasilitas Sarana Perekonomian di wilayah perkotaan memang menunjukkan bahwa Desa Mekarlaksana menjadi pusat, sehingga untuk proses pengembangan selanjutnya titik tekan perekonomian akan lebih didukung oleh wilayah sekitarnya yaitu Desa Saganten dan Desa Jayagiri serta desa Muara Cikadu.
- Namun demikian Desa Mekarlaksana pun memiliki potensi perkembangan ekonomi yang cukup tinggi, hanya untuk mempersiapkan lokasi pemerintahan ibukota kabupaten, secara aspek ketersediaan lahan lebih luas dibandingkan Desa Saganten, sehingga akan lebih tepat seandainya Desa Mekarlaksana, yang masih cukup potensi lahan untuk disiapkan lokasi pusat pemerintahan sedangkan pengembangan ekonomi diarahkan pada strategi penunjang perkantoran dan pemerintahan.
- Dari tinjauan sosial budaya, sebagaimana kita ketahui bahwa Desa Mekarlaksana merupakan pemekaran dari Desa Saganten pada Tahun 2010.
- Pusat sosial dan budaya di Kecamatan Sindangbarang terdapat di Desa Saganten, yang ditandai dengan keberadaan Mesjid Al Jihad, Puskemas, RSUD Sindangbarang. Selain itu jumlah lembaga pendidikan di pusat kecamatan terdapat di Desa Mekarlaksana dan Desa Saganten
- Keberadaan Instansi Pemerintahan dengan kepemilikan tanah pemerintah di Desa Mekarlaksana lebih banyak dibanding dengan Desa lain di Kecamatan Sindangbarang, hal ini dimungkinkan untuk dapat dijadikan sebagai sebaran perkantoran pemerintahan, diantaranya OPD tingkat kabupaten serta Tanah Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Tanah Milik Desa





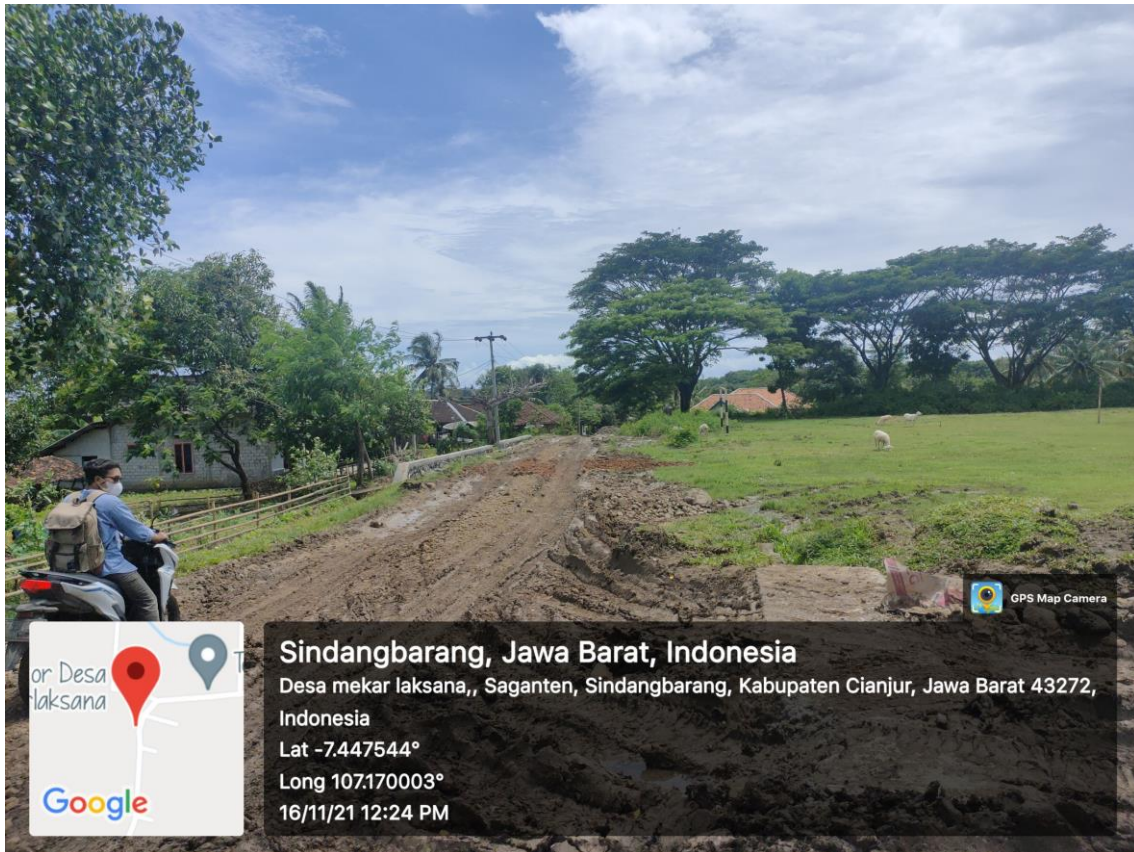
Gambar 5.5. Foto Sarana Umum dan Sarana Sosial di Kecamatan Sindangbarang

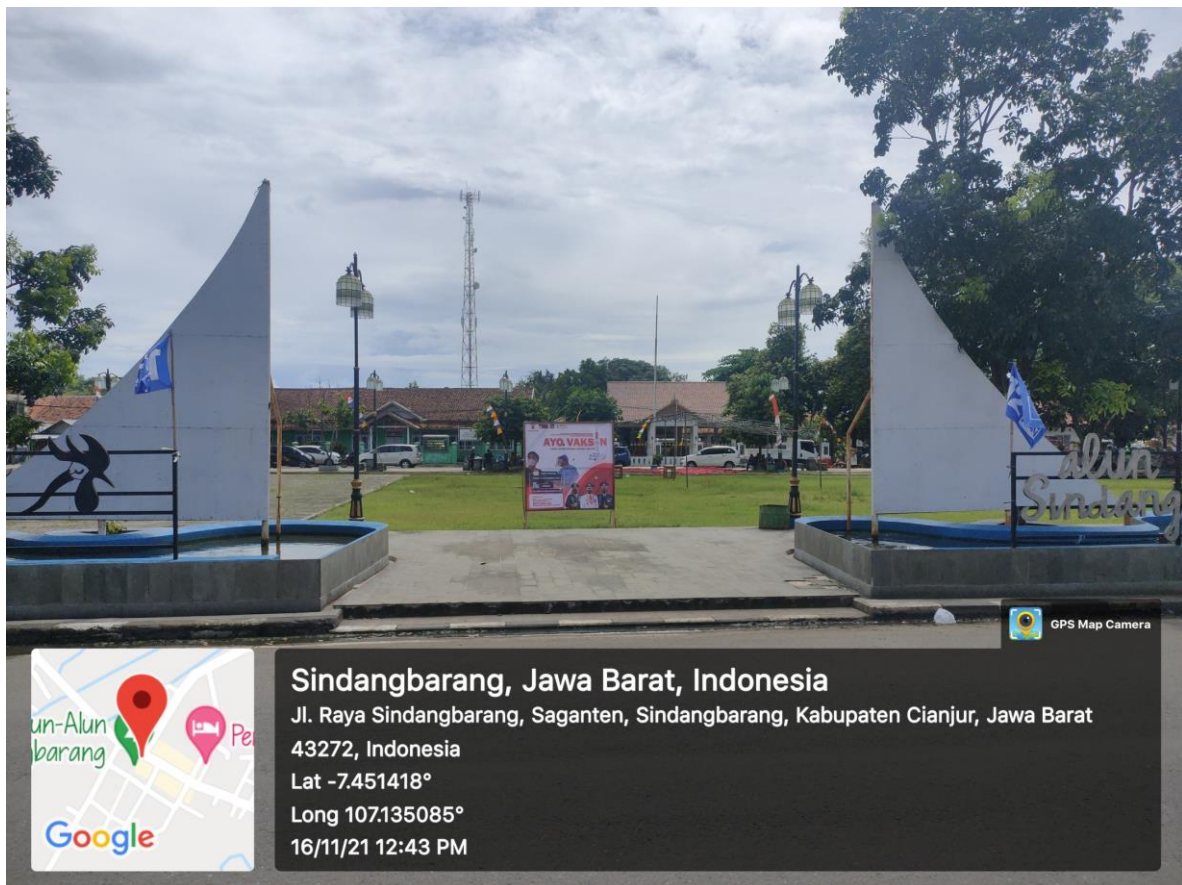


5.6. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN

Dalam pengembangan wilayah calon lokasi ibukota, diperlukan strategi pengembangan sebagai berikut

1. Mengoptimalkan potensi Kawasan Perkotaan Sindangbarang sebagai pusat pemerintahan dengan pusat pelayanan jasa pemerintahan dan sosial ekonomi kecamatan
2. Kegiatan pemerintahan ditempatkan secara terpusat dan dijadikan sebagai *landmark* Kabupaten
3. Prioritas pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada kegiatan perdagangan dan jasa penempatannya diarahkan terkonsentrasi di Desa Mekarlaksana.
4. Menciptakan daya tarik bagi seluruh Kawasan Perkotaan dengan penyebaran pusat-pusat pelayanan ke seluruh wilayah.
5. Prioritas pengembangan kegiatan permukiman yang dilakukan dengan penataan tapak serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya,
6. Pengembangan kegiatan lain untuk mendukung aktivitas kegiatan penduduk, seperti kegiatan olahraga dan rekreasi dan kegiatan industri rumah tangga dan atau kegiatan industri non polutif
7. Pengembangan sistem transportasi yang akan dibentuk oleh sistem jaringan jalan yang berhirarki dengan pola pergerakan lalu lintas yang diatur secara efisien dan terintegrasi
8. Mengarahkan distribusi penduduk Kawasan Perkotaan yang merata ke seluruh Kawasan Perkotaan dengan tingkat kepadatan yang memadai sesuai daya dukung lahannya
9. Fasilitas pelayanan yang akan dikembangkan di Desa Mekarlaksana di titik beratkan pada jenis fasilitas yang dapat mendukung dan mengoptimalkan fungsi dan peran Kecamatan Sindangbarang
10. Mengembangkan jaringan utilitas Kawasan Perkotaan Sindangbarang yang berhirarki dan terintegrasi dengan pengembangan jaringan utilitas yang lebih luas
11. Mengantisipasi dan memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya pertumbuhan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Sindangbarang terhadap kualitas lingkungan.

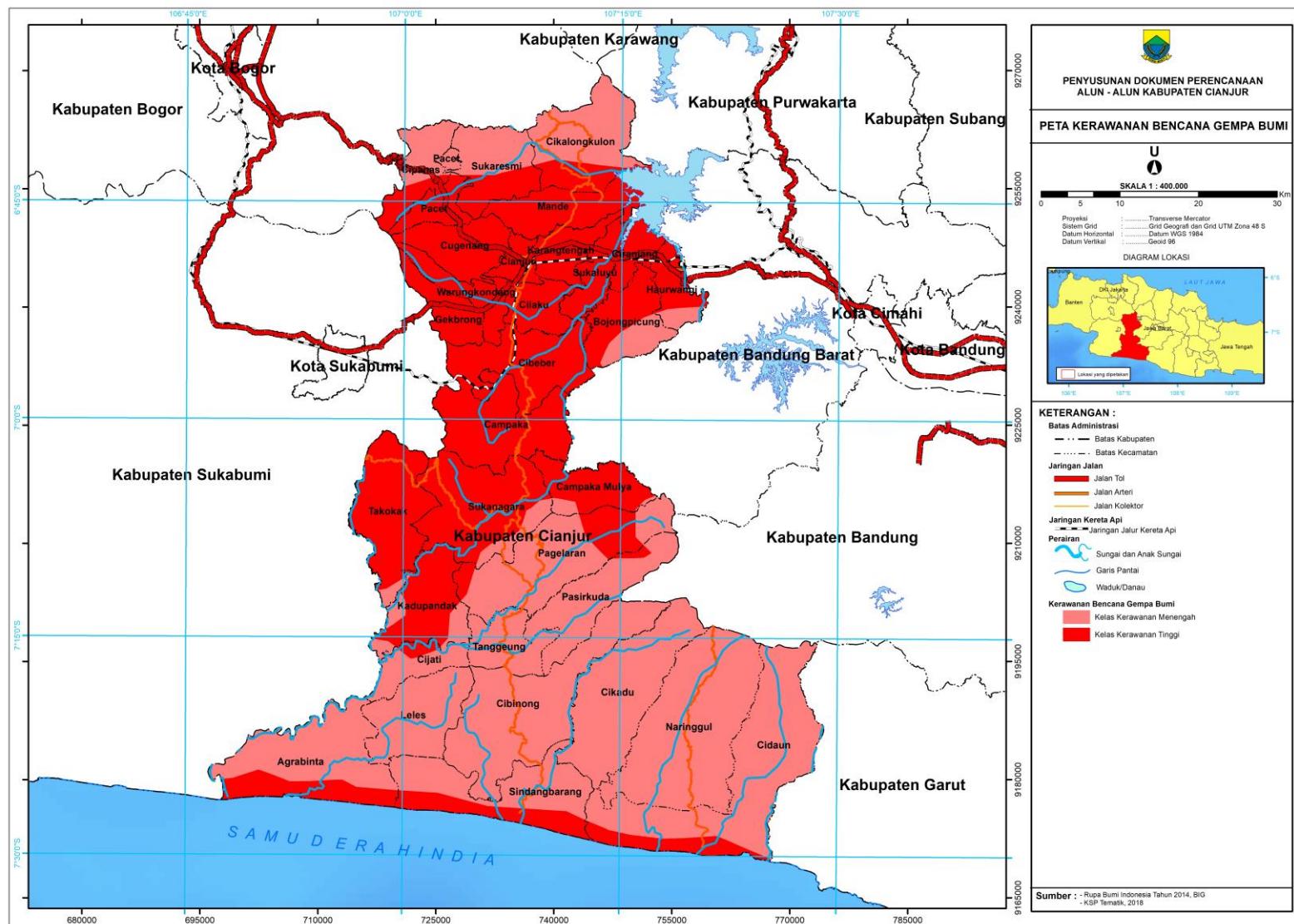




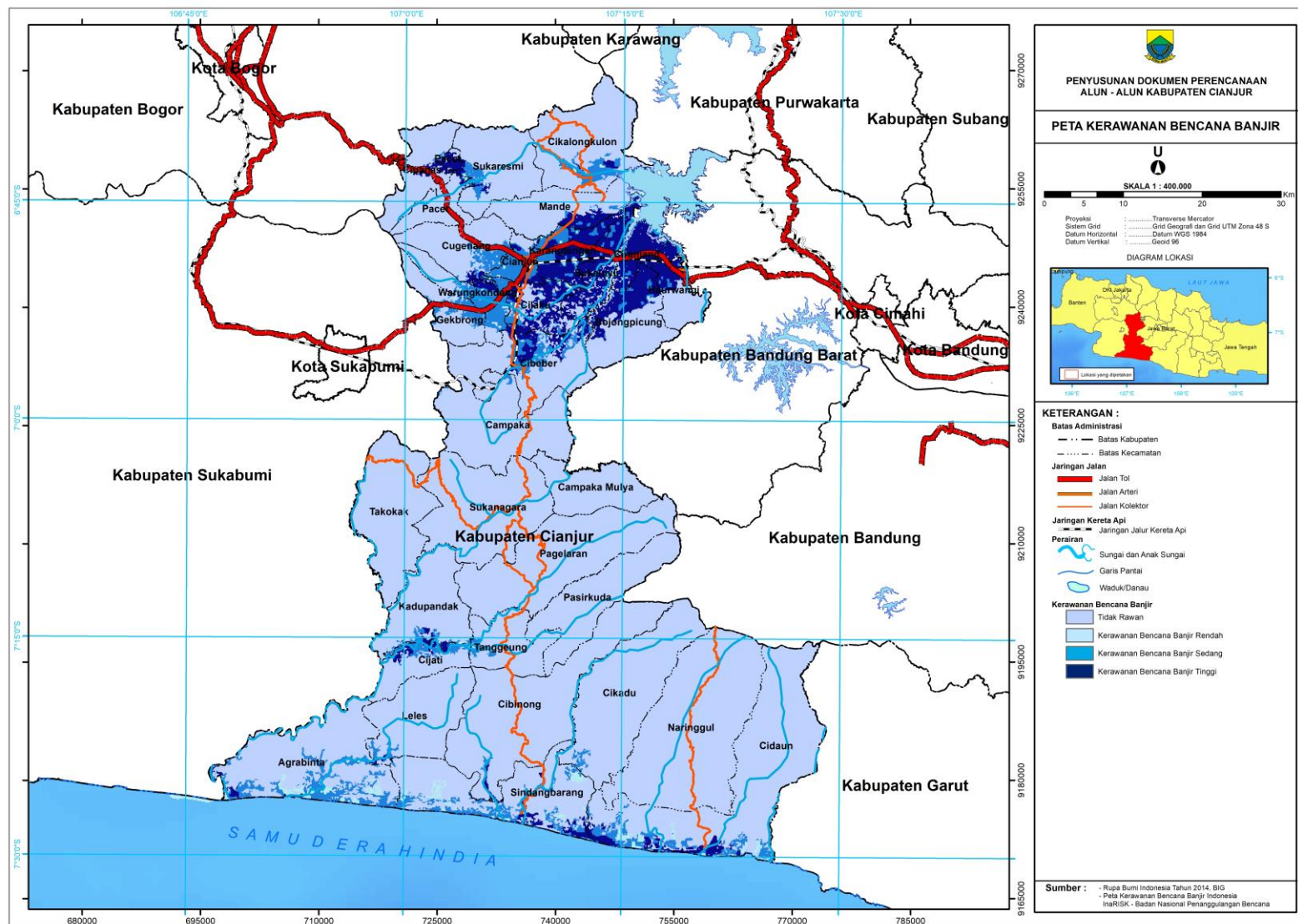
Gambar 5.6. Gambaran Lokasi Pusat Kegiatan di Kecamatan Sindangbarang

5.7. ANALISIS KERENTANAN TERHADAP BENCANA

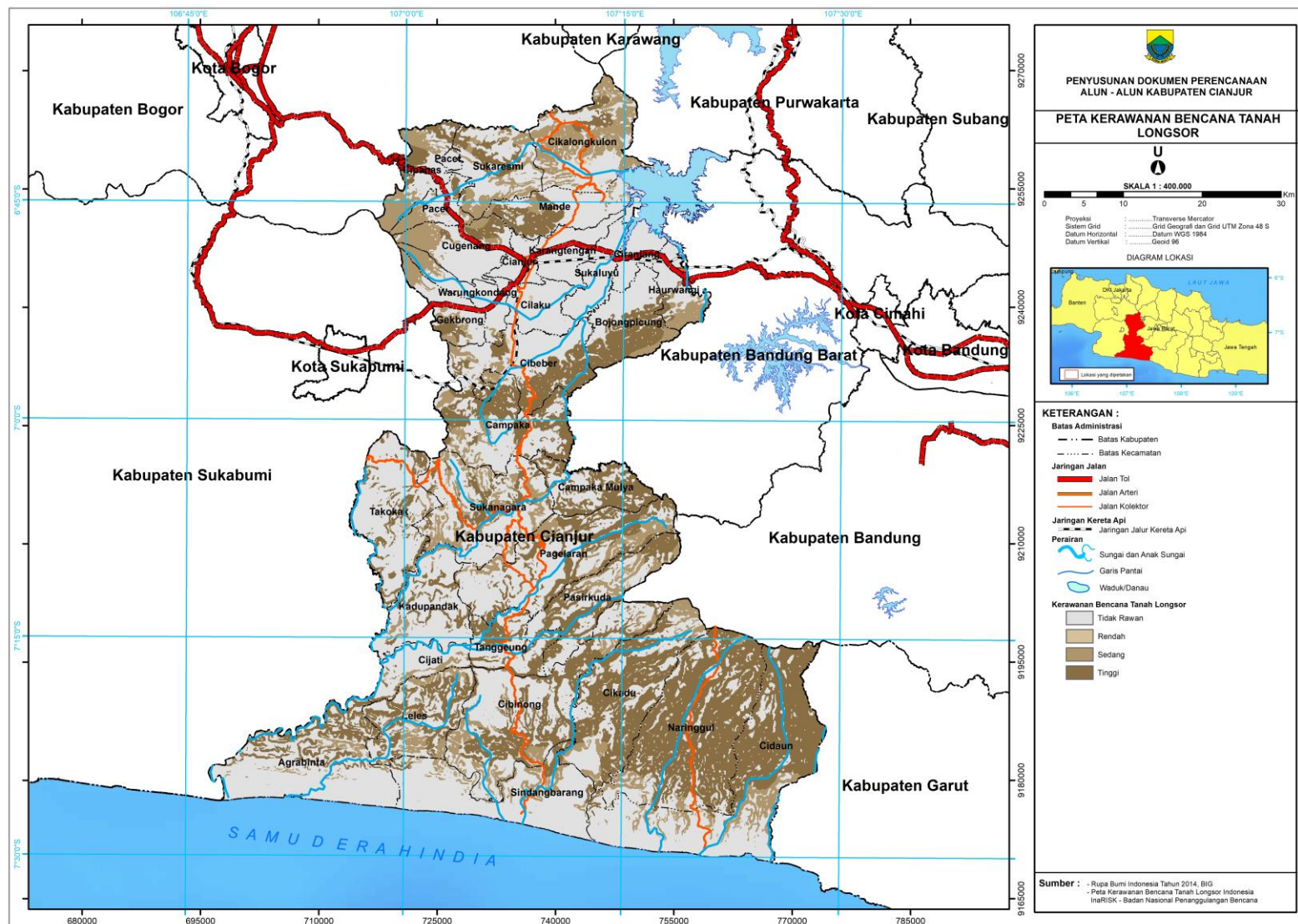
Wilayah Kabupaten Cianjur bagian selatan merupakan wilayah dengan dominasi dataran tinggi dan dataran rendah serta pesisir pantai dengan karakteristik wilayah yang beragam, sehingga memiliki kerentanan yang beragam terhadap bencana. Akan tetapi berdasarkan hasil overlay peta hidrologi, dengan peta-peta kerawanan bencana yang ada di Kabupaten Cianjur, terlihat Kecamatan Sindangbarang memiliki tingkat kerawanan yang minim dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di wilayah Cianjur bagian selatan, berikut merupakan peta-peta kerawanan bencana dengan skala Kabupaten Cianjur.



Gambar 5.7. Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi



Gambar 5.8. Peta Kerawanan Bencana Banjir



Gambar 5.9. Peta Kerawanan Bencana Tanah Longsor

- Alternatif utama lokasi calon ibukota Kab. Cianjur Selatan yaitu Lahan seluas 40 ha yang berada di Desa Mekarlaksana, tahap saat ini masih dalam tahap proses pemetaan (on progress)
- Alternatif lokasi seluas 99 ha di Desa Jayagiri (perbatasan dengan Desa Mekarlaksana)
- Kondisi eksisting saat ini masih lahan kosong dan kawasan permukiman penduduk
- Groundbreaking alun alun dan pendopo Bupati Cianjur selatan → sebelah alun-alun, perkiraan luas 5000 m²



Gambar 5.10. Lampiran Hasil Wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur

Sumber : Survei Primer Kecamatan Sindangbarang, 2021

BAB VI

KESIMPULAN



6.1. PENENTUAN CALON LOKASI IBUKOTA KABUPATEN PERSIAPAN

Dalam menentukan lokasi calon ibukota kabupaten persiapan Cianjur Selatan, dilakukan dengan mengidentifikasi kawasan perkotaan, kesamaan karakteristik fisik wilayah, kedekatan lokasi geografi, dan aspirasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis akan menghasilkan berbagai alternatif lokasi calon ibukota kabupaten persiapan dengan menggunakan analisis kriteria dan kelayakan yang dibutuhkan dalam kajian Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan berdasarkan parameter sebagai berikut:

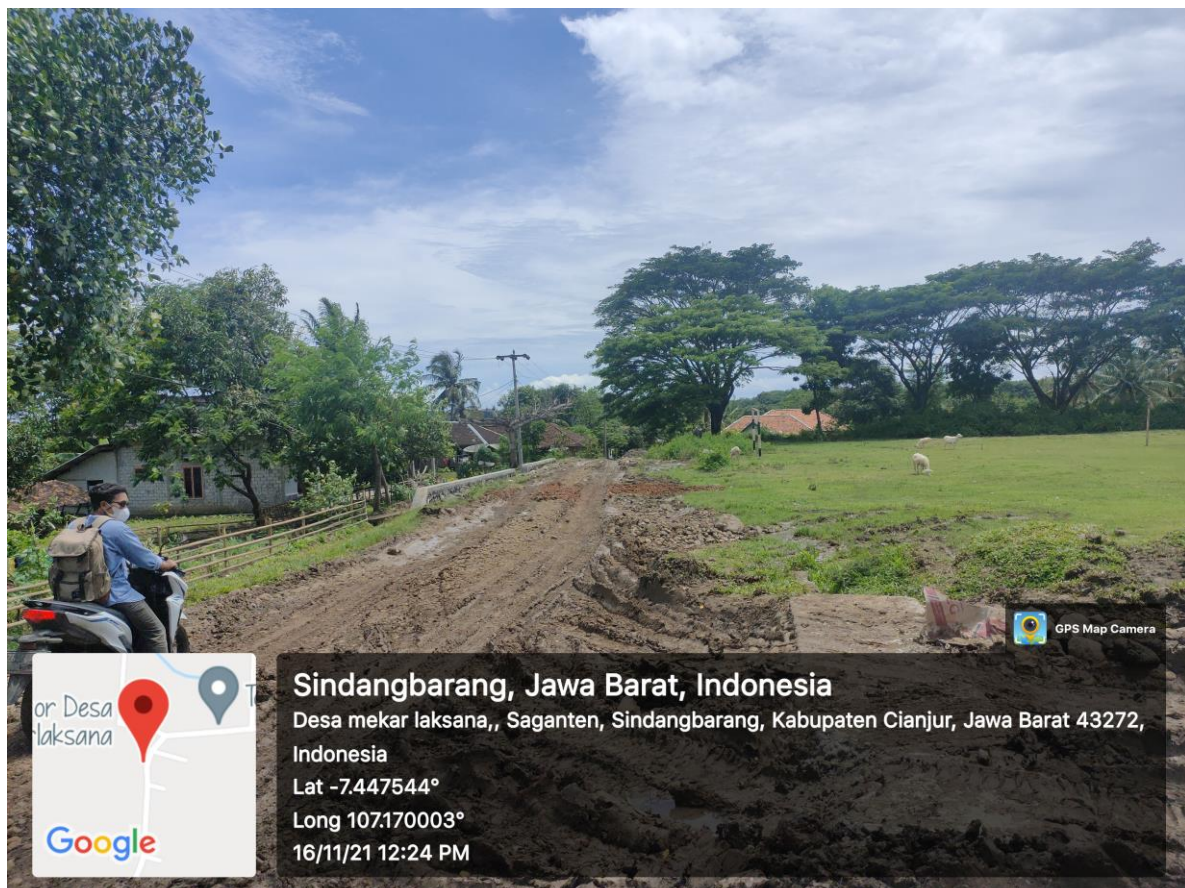
- kondisi geografis dan hidrologis
- kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang
- ketersediaan lahan Lokasi

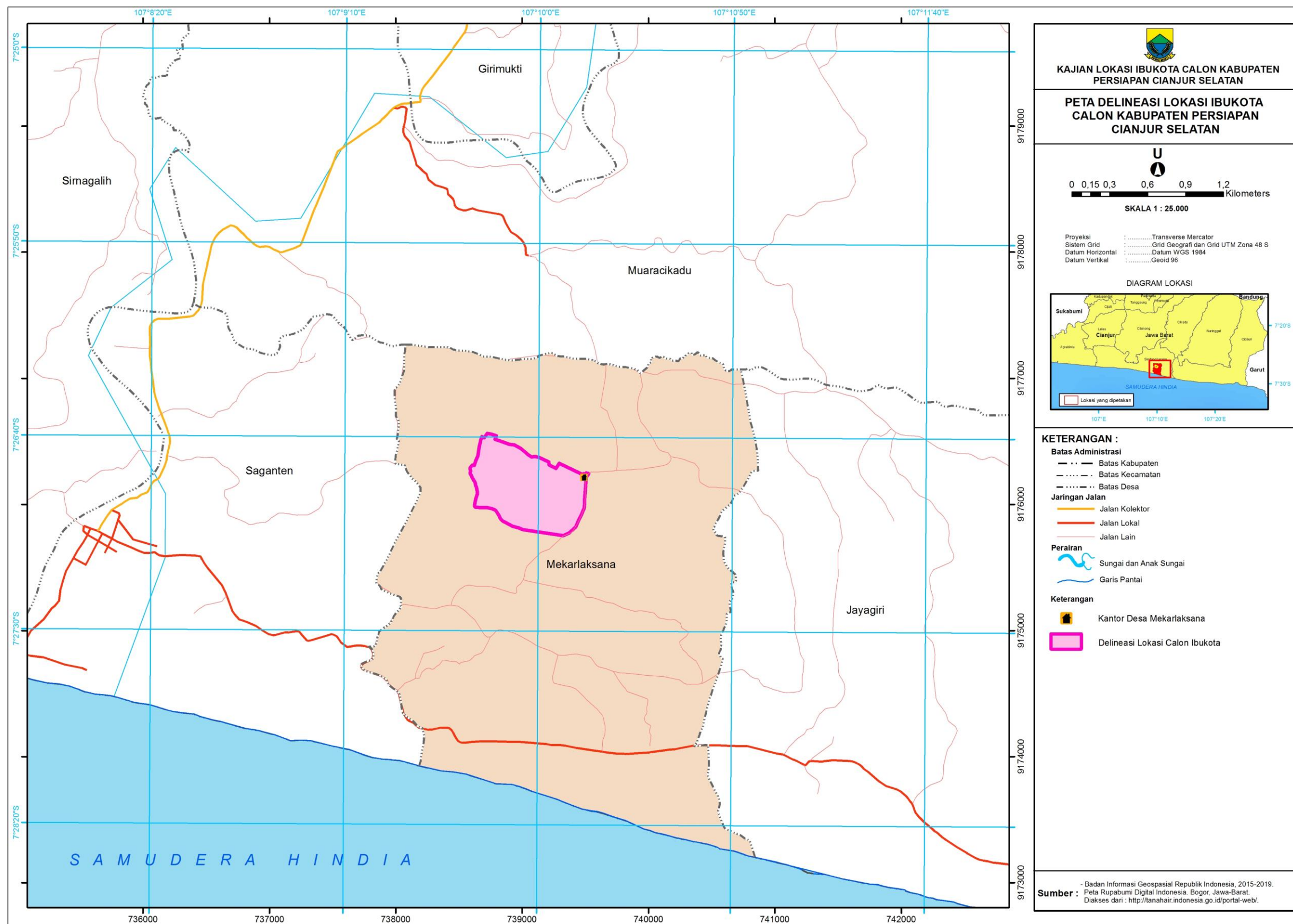


- d. kondisi sosial, budaya, dan sejarah Lokasi
- e. kondisi politik dan keamanan Lokasi Ibu Kota
- f. aksesibilitas Lokasi Ibu Kota Calon Kabupaten Persiapan Cianjur Selatan dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat
- g. tingkat kerentanan terhadap bencana di lokasi Ibu kota daerah persiapan
- h. potensi perekonomian calon lokasi ibukota daerah persiapan

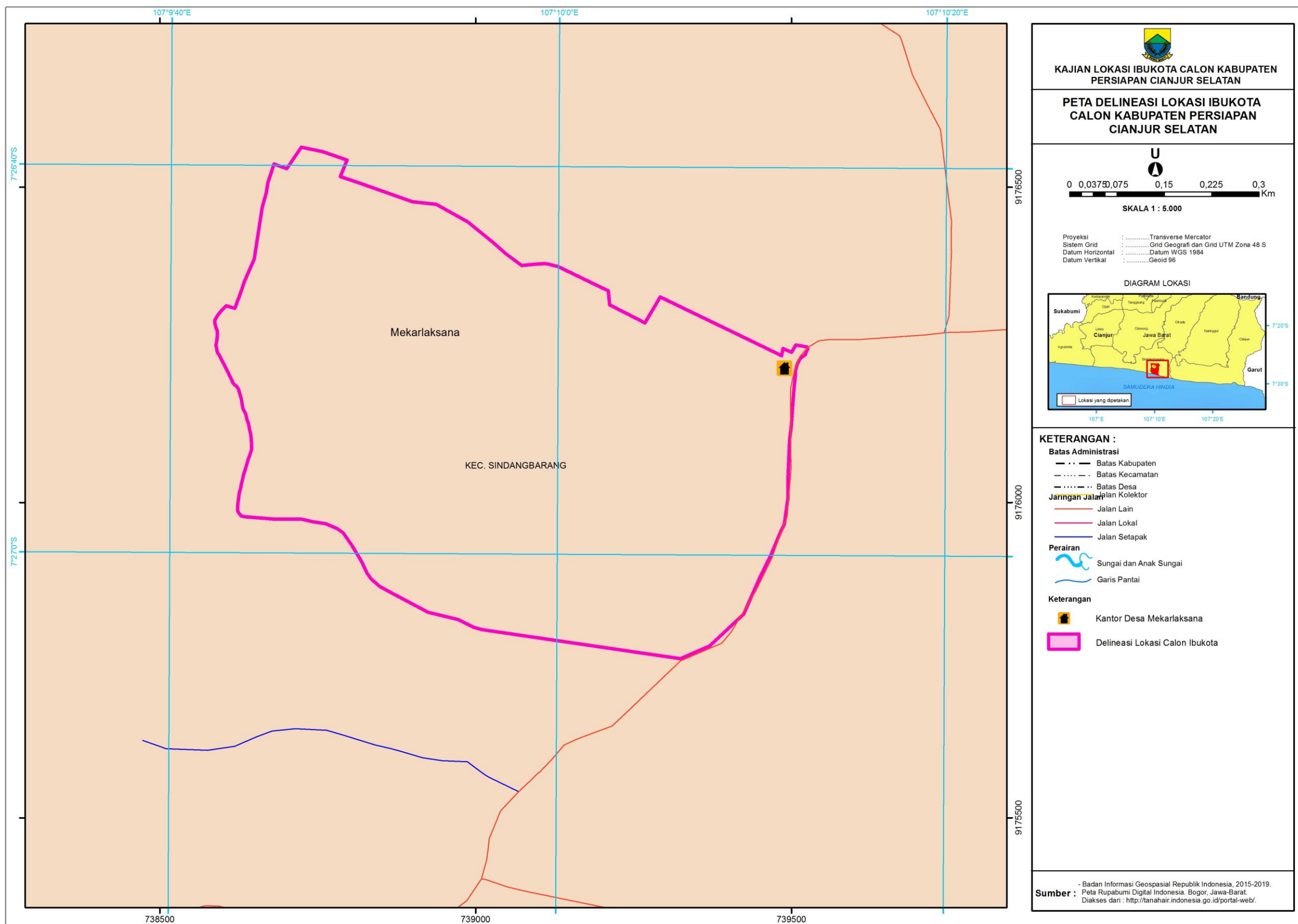
6.2. LOKASI CALON IBUKOTA PERSIAPAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan di atas, dengan mengambil berbagai macam parameter yang telah dilakukan dan melalui forum kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kabupaten Cianjur yang mengundang stakeholder terkait, maka disepakati bahwa lokasi calon ibukota persiapan Cianjur Selatan berada di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dengan luas ± 40 ha. Berikut ini adalah foto lokasi eksisting penggunaan lahan dan juga peta lokasi calon ibukota persiapan tersebut :

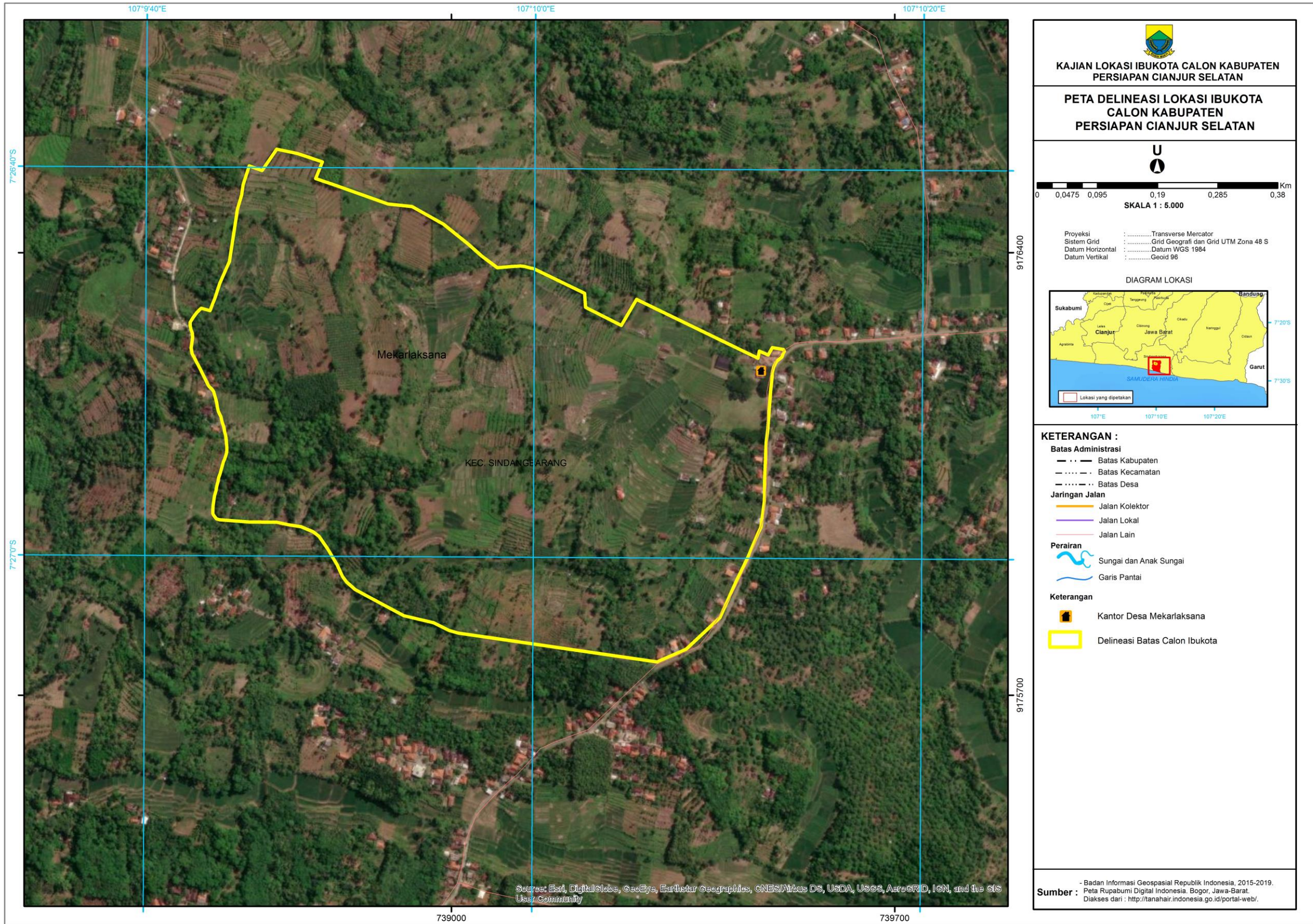




Gambar 6.1 Peta Lokasi Calon Ibukota Persiapan Cianjur Selatan (Skala 1:25.000)



Gambar 6.2 Peta Lokasi Calon Ibukota Persiapan Cianjur Selatan (Skala 1:5.000)



Gambar 6.3 Peta Lokasi Calon Ibukota Persiapan Cianjur Selatan (Skala 1:5.000) baseline Citra Satelit